

JURNAL DESA

Volume 1 No. 1 Desember Tahun 2018

IRMAN FIRMANSYAH & SYAEPUDIN

Model Smart Village Berbasis Teknologi Informasi
(Studi Kasus : Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)

EKA PRASETYA RIAUNINGRUM & SOFYAN CHOLID

Pendekatan Aset Penghidupan Dalam Pembangunan di Desa Beji

ARIF PURBANTARA

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
(Studi Kasus: Penggunaan Dana Desa di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede)

FARIDA YUSTINA

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDESA) Dlingo Giritama, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

WIDARJANTO & DWI ISTIQOMAH

Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Rambut Parit

EMAR PISA BR GINTING SUKA & SYARAH SITI SUPRIYANTI

Uji Paket Teknologi Budidaya Untuk Peningkatan Produktivitas Kedelai
Pada Lahan Ultisol di Kawasan Transmigrasi

J-Desa

Vol. 1

No. 1

1-75 Hal

Desember 2018

ISSN 2665-2442



Pusat Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Jakarta

JURNAL DESA

Volume 1 No. 1 Desember Tahun 2018

Jurnal Desa (J-Desa) merupakan publikasi yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan kreativitas akademisi, peneliti, dan pemerhati desa untuk menginformasikan gagasan, ide, dan pemikiran terkait dengan bidang perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Lingkup dapat meliputi pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan perdesaan dalam skala pra-desa, desa, kawasan, dan daerah. Jurnal Desa terbit dua kali setahun, bulan Juli dan Desember.

DEWAN REDAKSI

Ketua :

Dr. Ir. Saraswati Soegiharto, M.A

Anggota :

Dr. Ir. Sri Najiyati, M.Si

Drs. Anharudin, M.Si

Ir. Danarti

Ir. Jenny Delam, M.Si

Sarjono Herry Warsono, S.Si, M.Si

MITRA BESTARI

Dr. Ety Rahayu (Kesejahteraan Sosial)

Dr. Triyanti Anugrahini, M.Si (Kesejahteraan Sosial)

Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T (Pengembangan Wilayah)

Ir. Mohammad Chozin, M.Sc., Ph.D. (Agronomi, Pemuliaan Tanaman)

Drs. H. Indro Warsito, M.A (Manajemen Sumber Daya Manusia)

REDAKSI PELAKSANA

Ketua : Ir Lis Purbandini

Anggota : Nur Ariyanto, S.Pt, M.Si, M.Sc

Farida Yustina, S.H, M.H

Mujianto, S.E

Dwi Istiqomah, S.T

ALAMAT REDAKSI

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Gedung Utama Lt.6. Jln TMP Kalibata No. 17 Jakarta 12750

Telp/Fax : +62-21-7971010

Email : desajurnal@gmail.com

Kata Pengantar

Jurnal Desa edisi I tahun 2018 merupakan edisi pertama semenjak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di bentuk. Edisi jurnal kali ini menampilkan 6 (enam) artikel yang akan mengulas tentang pembangunan desa dan pengembangan kawasan transmigrasi dari berbagai sudut pandang.

Dalam konteks pembangunan desa akan mengetengahkan isu-isu tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa disajikan dalam 4 (empat) artikel yaitu: *Model Smart Village Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)*, *Pendekatan Aset Penghidupan dalam Pembangunan di Desa Beji*, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Penggunaan Dana Desa Di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede)*, *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Dlingo Giritama, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*. Selanjutnya 2 (dua) artikel berikutnya mengangkat masalah ketransmigrasian yaitu: *Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit dan Uji Paket Teknologi Budidaya untuk Peningkatan Produktivitas Kedelai pada Lahan Ultisol Di Kawasan Transmigrasi*.

Redaksi berharap semoga hasil pemikiran penulis yang dituangkan dalam artikel Jurnal Desa ini dapat menambah pengetahuan, wawasan bagi kalangan akademisi dan pembaca serta dapat menjadi bahan masukan untuk para pengambil kebijakan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada penulis, editor, mitra bestari dan pihak-pihak lain yang telah ikut berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini.

Redaksi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR ABSTRAKSI	iii
IRMAN FIRMANSYAH & SYAEPUDIN Model Smart Village Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)	1
EKA PRASETYA RIAUNINGRUM & SOFYAN CHOLID Pendekatan Aset Penghidupan Dalam Pembangunan di Desa Beji	13
ARIF PURBANTARA Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Penggunaan Dana Desa di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede)	27
FARIDA YUSTINA Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Dlingo Giritama, Kabupaten Bantul, Yogyakarta	39
WIDARJANTO & DWI ISTIQOMAH Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Rambut Parit	57
EMAR PISA BR GINTING SUKA & SYARAH SITI SUPRIYANTI Uji Paket Teknologi Budidaya Untuk Peningkatan Produktivitas Kedelai Pada Lahan Ultisol di Kawasan Transmigrasi	67
UCAPAN TERIMA KASIH	76
KETENTUAN PENULISAN NASKAH JURNAL DESA (J-DESA)	77

Irman Firmansyah dan Syaepudin

MODEL SMART VILLAGE BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

[Studi Kasus: Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat]

Jurnal Desa Volume 1 No. 1 Desember Tahun 2018, Hal 1-12

Abstrak

Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kecamatan yang diarahkan menuju *smart village* berbasis IT, dengan dibangunnya situs Surade.co.id. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi potensi dalam membangun *smart village* berbasis IT, (2) mengetahui tingkat perkembangan daya saing dengan adanya *smart village* berbasis IT, (3) menyusun arah kebijakan pembangunan berbasis IT. Pengembangan *e-database* Surade.co.id menjadi penting dalam pembangunan dan percepatan pembangunan desa menuju *Smart Village* sebagai konsep yang dimunculkan dalam penelitian ini untuk dapat menyamakan percepatan seperti *Smart City*, serta mendukung pembangunan dari pinggiran atau desa. Konsep *e-database* harus sederhana dan komunikatif dengan mesin pencarian yang baik serta berbasis peta *by name by address*. Hasil penelitian penerapan di masyarakat adanya peningkatan pemanfaatan website oleh pengguna untuk mencari UKM atau usaha yang ada di Surade dimana peningkatan tersebut sebesar 13,33 persen di semester pertama hasil penelitian. Arah kebijakan dalam optimalisasi *e-database* diarahkan pada melakukan penyuluhan dan sosialisasi, berpartisipasi sebagai sponsor dalam semua kegiatan di Surade, merangkul usaha *door to door*, serta peningkatan kerjasama instansi atau kelompok.

Kata Kunci: Desa Cerdas, *E-Database*, *Website*, Model Interpretasi Terstruktur

Abstract

Surade is a district in Sukabumi regency that led to be an IT-based smart village, with the establishment of Surade.co.id site. This research aimed to: (1) Identify potentials to build an IT-based smart village, (2) find out the level of competitiveness by the IT-based smart village, (3) set the IT-based development policy. The development of Surade e-database is essential for village development and acceleration to be a Smart Village as a concept that emerged in this research to equalize the acceleration as Smart City and support the development from peripheral or rural areas. E-Database concept should be simple and communicative with a reliable search engine and map-based by name and address. The result showed that the in first half implementation indicated the the increasing of the website usage by users to search SMEs or businesses in Surade which it boosts 13.33 percent. The optimizing e-database policy led at conducting counselling and socialization, participating as a sponsor in all activities in Surade, embracing door to door business, as well as improving the institutional or group cooperation.

Keywords: Smart Village, *E-Database*, *Website*, Interpretive Structural Modelling

Eka Prasetya Riauningrum dan Sofyan Cholid

PENDEKATAN ASET PENGHIDUPAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BEJI

Jurnal Desa Volume 1 No. 1 Desember Tahun 2018, Hal 13-26

Abstrak

Perdesaan menjadi tempat bagi sebagian besar penduduk miskin di Indonesia. Berbagai program diberikan Pemerintah untuk mendorong pembangunan di perdesaan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Hasil pelaksanaan pembangunan di perdesaan belum mampu meningkatkan kehidupan/kebutuhan masyarakat karena pembangunan yang dilakukan belum memperhatikan sumber daya penghidupan yang dimiliki. Sedangkan sumber daya penghidupan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan desa agar hasil pembangunan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sumber daya penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat petani ikan di Desa Beji agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan sampel *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya penghidupan berupa aset fisik, dan finansial yang dimiliki masyarakat petani ikan masih rendah dalam hal penguasaan peralatan produksi, posisi tawar petani, dan permodalan. Sedangkan, sumber daya penghidupan berupa aset manusia, alam dan sosial sudah baik tetapi perlu ditingkatkan dalam hal: (1) penguasaan teknologi budidaya dan pengolahan hasil (2) pengelolaan lingkungan dan (3) pengembangan jejaring usaha.

Kata kunci: sumber daya penghidupan, pemberdayaan masyarakat, petani ikan, Desa Beji, pembangunan desa

Abstract

Rural areas make up the largest number of poverty in Indonesia. Various programs are given by the government to encourage rural development in order to increase public welfare. Unfortunately, the implementation of rural development has not been able to improve the quality of life the community. It is because the undertaken development has not focus on the livelihoods that owned by the community. Whereas, the source of livelihood is essential for the implementation of rural development in order to achieve goals and improve welfare. This paper aims to analyze and describe the livelihood assets that owned by fishermen community in Beji Village to be used as a reference in the implementation of rural development. This research uses a qualitative approach and purposive sampling. The results showed that the livelihood assets owned by fishermen such as physical and financial capital were low in terms of production tools expertise, bargaining position and financial. Whereas the livelihood assets like human, natural and social capital were good, but need to be improved in terms of: 1) cultivation and processing technology expertise; 2) environmental management; and 3) business network development

Keywords: *livelihood asset, community empowerment, fishermen, Beji's village development*

Arif Purbantara

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus pada Penggunaan Dana Desa di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede)

Jurnal Desa Volume 1 No. 1 Desember Tahun 2018, Hal 27-38

Abstrak

Pembangunan desa yang dilakukan selama ini masih di dominasi kepala desa dan *elite capture*. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit bahwa pembangunan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas baik dalam perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah dusun dan desa, pelaksanaannya, dan pengawasannya. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan hal utama karena asas pembangunan desa bertumpu pada manusia. Intervensi dari pemerintah melalui dana desa juga mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana desa di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif *field research*. Analisa data yang digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat menggunakan analisa interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pabuaran dalam pengambilan *decision making*, *implementation*, dan *evaluation*. Partispasi yang dilakukan oleh masyarakat berupa partisipasi langsung dan keterwakilan. Partisipasi langsung dan keterwakilan dalam *decision making* berupa ide/gagasan, dalam *implementation* berupa tenaga, dana, makanan, dan keahlian. Sedangkan untuk tahap *evaluation*, partisipasi diwakili oleh BPD.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan Desa, dan Dana Desa

Abstract

Nowadays the village development is still dominated by the village head and elite capture. Law Number 6 of 2014 concerning Village explicitly states that village development must involve broad community participation both in village development planning through hamlet and village meetings, implementation, and evaluation. In this case community participation is the main key because the principle of village development relies on humans. Government intervention through village funds also requires community participation. This study aims to examine community participation in rural development through the use of village funds in Pabuaran Village, Bojong Gede District, Bogor Regency. This study uses a qualitative field research approach and interpretative analysis to analyze community participation. The results showed that community participation in Pabuaran Village arises in decision making, implementation, and evaluation. The participation carried out by the community is direct and representative participation. Direct and representative participation in decision making is shown through ideas, while in implementation is shown through labour, funds, food contribution, and expertise. Meanwhile in evaluation phase, participation is represented by the village councils (BPD).

Keywords: Participation, Village Development, and Village Funds

Farida Yustina

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DLINGO GIRITAMA, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA

Jurnal Desa Volume 1 No. 1 Desember Tahun 2018, Hal 39-56

Abstrak

Pendirian BUMDesa di berbagai desa terbukti telah membuat perekonomian bergerak secara signifikan. Tahun 2017 tercatat telah berdiri kurang lebih 32.249 BUMDesa dari 74.957 desa di seluruh Indonesia. Namun lemahnya kontrol kepemimpinan dan SDM yang kurang mumpuni membuat BUMDesa banyak yang gulung tikar sebelum merasakan hasil usahanya. Kajian ini akan mendeskripsikan pengalaman BUMDesa Dlingo Giritama di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang keberhasilannya ditengarai berkat faktor kepemimpinan kepala desa. Oleh sebab itu, kepemimpinan kepala desa di BUMDesa Dlingo Giritama dipilih sebagai media pembelajaran agar keberhasilannya dapat diterapkan pada BUM Desa lain. Penulisan dilakukan dengan pendekatan kualitatif guna memahami dan mendeskripsikan peran kepemimpinan Kepala Desa pada Badan Usaha Milik Desa Dlingo Giritama dalam mengelola potensi di Desa Dlingo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh empat sifat umum kepemimpinan organisasi yang dimiliki yaitu; kecerdasan, kedewasaan, motivasi dan sikap hubungan kemanusiaan. Sedangkan perilaku gaya dasar kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang mendominasi adalah konsultatif pada masa rintisan dan bergeser ke arah partisipatif ketika usaha mulai berjalan. Kepemimpinan tersebut lebih menitikberatkan pada gaya demokratis atau *democratic leadership* yang terfokus pada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Untuk memberikan pembatasan kewenangan Kepala Desa dalam berkontribusi pada kelembagaan BUMDesa, perlu penguatan BPD agar mampu berfungsi sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan Kepala Desa sehingga Kepala Desa tidak menjadi pusat kekuasaan.

Kata Kunci: BUMDESA, Kepemimpinan Kepala Desa, Dlingo

Abstract

The establishment of Village-Owned Enterprise (BUMDesa) in some villages has proven to make the economy increase significantly. In 2017 there were 32,249 BUMDesa registered from 74,957 villages throughout Indonesia. However, due to lack of control leadership and incapable human resources make many BUMDesa out of business before making a profit. This study will describe the experience of the BUMDesa Dlingo Giritama in Bantul Regency, Yogyakarta, that succeeded because of the leadership of the village head. Therefore, the leadership of the village head on BUMDesa Dlingo Giritama was chosen as a learning media so that its success can be applied to other BUMDesa. The research was conducted with a qualitative approach in order to understand and describe the leadership role of the Village Head in the BUMDesa of Dlingo Giritama Village in managing their potential assets. The results showed that the success was influenced by the four general characteristics of self

organizational leadership, which are: intelligence, maturity, motivation and human relations attitude. Whereas the leadership style in making decisions is dominated by consultatives during the early period and shifts to participatory when the business starts. This leadership is more focused on democratic leadership that concentrated on the ability to create morals and the ability to build the trust. To confine the authority of the Village Head in contributing to BUMDesa institutions, it is necessary to strengthen the Village Councils (BPD) in order to control the power of the Village Head.

Key words: Village-Owned Enterprise, Village Head Leadership, Dlingo Village

Widarjanto dan Dwi Istiqomah

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KAWASAN TRANSMIGRASI RAMBUTAN PARIT
Jurnal Desa Volume 1 No. 1 Desember Tahun 2018, Hal 57-66

Abstrak

Pengembangan masyarakat memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan kawasan transmigrasi, tetapi dalam implementasi pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) masih dominan pembangunan fisik prasarana sarana. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat di KTM Rambutan Parit. Penelitian dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan melihat hubungan gejala yang bersifat interaktif. Lokasi penelitian di KTM Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Analisis penelitian menggunakan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat sesuai konsep Ife dan Tesoriero. Pengembangan masyarakat di KTM Rambutan Parit sudah menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat seperti perencanaan, pemenuhan HAM, intervensi pemerintah, pendamping, partisipasi, membangun komunitas, dan keberlanjutan, tetapi belum optimal dan belum menyertakan proses pemberdayaan, sehingga belum menciptakan kemandirian dan keberlanjutan. Pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Kelembagaan ekonomi dan sosial yang dikembangkan mempermudah kontrol pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan pelaksanaan. Kelembagaan dapat mendorong terjadinya dinamika sistem atau proses seperti interaksi yang intensif, harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi masyarakat transmigrasi.

Kata kunci: pengembangan masyarakat, transmigrasi, Kota Terpadu Mandiri.

Abstract

Community development has a strategic position in the development of transmigration areas. However, in the implementation of Self-sufficient Integrated City (SIC) development was still dominant physical development of infrastructure

facilities. Therefore, the purpose of this research was to analyze the implementation of community development principles in SIC Rambutan Parit. The study was conducted through a qualitative approach considered the social reality as something holistic, complex, dynamic, full of meaning and observe the relationship of interactive symptoms. The research was conducted in Rambutan Parit SIC, Ogan Ilir Regency, and South Sumatera Province, using the community development principles analysis according to the concept of Ite and Tesoriero. Community development in SIC Rambutan Parit has implemented community development principles such as planning, human rights compliance, government intervention, facilitator, participation, community building and sustainability, but not yet optimal and include the empowerment process, so it has not created self-sufficient and sustainability. Community development was carried out through community-based and regional-based institutions. The economic and social institutions that were developed facilitate control of decision-making, policies, programs, and implementation. Institutions could encourage the dynamics system or process such as intensive interaction, harmonization, tolerance, collective activities, and transmigration communities participation.

Key words: *Community Development, Transmigration, Self-sufficient Integrated City*

Emar Pisa Br Ginting Suka dan Syarah Siti Supriyanti

UJI PAKET TEKNOLOGI BUDIDAYA UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KEDELAI PADA LAHAN ULTISOL DI KAWASAN TRANSMIGRASI
Jurnal Desa Volume 1 No. 1 Desember Tahun 2018, Hal 67-75

Abstrak

Kedelai merupakan komoditas pangan penting dalam perekonomian Indonesia dan menempati urutan ke dua setelah padi. Komoditas kedelai telah masuk dalam program Pangan Nasional saat ini karena kebutuhan kedelai terus meningkat tiap tahunnya. Penggunaan varietas yang adaptif dan spesifik lokasi sangat diperlukan dalam peningkatan pertumbuhan produktifitas kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan paket teknologi budidaya yang tepat untuk peningkatan pertumbuhan produktivitas kedelai yang sesuai dengan karakteristik lokasi lahan uji coba agar bisa diterapkan di lokasi transmigrasi yang memiliki karakteristik lahan yang sama. Uji ini dilaksanakan di lokasi BP2TPK Bengkulu mulai bulan Maret sampai September 2014. Rancangan Percobaan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 8 paket teknologi sebagai perlakuan. Pengamatan dilakukan terhadap penampilan pertumbuhan dan hasil biji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum paket teknologi yang diuji menghasilkan pertumbuhan yang baik sekalipun lahan yang digunakan memiliki pH tanah rendah. Paket teknologi yang menggunakan varietas Anjasmoro sebagai bahan tanam menunjukkan pertumbuhan dan hasil biji kering petakan yang lebih tinggi dibanding paket teknologi yang menggunakan varietas Ijen. Hasil biji kering ubinan tertinggi (4.7 kg) diperoleh dari penerapan

paket yang menggunakan varietas Anjasmoro, pupuk kandang dan sekam padi yang ditutup dengan jarak tanam 30 cm x 15 cm yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi budidaya kedelai di kawasan transmigrasi.

Kata kunci: kedelai, varietas, paket teknologi, lahan transmigrasi.

Abstract

Soybean is an important commodity for the economy in Indonesian as the second biggest commodity after rice. Nowadays, soybean commodity has been included in the National Food Program because the demand keeps increasing each year. Utilization of adaptive and site-specific varieties is essential to increase the growth of soybean productivity. This research aimed to compare soybeans growth and productivity through technology application implemented at BP2TPK Bengkulu from March to September 2014. The experimental design that used was Randomized Block Design (RBD) with 8 packets as a technology treatment. Observations were made on the appearance of seed growth and yield. The results showed that in general, the tested technology package produced good growth even though in low soil pH. Technology package using Anjasmoro varieties as a planting material shows higher growth and yield of dry beans than technology package using Ijen varieties. The highest yield of dry seeds (4.7 kg) was obtained from the application of Anjasmoro varieties, manure, and rice husk that covered with the spacing of 30 cm x 15 cm which can be used as the basic recommendation of soybean cultivation in transmigration areas.

Key words: soybean, varieties, technology package, transmigration areas

Halaman ini sengaja dikosongkan

MODEL SMART VILLAGE BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

(Studi Kasus: Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)

SMART VILLAGE MODEL BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY (Case Study: Surade District, Sukabumi Regency, West Java Province)

Irman Firmansyah¹ dan Syaepudin²

¹ Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB

² Info Group Company-Indonesia

Po Box 438, Bogor 16004

E-mail: irman_f@yahoo.com

Abstrak

Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kecamatan yang diarahkan menuju *smart village* berbasis IT, dengan dibangunnya situs Surade.co.id. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi potensi dalam membangun *smart village* berbasis IT, (2) mengetahui tingkat perkembangan daya saing dengan adanya *smart village* berbasis IT, (3) menyusun arah kebijakan pembangunan berbasis IT. Pengembangan e-database Surade.co.id menjadi penting dalam pembangunan dan percepatan pembangunan desa menuju *Smart Village* sebagai konsep yang dimunculkan dalam penelitian ini untuk dapat menyamakan percepatan seperti *Smart City*, serta mendukung pembangunan dari pinggiran atau desa. Konsep e-database harus sederhana dan komunikatif dengan mesin pencarian yang baik serta berbasis peta *by name by address*. Hasil penelitian penerapan di masyarakat adanya peningkatan pemanfaatan website oleh pengguna untuk mencari UKM atau usaha yang ada di Surade dimana peningkatan tersebut sebesar 13,33 persen di semester pertama hasil penelitian. Arah kebijakan dalam optimalisasi e-database diarahkan pada melakukan penyuluhan dan sosialisasi, berpartisipasi sebagai sponsor dalam semua kegiatan di Surade, merangkul usaha *door to door*, serta peningkatan kerjasama instansi atau kelompok.

Abstract

Surade is a district in Sukabumi regency that led to be an IT-based smart village, with the establishment of Surade.co.id site. This research aimed to: (1) Identify potentials to build an IT-based smart village, (2) find out the level of competitiveness by the IT-based smart village, (3) set the IT-based development policy. The development of Surade e-database is essential for village development and acceleration to be a Smart Village as a concept that emerged in this research to equalize the acceleration as Smart City and support the development from peripheral or rural areas. E-Database concept should be simple and communicative with a reliable search engine and map-based by name and address. The result showed that the in first half implementation indicated the the increasing of the website usage by users to search SMEs or businesses in Surade which it boosts 13.33 percent. The optimizing e-database policy led at conducting counselling and socialization, participating as a sponsor in all activities in Surade, embracing door to door business, as well as improving the institutional or group cooperation.

Kata Kunci:

Desa Cerdas,
E-Database, Website,
Model Interpretasi
Terstruktur

Keywords:

Smart Village,
E-Database,
Website, Interpretive
Structural Modelling

I. PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan

yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep desa berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu

daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini. Hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing wilayah.

Membangun dari pinggiran sesuai Nawacita, dimana dapat diartikan fokus pembangunan saat ini adalah level terendah yaitu desa atau kampung, sehingga dapat meningkatkan desa agar bisa setara dengan kota secara cepat dan berkesinambungan. Pandangan bahwa kota lebih maju, lebih canggih, atau lebih sejahtera perlu dibalik dengan langkah-langkah inovatif yang salah satunya adalah menciptakan *Smart Village* atau kampung cerdas berbasis IT. Dilandasi pada kenyataan bahwa desa juga menjadi tumpuan pembangunan nasional, dan keberhasilan desa secara akumulatif akan mendorong kelangsungan ekonomi nasional, maka posisi desa sungguh sangat penting. Desa perlu dikembangkan secara inovatif menuju desa cerdas (*Smart Village*), merupakan rangkaian dari Program *Universal Service Obligation* (USO). Program ini dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan bidang *Information and Communication Technology* (ICT) pada masyarakat, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian di daerah (Subiakto, 2013). Implementasi *Cyber Village* dan *Smart Village* menjadi salah satu langkah yang solutif dalam melakukan percepatan melek teknologi dan informasi berbasis internet (Sofiyudin dan Nugroho, 2017)

Disisi lain, setiap perdesaan memiliki kondisi dan karakteristik yang relatif berbeda antar desa. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Juni 2014 mengemukakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 71,19 juta dan pada kuartal I 2014 angka ini naik menjadi 82 juta. Adapun pemanfaatan internet di sektor

bisnis, e-mail (mengirim dan menerima) menduduki posisi teratas (95,75 persen), kedua internet dimanfaatkan untuk mencari berita/informasi (78,49 persen), ketiga mencari barang/jasa (77,8 persen), keempat informasi lembaga pemerintahan (tender) sebesar (65,07 persen), kelima untuk sosial media (61,23 persen). Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa peminat internet di sektor bisnis sangatlah tinggi. Tidak heran jika banyak kalangan yang memanfaatkan internet sebagai salah satu media yang digunakan untuk melakukan promosi (Riyanto, 2015).

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut UU tersebut juga menjelaskan bahwa, pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa yang difokuskan pada keempat lingkup pembangunan tersebut hendak menegaskan esensi dari UU desa yakni memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi lebih mandiri menjadi objek sekaligus subjek pembangunan.

Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kecamatan yang diarahkan menuju *Smart Village* berbasis IT, dengan dibangunnya situs Surade.co.id. Perkembangan zaman dan semakin penuhnya kesibukan manusia sehingga hampir manusia melupakan akan pentingnya perubahan dasar yang semakin berkembang. Banyaknya waktu tersita dalam aktivitas sehari-hari dalam pendidikan atau bekerja. Problem yang terjadi dalam memenuhi kebutuhan sandang sulit untuk meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Oriesadewita, 2013). Dengan adanya Surade.co.id menjadikan wadah untuk desa-desa berkarya dan berdaya saing sebagai

“Desa IT” meningkatkan kalangan pelajar dalam membangun IT serta menikmati secara bersama kemudahan-kemudahan manfaat dari Desa IT. Adanya *website* dapat memenuhi kebutuhan media atau sarana penyampaian informasi (Riyadi, Retnandi, & Deddy, 2012).

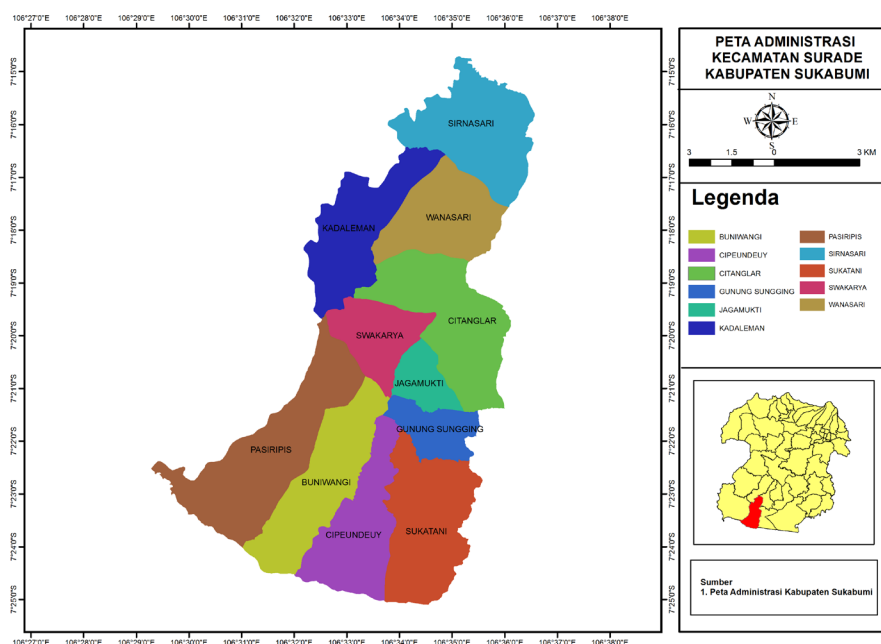
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi potensi dalam membangun *smart village* berbasis IT, (2) Mengetahui tingkat perkembangan daya saing dengan adanya *smart village* berbasis IT, (3) Arah kebijakan pembangunan berbasis IT.

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2016 sampai Februari 2017 di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang terdiri atas 13 desa/kelurahan meliputi Surade, Buniwangi, Cipeundeuy, Citanglar, Gunung Sungging, Jagamukti, Kadleman, Kademangan, Pasiripis, Sirnasari, Sukatani, Swakarya dan Wanasari. Kecamatan Surade berbatasan langsung dengan Kecamatan Ujung Genteng, Kecamatan Cibitung, dan Kecamatan Jampang Kulon. Adapun lokasi penelitian berdasarkan peta Kabupaten Sukabumi pada Gambar 1.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan pendekatan secara kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan non-statistik. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei dan wawancara untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap daya saing wilayah dengan adanya teknologi informasi menuju *Smart Village*.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara semistruktur dan studi pustaka. Teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling* dimana dalam penelitian ini terdapat 30 responden pelaku usaha, 2 narasumber pemerintahan serta 2 narasumber pengajar IT. Keabsahan data menggunakan validitas internal untuk menguji kebenaran data. Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori. Aktivitas analisis data terdiri atas:



Gambar 1. Lokasi Kecamatan Surade

data reduction, data display dan conclusion drawing/verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh (Satori & Komariah, 2009).

Dalam penyusunan dan pembuatan E-Database Perdesaan (Kecamatan Surade) dibagi menjadi dua konsep pengembangan yaitu merancang dan mempersiapkan struktur *database*, serta pembuatan design halaman. Untuk melaksanakan pembuatan program, digunakan suatu paket untuk mempermudah pengerjaan program bernama PHP *Triad* yang berisi *Apache Web Server*, *PHP* dan *MySQL*. Dalam pembuatan *website* ini, ada 5 perangkat utama yang disediakan yaitu :

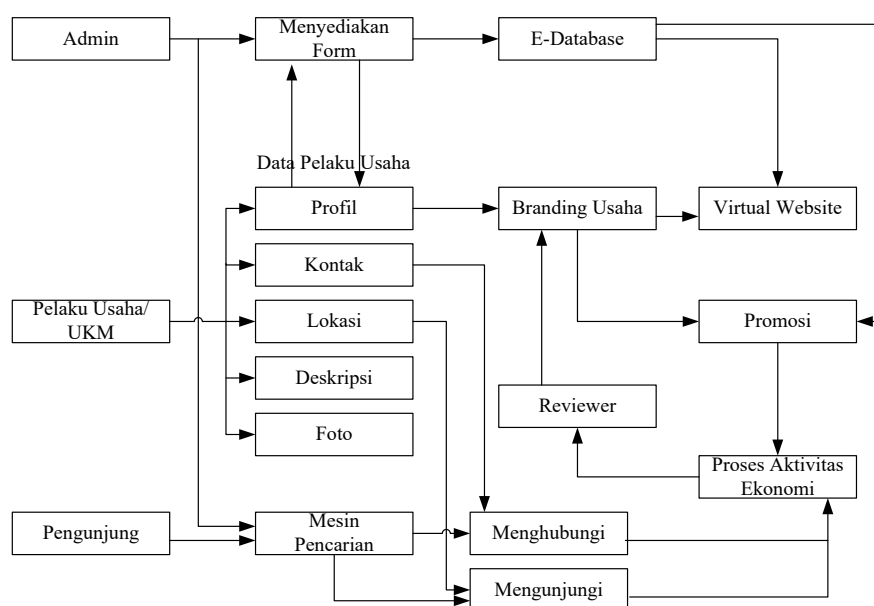
- a. Web Server: Program yang digunakan berupa web server *Apache* versi 2.4.27 for Win 64 yang dapat dijalankan pada sistem operasi Windows atau yang lebih tinggi.
- b. Database Server: *Website* ini menggunakan *database*, maka diperlukan database server sebagai penyedia informasi data yang kemudian dapat diolah ataupun dimodifikasi dari dalam *website*. Dalam aplikasi ini digunakan MySQL *database server* versi 5.7.19 for Win 64 sebagai server basis data.

c. PHP. Menerjemahkan dan memproses dokumen oleh *web server*, maka diperlukan PHP yang dapat dijadikan sebagai modul dari *web* tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan PHP versi 5.6.31.

d. Sublime Text2. Penggunaan *Sublime Text2* untuk mempermudah melakukan penulisan skrip web di laman lembar kerja.

Tujuan adanya *E-Database* desa sebagai media informasi berbasis IT diharapkan dapat memberikan kecepatan serta kemudahan dalam menyimpan, serta menampilkan kembali data tersebut, efisiensi ruang penyimpanan, karena dengan basis data, reduksi data akan bisa dihindari, keakuratan data, ketersediaan data, kelengkapan data, keamanan data, serta kebersamaan dalam pemakaian.

Gambar 2 menunjukkan keterkaitan antar user dari proses pemasangan hingga proses aktivitas ekonomi. Arah kebijakan dalam implementasi *Smart Village* menggunakan metode *Interpretative Structural Modeling* (ISM) yang dijalankan dengan *Software Exsimpro Professional* (Lisensi: ISM-180201-Pro1). ISM adalah teknik pemodelan deskriptif yang



Gambar 2. Diagram Alir Keterkaitan Antar User



Gambar 3. Tampilan E-Database Perdesaan

merupakan alat strukturisasi untuk suatu hubungan langsung (Saxena, Sushil, & Vrat, 1992). Dasar pengambilan keputusan dalam teknik ISM adalah kelompok. Model struktural dihasilkan guna memotret masalah kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. Dengan teknik ISM, model mental yang tidak jelas ditransformasikan menjadi model sistem yang tampak (*visible*). ISM digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang bersifat abstrak sehingga dapat lebih struktural. Dalam metode ISM menggunakan ISM *software* yang akan terbentuk hirarki dari variabel dan ditempatkan pada diagram DP-D (*Driver Power-Dependent*) berdasarkan hasil dari responden pakar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

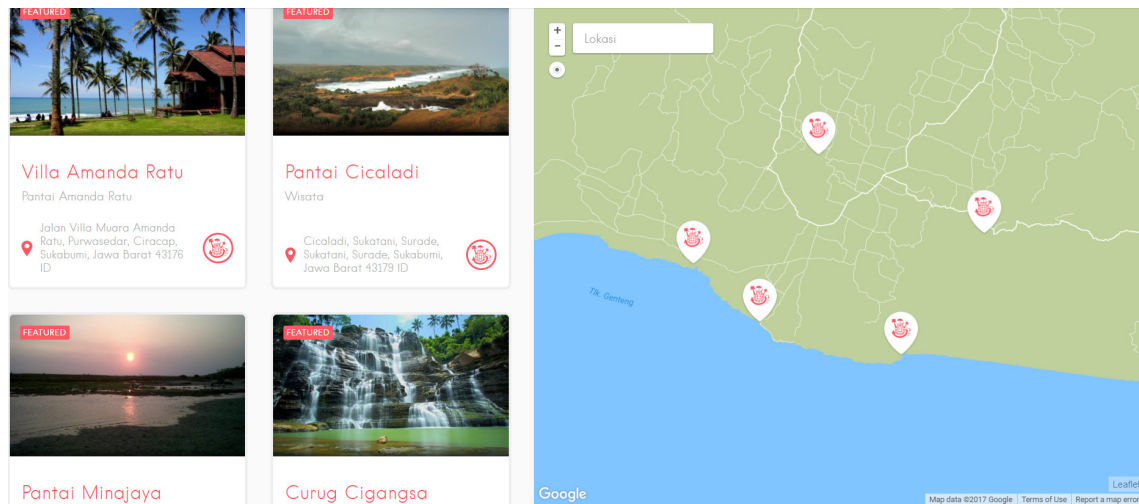
A. Surade.co.id sebagai arah pembangunan Smart Village Berbasis IT

Konsep *Smart Village* menjadi konsep yang mengikuti perkembangan dari *Smart City*. Dengan adanya perkembangan untuk membangun dari desa maka konsep *Smart Village* dibuat dalam penelitian ini. Konsep *Smart Village* diarahkan pada E-Database Perdesaan (Kecamatan Surade) menggunakan *database* sebagai bank data,

untuk dipublikasi secara umum melalui media *online* yang berisi informasi wilayah sekitar, informasi, jual beli dan berita.

Hasil tampilan E-Database Perdesaan (Kecamatan Surade) didesain untuk lebih komunikatif. Tampilan *layout* halaman *website* ini cukup sederhana dan didesain mudah untuk digunakan. Di halaman depan ada mode pencarian yang dapat digunakan untuk menemukan apa yang akan dicari seperti kegiatan, lokasi atau jenis usaha. Pengelompokan pada menu tampilan utama menjadi penting untuk memudahkan melihat berbagai *listing* sesuai dengan kategori yang dibutuhkan. Tampilan utama *website* seperti pada Gambar 3.

Konsep pengembangan *surade.co.id* berbasis mesin pencarian untuk memudahkan masyarakat dalam menemukan suatu lokasi di daerah, serta terdapat beberapa informasi detail yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi yang diperlukan. Tetapi dalam pemenuhan kelengkapan *database* diperlukan pengumpulan data dari lapangan. *Website* *surade.co.id* juga dapat memudahkan orang untuk melakukan pencarian lokasi karena sudah berbasis *google map* dan dapat menemukan tempat yang sudah ada di dalam *website* tersebut, dapat diketahui akses dan waktu tempuh menuju tempat yang diinginkan seperti pada Gambar 4.



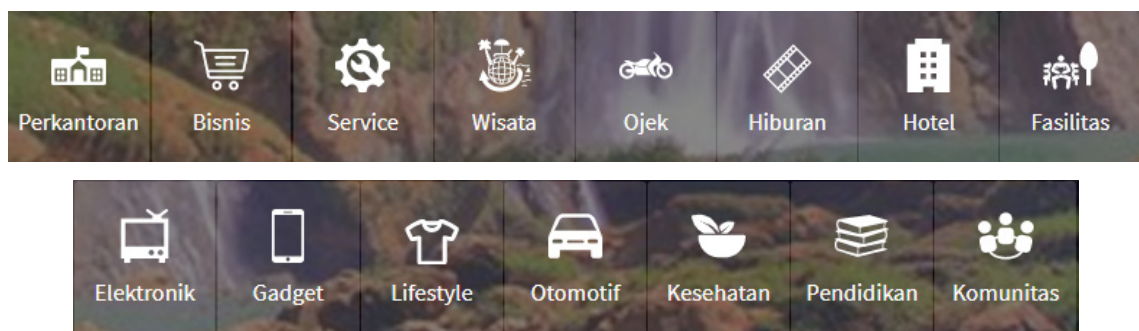
Gambar 4. E-Database berbasis Lokasi dan Peta

Pengembangan segala keperluan informasi dari *website* menjadi dasar utama dalam kemudahan mengakses, adanya review comment dari pengunjung *website* atau pengunjung pelaku usaha akan memudahkan pengguna melihat kinerja dari UKM bersangkutan baik pelayanan, kualitas barang serta lainnya. Pengelompokan kategori dibuat untuk memudahkan pencarian berdasarkan kategori, dimana kategori yang tersedia antara lain perkantoran, bisnis, servis, wisata dan lain-lain seperti Gambar 5.

Promosi daerah melalui *website* surade.co.id mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang berbagai informasi Kecamatan Surade. Berdasarkan persentase jumlah skor tanggapan responden sebanyak 76,67 persen, informasi wisata dan pelaku usaha di sekitarnya tergolong baik/tinggi dari kategori atau pengelompokan seluruh daftar per kelompok kategori. Tampilan

yang menarik dari sebuah *website* dapat mempengaruhi orang untuk sering membuka *website* tersebut. Untuk itu sebuah *website* harus dibuat semenarik mungkin sehingga orang tidak bosan mengunjungi *website* tersebut. Berdasarkan persentase jumlah skor tanggapan responden sebanyak 73,33 persen, tampilan yang menarik dan komunikatif tergolong baik/tinggi. Layanan publik interaktif juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pengunjung sebuah *website* selain tampilan yang menarik.

Pengunjung dapat memberikan saran, kritik, keluhan ataupun tanggapan terhadap suatu layanan publik interaktif, dimana dapat menumbuhkan demokrasi karena setiap orang boleh mengeluarkan pendapatnya, persentase tanggapan responden sebanyak 56,67 persen menjawab setuju. Setelah diuraikan gambaran tanggapan responden dari indikator tentang promosi daerah, tampilan menarik dan layanan publik



Gambar 5. Kategori Pengelompokan Jenis Usaha/Kegiatan

interaktif, selanjutnya dimasukan ke dalam aspek promosi berdasarkan persentase akumulasi jumlah skor jawaban responden yang diperoleh dari ketiga sub indikator di atas.

B. Analisis tingkat perkembangan daya saing dengan adanya *Smart Village* berbasis IT

Hasil wawancara terkait manfaat secara umum dari pengguna dan pemanfaat, dimana *E-Database* Perdesaan (Surade.co.id) berperan penting (86,67 persen) dalam mewujudkan *Smart Village*, baik dari penyediaan teknologi pendukung, aplikasi atau *software* pemetaan potensi desa maupun pemasaran hasil desa dengan menggunakan internet. Adapun manfaat *E-Database* Perdesaan (Kecamatan Surade) antara lain :

1. Meningkatkan informasi perdesaan. Dengan adanya *E-Database* online perdesaan (Kecamatan Surade) berarti menambah visibilitas daerah. Bisa diibaratkan Kecamatan Surade membuka *showroom* (ruang pamer) yang baru. Adanya *E-Database online* diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan data penduduk, pemetaan dan menyebarkan informasi desa serta potensi desa secara akurat, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.
2. Menyediakan informasi profil Kecamatan secara detail. Berbagai informasi secara detail dari Kecamatan, pemerintahan, pariwisata, kegiatan, bisnis, usaha-usaha, jasa serta fasilitas-fasilitas yang terdapat di Kecamatan tersebut.
3. Mengomunikasikan kegiatan, fasilitas, produk dan jasa secara mendetail. Dalam proses pemanfaatan kegiatan, fasilitas, produk dan jasa bagi masyarakat Desa maupun masyarakat luar yang akan ke daerah serta mudah memanfaatkan dan mencari informasi yang dibutuhkan, dari media *online* surade ini diharapkan akan dapat mempengaruhi keputusan

pengunjung dalam membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Komunikasi pemasaran akan dikatakan efektif ketika konsumen mengalami perubahan di tiga aspek, meliputi kognitif (perubahan keyakinan/kesadaran), afektif (perubahan sikap), dan konatif (perubahan perilaku). Jika dihubungkan dengan keputusan pengunjung maka komunikasi pemasaran melalui *website* berarti telah tergugahnya pengunjung oleh media komunikasi pemasaran (*website*) kemudian pengunjung mempunyai keinginan untuk membeli produk tersebut. Pesan dari komunikasi pemasaran dapat dikatakan efektif juga karena telah mencapai tahap akhir dari konsep AIDA (*attention, interest, desire, dan action*), yaitu *action* atau melakukan tindakan. Oleh karena itu terdapat keuntungan melakukan komunikasi pemasaran melalui *website* merupakan salah satu alternatif untuk memasarkan produk ataupun jasa sehingga dapat membentuk suatu keputusan pengunjung (Aufa, 2014).

Dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mempromosikan hasil karya-karya mereka (Supriadi et al., 2016)

4. Mengingatkan calon pengguna yang lupa. Dalam proses pemasaran khususnya UKM-UKM yang ada di Surade, dapat menerima informasi mengenai informasi yang mungkin didapat melalui presentasi, melihat brosur, *browsing* atau melihat iklan. Calon pelanggan mungkin kehilangan informasi tersebut dan saat membutuhkan produk atau jasa dia akan mencari di internet (*search engine*) dan melakukan pencarian dengan *keyword* nama di Surade.co.id.
5. Memudahkan pengguna menghubungi pelaku usaha di Surade. Seperti kasus sebelumnya, pengguna mungkin kehilangan kartu nama atau nomor telepon kegiatan, usaha atau UKM. Pengguna tentu mengingat nama yang akan dicari, kemudian melakukan

pencarian di surade.co.id, sehingga akan menemukan dan menghubungi kembali.

6. Meningkatkan kualitas layanan Kecamatan. Dalam *website* dengan mudah menambahkan informasi-informasi yang terkait dengan produk atau jasa suatu daerah. Daerah dapat menambahkan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan pengguna. Informasi ini dapat langsung dibaca pengguna atau sebagai pedoman bagi bagian support. Pelanggan dapat masuk ke *website* siang ataupun malam. Dengan adanya *website* kita mempunyai peluang meningkatkan kepuasan pengguna dan menilai kinerja daerah.
7. Meningkatkan kredibilitas dan menuju "Smart Village". Perdesaan atau Kecamatan yang memiliki *website* informasi *E-Database* akan terkesan maju dan modern. Dengan demikian maka kredibilitas daerah akan meningkat serta dapat meningkatkan daya saing daerah.

Penilaian terhadap manfaat, berdasarkan hasil responden yang ditunjukkan dengan nilai perbandingan indeks kinerja antar manfaat, secara dominan nilai manfaat yang ada menyatakan yang terbesar adalah meningkatkan informasi perdesaan sebanyak 85 persen, sedangkan manfaat sebagai alat komunikasi kegiatan, produk atau jasa secara detqil sebesar 82,5 persen demikian juga manfaat pengguna untuk menghubungi pelaku usaha dengan nilai yang sama. Manfaat untuk menjadikan desa menjadi *Smart Village* sebesar 80 persen, hal ini menunjukkan bahwa desa juga terdorong untuk menuju masyarakat yang melek IT agar memudahkan aktifitas ekonomi kewilayahan. Masyarakat umumnya meyakini bahwa kemudahan akses informasi melalui internet akan mampu memajukan perkembangan desa, khususnya pendidikan anak-anak, pengetahuan masyarakat dan kemampuan usaha ekonomi masyarakat (Subiakto, 2013). Adapun manfaat bagi pelaku usaha di kalangan masyarakat

desa antara lain: 1) menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa, 2) meningkatkan pemasaran melalui web agar jumlah pembeli, pengunjung dan pemesan menjadi meningkat, 3) memberikan nilai tambah dimana usaha kecil telah memiliki *website virtual* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Hasil kajian penilaian pengaruh adanya *website* terhadap pengaruh aktifitas perekonomian dilihat dari pengunjung yang menghubungi pelaku usaha karena mendapatkan informasi dari *website*. Adanya peningkatan walaupun masih termasuk kategori *website start up*, belum banyak yang mengetahui keberadaan *website* tersebut. Tetapi umumnya ada peningkatan sebesar 13,33 persen dari yang menghubungi pelaku usaha. Hal tersebut memberikan pengaruh yang baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan promosi bagi pengelola *website* Surade.co.id. Sejalan dengan hasil penelitian (Kurniawan & Mustafidah, 2016) adanya pengaruh yang signifikan dari perkembangan ekonomi warga dengan adanya pemanfaatan *website* sebagai media promosi yaitu dengan nilai koefisien 1,04. Selain peningkatan promosi yang lebih tinggi, perlu juga upaya kuat dari pemerintah agar implementasi teknologi informasi di perdesaan dapat berjalan dengan baik. Konsep pengelolaan dan pengembangan desa informasi perlu mempertimbangkan asumsi determinan sosial yang memiliki karakter *bottom-up* kemudian dilaksanakan secara konsisten.

C. Strukturisasi Arahan Kebijakan Penerapan E-Database Perdesaan

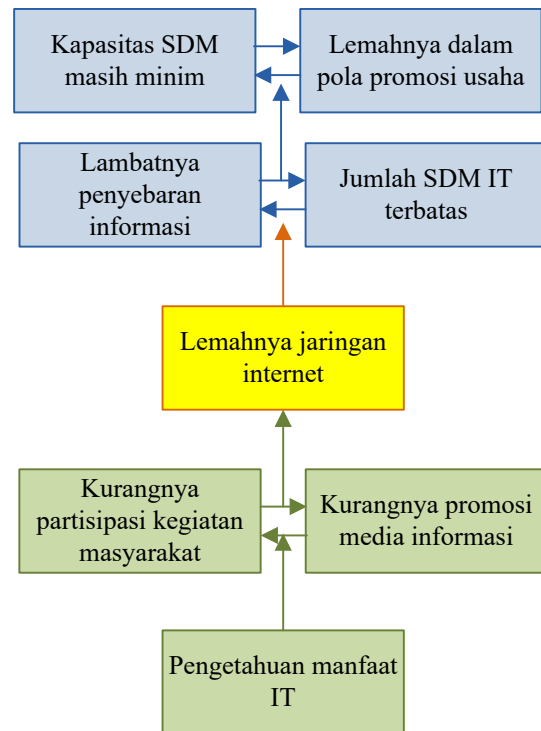
Arah kebijakan dalam optimalisasi sebuah *E-Database* Perdesaan menuju *smart village* perlu dilihat kendala implementasi, sehingga dapat dikembangkan strategi selanjutnya dalam pengembangan *E-Database* Perdesaan lainnya. Penerapan kendala dan strategi berasal dari *stakeholder* pakar. Beberapa kendala yang diperkirakan akan dihadapi dapat dilihat pada Tabel 1.

Permasalahan dan kendala yang ada dihadapi tersebut perlu dinilai oleh pakar agar dapat dilakukan prioritas kebijakan untuk mencapai tujuan optimalisasi dalam peningkatan daya saing. Dengan demikian diharapkan struktur permasalahan dan kendala tersebut dapat dijadikan sebagai dasar strategi pengembangan desa dengan *E-Database* menuju *Smart Village* berbasis IT.

Tabel 1. Kendala dalam Pengembangan dan Penerapan *E-Database*

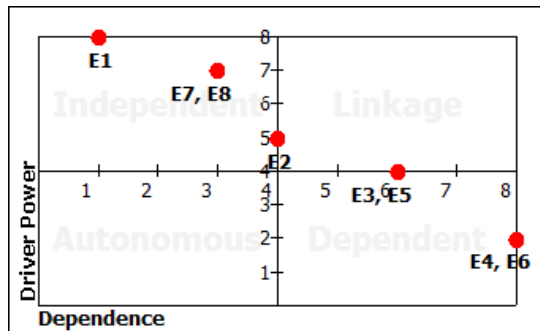
No	Elemen Kendala
1	Pengetahuan manfaat IT
2	Lemahnya Jaringan Internet
3	Lambatnya penyebaran informasi
4	Kapasitas SDM masih minim
5	Jumlah SDM IT terbatas
6	Lemahnya dalam pola promosi usaha
7	Kurangnya partisipasi kegiatan masyarakat
8	Kurangnya promosi di media informasi

Strukturisasi elemen kendala pada Gambar 6, menunjukkan bahwa faktor kendala terpenting utama adalah pengetahuan manfaat IT, beberapa manfaat IT untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan yaitu perlu adanya partisipasi dari masyarakat (Fitriyadi, 2013). Pengetahuan manfaat internet tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan karena masyarakat desa yang kurang pandai, melainkan karena tidak adanya pendidikan dan pengelolaan yang baik dari lembaga-lembaga pemerintah dan pihak terkait yang memang seharusnya memberikan pendidikan kepada masyarakat di daerah perdesaan, elemen selanjutnya adalah kurangnya partisipasi kegiatan masyarakat, dalam hal ini kegiatan masyarakat harus lebih ditingkatkan guna meminimalisasi kendala dalam pengembangan dan penerapan *e-database*, elemen berikutnya yaitu kurangnya promosi media informasi, dapat dilakukan dengan cara lebih gencar dalam pembuatan brosur dan *leaflet* (Aufa, 2014).



Gambar 6. Strukturisasi Elemen dalam Pengembangan Desa

Hal ini berarti bahwa berjalannya sistem sangat diperlukan adanya elemen tersebut untuk dapat mendorong semua kendala yang ada dalam pengembangan desa berbasis *Smart Village*. Pada struktur berikutnya adalah lemahnya jaringan internet, lemahnya jaringan internet dipengaruhi oleh kekuatan sinyal dari provider, semakin jauh tower BTS (*Base Transceiver Station*) tersebut dari lokasi maka kecepatan koneksi internetnya juga semakin buruk. *Tower share internet* atau tower BTS ini akan memudahkan akses internet yang bisa digunakan secara bersama-sama oleh warga perdesaan. Dewasa ini elemen tersebut secara umum merupakan kendala dalam mendorong berjalannya sistem dalam pengembangan desa berbasis *Smart Village*. Oleh karena itu, kedua kelompok faktor ini perlu diperhatikan. Pembagian ordinasi keseluruhan faktor-faktor yang terbagi pada kuadran *independent*, *lingkage*, dan *dependent* disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Matriks Driver Power-Dependence (DP-D) untuk Elemen Kendala

Berdasarkan gambar 7, menunjukkan bahwa faktor kendala yang berada pada sektor *independent* memiliki daya dorong paling tinggi untuk mendorong kendala lain dalam pengembangan desa. Faktor yang berada pada sektor *linkage* dan *dependent* dipengaruhi oleh faktor yang berada pada sektor *independent*, artinya dengan daya gerak yang besar dan ketergantungan terhadap sistem rendah, keterlibatan elemen pada sektor *independent* akan mendorong keterlibatan elemen lain dalam sistem pengembangan desa *Smart Village* berbasis IT.

Pengetahuan manfaat IT menjadi penting untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan *E-Database* Perdesaan, sehingga program-program sosialisasi menjadi dasar agar masyarakat mau memanfaatkan teknologi informasi berbasis *online*.

D. Strategi Kebijakan untuk Meningkatkan Pengembangan Desa Berbasis *Smart Village*

Strategi kebijakan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengembangan desa menuju *Smart Village* berbasis IT adalah dengan menerapkan elemen terpilih sesuai tahapan perencanaan berdasarkan kendala prioritas. Model pembangunan terpadu inovatif merupakan siklus pembangunan yang dimulai dari proses identifikasi potensi sumberdaya dan kemudian menentukan arah pembangunan yang melibatkan segenap unsur desa (Suharyanto & Sofianto, 2012). Adapun strategi kebijakan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Strategi kebijakan Pengembangan Desa Berbasis *Smart Village*

Ele-men	Strategi Kebijakan
1	Melakukan penyuluhan dan sosialisasi langsung ataupun tidak langsung • Perlunya penyuluhan ke pelaku usaha serta semua kegiatan • Sosialisasi melalui media masa, pamflet, spanduk dan brosur
7	Ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat sebagai sponsor media promosi • Mendukung menjadi sponsor dalam semua kegiatan di berbagai kalangan • Menjadi rekanan tetap dengan Pemerintah dalam setiap kegiatan atau <i>event</i> Pemerintah
8	Merangkul pelaku usaha secara langsung <i>door to door</i> • Pembentukan tim yang mendatangi seluruh kegiatan atau usaha di Surade • Memberikan <i>merchandise</i> perorangan untuk lebih mengenal Surade.co.id
2	Percepatan dan kerjasama instansi atau kelompok usaha • Kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah dan kantor desa untuk percepatan pemanfaatan <i>E-database</i> • Kerjasama per kelompok usaha, kegiatan dan komunitas • Optimalisasi pelajar berbasis IT untuk memanfaatkan Surade.co.id

Strategi kebijakan pertama yaitu melakukan penyuluhan serta sosialisasi langsung ataupun tidak langsung, dalam hal ini perlunya penyuluhan ke pelaku usaha atau kegiatan agar memberikan informasi tentang *e-database* Surade. Selain itu juga meningkatkan pemasaran produk-produk di Kecamatan Surade tersebut. Strategi kebijakan kedua yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat sebagai sponsor media promosi. Dalam hal ini mendukung menjadi sponsor dalam semua kegiatan di berbagai kalangan dan menjadi rekanan tetap dengan pemerintah dalam setiap kegiatan atau acara. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah dapat meningkatkan promosi yang lebih tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah.

Strategi selanjutnya yaitu merangkul pelaku usaha secara *door to door* berupa pembentukan tim yang mendatangi seluruh kegiatan atau usaha di Surade dan memberikan *merchandise* perorangan untuk lebih mengenal *surade.co.id*. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat dan ketertarikan terhadap *e-database* tersebut. Strategi terakhir yaitu percepatan dan kerjasama instansi pemerintah serta kantor desa untuk percepatan pemanfaatan *e-database* berupa kerjasama per kelompok usaha kegiatan dan komunitas serta optimalisasi pelajar berbasis IT untuk memanfaatkan *surade.co.id*.

IV. KESIMPULAN

Pengembangan *E-Database* *Surade.co.id* menjadi penting dalam pembangunan dan percepatan pembangunan desa menuju *Smart Village* sebagai konsep yang dimunculkan dalam penelitian ini untuk dapat menyamakan percepatan seperti *Smart City* serta mendukung pembangunan dari pinggiran atau desa. Konsep *E-Database* harus sederhana dan komunikatif dengan mesin pencarian yang baik serta berbasis peta *by name by address*.

Konsep *E-Database* sangat berperan penting sebesar 86,67 persen untuk mendukung *Smart Village*. Adanya peningkatan pemanfaatan *website* oleh pengguna untuk mencari UKM atau usaha yang ada di *Surade* dimana peningkatan tersebut sebesar 13,33 persen di semester pertama hasil penelitian. Arah kebijakan dalam optimalisasi *E-Database* diarahkan pada melakukan penyuluhan dan sosialisasi, berpartisipasi sebagai sponsor dalam semua kegiatan di *Surade*, merangkul usaha *door to door*, serta peningkatan kerjasama instansi atau kelompok.

Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya sosialisasi agar *smart village* berbasis IT dapat dengan mudah dipergunakan masyarakat di perdesaan khususnya Kecamatan *Surade*, peningkatan

kerjasama promosi dalam semua kegiatan dan sektor agar terjadi peningkatan daya saing perdesaan, serta perlunya media promosi untuk strategi pada skala lokal perdesaan maupun di luar kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aufa, J. (2014). *Efektivitas Website Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru Ciampea Bogor Jawa Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Fitriyadi, H. (2013). Integrasi Teknologi Informasi Komunikasi dalam Pendidikan : Potensi Manfaat, Masyarakat Berbasis Pengetahuan, Pendidikan Nilai, Strategi Implementasi dan Pengembangan Profesional. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Volume 21 Nomor 3, 269-284.
- Kurniawan, & Mustafidah. (2016). Analisis Dampak Pemanfaatan Website Desa dalam Perkembangan Ekonomi Warga Kecamatan Kalibangor. *Jurnal Informatika (JUITA)* Vol.IV Nomor 1, 48-57.
- Oriesadewita. (2013). Peran Website Untuk Komunikasi Pemasaran Produk Fashion (Studi Kasus Butik Online PT. Female Store). *Jurnal Marketing Communication*.
- Riyadi, A., Retnandi, E., & Deddy, A. (2012). Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website Subsistem Guru di Sekolah Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango. *Jurnal Algoritma* Vol 9 No 40.
- Riyanto, A. (2015). Pembuatan Website Sebagai Media Promosi yang Terpercaya. *Prosiding Seminar Nasional Informatika* (pp. 28-35). Yogyakarta: UPN Veteran.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet Press.

- Saxena, Sushil, J., & Vrat, P. (1992). *Scenario Buliding: A Critical Study of Energy Conservation in The Indian Cement Industry*. Technological Forecasting and Social Change, 121-146.
- Sofiyudin, A., Nugroho, R.A. (2017). Implementasi Cyber Village dalam Mewujudkan Masyarakat Melek Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Internet di Daerah Pegunungan (Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah). *Jurnal Wacana Publik*. Vol 1 No. 3, 1-15.
- Subiakto, H. (2013). Internet untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya bagi Masyarakat. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. 26, No 4, 243-256.
- Suharyanto, & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*. Vol 4 No 4, 251-260.
- Supriadi, A., Fadli, M.N., Malik, K. (2016). *Membangun Sistem Smart Village Untuk Menciptakan Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri di Desa Alstengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Berbasis Android*. SENTIA-Politeknik Negeri Malang. Vol 8, A 65-68.

PENDEKATAN ASET PENGHIDUPAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BEJI

SUSTAINABLE LIVELIHOODS APPROACH FOR RURAL DEVELOPMENT IN BEJI VILLAGE

Eka Prasetya Riauningrum dan Sofyan Cholid

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, Gedung Nusantara II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp. 081213473470
Email: ep.riauningrum99@gmail.com, sofyan.cholid@gmail.com

Abstrak

Perdesaan menjadi tempat bagi sebagian besar penduduk miskin di Indonesia. Berbagai program diberikan pemerintah untuk mendorong pembangunan di perdesaan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Hasil pelaksanaan pembangunan di perdesaan belum mampu meningkatkan kehidupan/kebutuhan masyarakat karena pembangunan yang dilakukan belum memperhatikan sumber daya penghidupan yang dimiliki. Sedangkan sumber daya penghidupan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan desa agar hasil pembangunan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sumber daya penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat petani ikan di Desa Beji agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan sampel purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya penghidupan berupa aset fisik, dan finansial yang dimiliki masyarakat petani ikan masih rendah dalam hal penguasaan peralatan produksi, posisi tawar petani, dan permodalan. Sedangkan, sumber daya penghidupan berupa aset manusia, alam dan sosial sudah baik tetapi perlu ditingkatkan dalam hal: (1) penguasaan teknologi budidaya dan pengolahan hasil (2) pengelolaan lingkungan dan (3) pengembangan jejaring usaha.

Abstract

Rural areas make up the largest number of poverty in Indonesia. Various programs are given by the government to encourage rural development in order to increase public welfare. Unfortunately, the implementation of rural development has not been able to improve the quality of life the community. It is because the undertaken development has not focus on the livelihoods that owned by the community. Whereas, the source of livelihood is essential for the implementation of rural development in order to achieve goals and improve welfare. This paper aims to analyze and describe the livelihood assets that owned by fishermen community in Beji Village to be used as a reference in the implementation of rural development. This research uses a qualitative approach and purposive sampling. The results showed that the livelihood assets owned by fishermen such as physical and financial capital were low in terms of production tools expertise, bargaining position and financial. Whereas the livelihood assets like human, natural and social capital were good, but need to be improved in terms of: 1) cultivation and processing technology expertise; 2) environmental management; and 3) business network development

Kata Kunci:

sumber daya
penghidupan,
pemberdayaan
masyarakat, petani
ikan, Desa Beji,
pembangunan desa

Keywords:

livelihood asset,
community
empowerment,
fishermen, Beji's
village development

I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik tolak perubahan paradigma

pembangunan desa. Paradigma lama pembangunan desa bersifat *state centric* artinya pembangunan dilaksanakan secara otokratis, *top down*, sentralistik, hirarkis,

sektoral dan seterusnya. Sedangkan paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipatif, emansipatoris, dan seterusnya (Eko, *et.al.* dalam Kurniawan, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pembangunan desa membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa bahwa pembangunan desa bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, jumlah penduduk miskin perdesaan lebih besar dari perkotaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) menunjukkan bahwa penduduk miskin perdesaan Indonesia mencapai 13,96 persen sedangkan penduduk miskin perkotaan berjumlah 7,73 persen dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan yang masih terpusat di wilayah perkotaan.

Sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Desa, Pemerintah Pusat menggulirkan program dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan di desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa untuk mampu melakukan penyesuaian pembangunan desanya dengan paradigma yang baru. Seperti pembangunan di Desa Beji, saat ini sumber dana pembangunan masih didominasi untuk pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa masih sangat terbatas, terutama bagi mayoritas petani ikan yang ada di Desa Beji.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanahkan bahwa pembangunan desa menerapkan dua pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan desa membangun dan pendekatan membangun desa. Menurut Najiyati (2017), pendekatan desa membangun dilakukan dalam lingkup wilayah desa dengan batas wilayah administrasi sedangkan pendekatan membangun desa dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan dengan batas wilayah fungsional.

Pendekatan desa membangun membutuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam pembangunan desa, yaitu pembangunan berpusat pada manusia. Dalam pembangunan desa, pembangunan berpusat pada manusia memiliki makna bahwa dalam seluruh proses pembangunan harus melibatkan masyarakat, masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berpusat pada manusia, maka Pemerintah Desa perlu melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan pemberdayaan, Pemerintah Desa perlu memperhatikan sumber daya penghidupan yang dimiliki masyarakat. Wijayanti, dkk (2015) dijelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa adalah meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap menjadi lebih kritis, lebih mandiri, serta meningkatkan keterampilan untuk mengelola potensi yang dimilikinya agar lebih berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perlu dilakukan intervensi terhadap pengelolaan sumber daya penghidupan yang belum optimal sebagai bagian dari proses pembangunan desa. Hasil penelitian (Haan, 2012) menjelaskan bahwa pendekatan sumber daya penghidupan berperan penting dalam pembangunan. Haan menunjukkan bahwa dukungan sumber daya penghidupan dapat berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan beberapa masyarakat dan aparat pemerintah Desa Beji, saat ini pemerintah desa belum melakukan pemberdayaan bagi petani ikan yang ada di wilayahnya. Hal ini karena petani ikan dianggap telah cukup memperoleh pembinaan dan pelatihan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta bantuan sosial dari Bank Indonesia Kantor Wilayah Purwokerto. Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pihak tersebut kurang mampu membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Petani ikan masih menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini karena pemberdayaan yang dilakukan tidak didasarkan atas sumber penghidupan yang dimiliki masyarakat.

Permasalahan yang terjadi diantaranya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, keterbatasan kepemilikan lahan, rendahnya modal usaha tani, lemahnya posisi tawar petani dan sebagainya. Munculnya berbagai permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat mengancam usaha perikanan air tawar yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Beji. Permasalahan tersebut dapat memicu terjadinya diversifikasi usaha non-pertanian bahkan saat ini usaha perikanan air tawar menjadi kurang diminati oleh generasi muda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Bahal, 2014) bahwa diversifikasi terjadi karena adanya keterbatasan lahan dan tingginya biaya produksi mendorong petani melakukan diversifikasi usaha. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Olsson, 2006) bahwa terjadinya kerentanan pada sumber daya alam dapat memicu petani beralih melakukan diversifikasi usaha non-pertanian.

Desa Beji sebagai desa yang terkenal dengan usaha perikanan air tawar harus dapat mempertahankan dan mengembangkan mata pencaharian utama masyarakatnya. Kemampuan dalam berusaha tani yang dimiliki petani ikan masih sebatas pada pembudidayaan ikan air

tawar secara tradisional. Pengalaman dalam membudidayakan ikan diperoleh secara turun temurun dari generasi sebelumnya dan hasil belajar sendiri (autodidak). Selain itu, petani juga memperoleh pembinaan budidaya perikanan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Pembinaan yang telah diperoleh terkait Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik (CPIB). Namun, CPIB tersebut belum banyak diterapkan oleh petani ikan di Desa Beji karena terkendala permasalahan seperti biaya serta kemampuan dan kemauan petaninya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan usaha perikanan perlu memperhatikan modal yang dimiliki petani ikan dan kemudahan penerapannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kamala Gurung, 2016) menyebutkan bahwa perubahan pola usaha tani menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan petani sehingga perlu adanya penguatan akses teknologi dan kredit agar ketimpangan pendapatan dapat dikurangi.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis sumber daya penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat petani ikan di Desa Beji. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Beji dalam melaksanakan pembangunan, terutama pemberdayaan masyarakatnya sehingga program-program yang direncanakan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Ellis, 2000) sumber daya penghidupan terdiri dari aset (alam, fisik, manusia, keuangan dan sosial), aktivitas, dan akses yang bersama-sama menentukan kehidupan individu atau rumah tangga. Sedangkan (Messer & Townsley, 2003) menyebutkan bahwa penghidupan pada dasarnya merupakan sarana yang digunakan rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan dan mempertahankannya.

Dalam penelitian ini, sumber daya penghidupan yang dimiliki dan dimanfaatkan masyarakat petani ikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dijabarkan atas

aset alam, aset manusia, modal sosial, aset fisik dan aset finansial. Dari pemanfaatan kelima aset tersebut, dirumuskan kebutuhan intervensi oleh Pemerintah Desa dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan petani ikan adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dari usaha budidaya perikanan air tawar.

II. METODE

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis sumber daya kehidupan, penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh (Creswell, 2016) sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian adalah fenomenologi/ deskriptif. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan sumber daya kehidupan petani ikan di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan analisis dokumen (data sekunder). Observasi dilakukan ketika peneliti langsung turun ke lapangan mengamati perilaku dan aktivitas petani ikan di lokasi penelitian. Sedangkan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan peneliti melalui wawancara secara berhadapan (*face-to-face interview*) dengan informan. Informan terdiri dari aparat pemerintah desa, petani, dan pedagang pengumpul yang dipilih menggunakan teknik *non-probability sampling* jenis *purposive/ judgemental sampling*. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 13 orang terbagi menjadi 2 orang dari pihak aparat Pemerintah Desa Beji, 9 orang petani ikan, seorang tokoh masyarakat dan 2 orang PNS Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Wawancara dengan informan

dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara komprehensif. Wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dan semi terstruktur, dan mendokumentasikannya dalam bentuk rekaman dan catatan lapang. Data sekunder dalam penelitian kualitatif ini berupa dokumen dari pemerintahan desa dan dokumen dari kelompok tani pembudidaya ikan (pokdakan).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa naratif. Dalam hal ini, data yang diperoleh akan diolah melalui tahapan berikut (Neuman, 2013): (1) Pengorganisasian data, (2) Pengolahan data, (3) Interpretasi dan elaborasi data, dan (4) pengambilan kesimpulan. Analisis dijabarkan dalam lima sumber daya kehidupan yaitu aset manusia, alam, fisik, finansial, dan sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat petani ikan di Desa Beji terbagi menjadi dua golongan, yaitu petani dan buruh tani. Penggolongan tersebut berdasarkan pada skala usaha budidaya ikan yang dilakukannya. Berdasarkan data pada Profil Desa Beji (2016) menyebutkan bahwa jumlah petani di Desa Beji sebanyak 2.432 orang dan buruh tani sebanyak 362 orang. Berikut deskripsi sumber daya kehidupan masyarakat petani ikan yang dijabarkan dalam aset manusia, alam, fisik, finansial, dan sosial.

A. Aset Manusia

Aset manusia menunjukkan kemampuan seseorang untuk memperoleh akses dan kesempatan yang lebih baik lagi dalam mengelola kehidupan mereka (Messer & Townsley, 2003), aset manusia berkaitan dengan kesehatan dan kemampuan masyarakat untuk bekerja, pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan selama beberapa generasi berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Penguasaan terhadap aset ini akan membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya dalam

menggunakan aset-aset yang ada lebih baik lagi dan menciptakan peluang baru.

Dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat Desa Beji memiliki kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah karena didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan tingkat rendah. Berdasarkan data pada Profil Desa Beji Tahun 2016 diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Beji hanya mampu menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Dasar sebanyak 2.889 orang, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah sebanyak 27 orang dan tidak mampu menamatkan Sekolah Dasar sebanyak 1.658 orang. Sedangkan sebagian masyarakat ada yang mampu melanjutkan pendidikan SLTP sebanyak 1.606 orang, SLTA sebanyak 1.394 orang bahkan ada yang mampu hingga perguruan tinggi, hanya saja masih sangat sedikit jumlahnya (335 orang) dibanding total masyarakat petani ikan di Desa Beji.

Masyarakat petani ikan di Desa Beji telah memiliki keahlian dalam budidaya pembenihan ikan gurami. Keahlian dalam melakukan usaha budidaya ikan gurami sudah tidak diragukan lagi. Keterampilan mereka dalam budidaya pembenihan ikan gurami merupakan warisan dari nenek moyang. Pelatihan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dan pengalaman cara pemijahan ikan gurami ini dari generasi ke generasi terus dipelihara sehingga budidaya pembenihan ikan gurami menjadi sumber penghidupan mayoritas penduduk di Desa Beji. Saat ini, Desa Beji terkenal sebagai satu-satunya di Kabupaten Banyumas yang menjadi pusat pembenihan ikan gurami.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Beji, Pemerintah Desa Beji telah memberikan dukungan berupa pelatihan baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Kebanyakan pelatihan diberikan secara tidak langsung, dalam arti pelatihan tersebut bukan diinisiasi oleh Pemerintah Desa melainkan program bantuan dari

pihak luar. Sebagai contoh, pelatihan terkait penanganan penyakit pada ikan gurami indukan dan pembuatan sertifikat Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik (CPIB) oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, bantuan modal usaha dan pendampingan usaha budidaya pembesaran ikan sidat oleh Bank Indonesia Kantor Wilayah Purwokerto dan bantuan kesehatan oleh BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto. Sedangkan pelatihan yang pendanaannya secara langsung oleh Pemerintahan Desa belum dilakukan karena saat ini pembangunan desa masih diarahkan untuk pembangunan fisik.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat petani ikan dalam memproduksi telur ikan gurami juga telah dilakukan pelatihan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Tujuan pelatihan tersebut untuk membantu masyarakat dalam proses pembenihan ikan agar lebih efektif, efisien, mengurangi resiko kegagalan, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Sebagai contoh, ketika ikan gurami terkena penyakit maka petani sama sekali tidak boleh menggunakan obat-obatan kimia. Dengan demikian, kualitas telur ikan gurami yang dihasilkan lebih baik sehingga kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli dengan petani ikan semakin meningkat.

Penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam berbudidaya pembenihan ikan gurami sudah sangat baik. Namun, teknologi yang dilakukan masih secara sederhana dan tradisional. Teknologi yang digunakan dalam budidaya pembenihan ikan gurami lebih banyak diperoleh dari hasil belajar sendiri (autodidak) melalui pengamatan-pengamatan selama menjalankan usaha. Sementara globalisasi berkembang sangat pesat, tantangan kemajuan teknologi dalam bidang perikanan semakin tinggi dan begitu juga tuntutan konsumen akan produk perikanan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, petani ikan di Desa Beji perlu ditingkatkan kapasitas

manusianya terutama dalam penerapan teknologi tepat guna sehingga mampu menghadapi perubahan yang terjadi.

Penggunaan teknologi tepat guna dalam pembenihan ikan gurami, terutama teknologi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pada saat pemeliharaan, seperti ketika menghadapi penyakit ikan, perubahan cuaca dan pemanenan. Teknologi tersebut ditujukan agar ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga kuantitas dan kualitas telur dapat ditingkatkan. Penggunaan teknologi tepat guna perlu memperhatikan kemudahan perolehan alat yang digunakan, kemudahan cara penerapan teknologi, dan kemanfaatan teknologi dalam mengatasi masalah. Selain itu, terkait penanganan pasca panen, masyarakat petani ikan masih menerapkan pengemasan dan pengepakan telur-telur ikan secara sederhana. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan teknologi yang dapat membuat telur ikan lebih tahan lama selama dalam perjalanan sehingga resiko kematian telur dapat berkurang dan jangkauan pengiriman telur ikan dapat lebih luas lagi. Selama ini, masyarakat petani ikan masih belum mampu memenuhi permintaan pasar dari lokasi-lokasi yang jauh karena terkendala keterbatasan daya hidup ikan selama perjalanan (tabel 1).

Tabel 1. Kondisi Aset Manusia dan Kebutuhan Pemberdayaan di Desa Beji Tahun 2017

No	Kondisi Aset	Kebutuhan
1	Pengetahuan dan keterampilan budidaya gurami sudah sangat baik.	1. Introduksi teknologi tepat guna terkait dengan teknik budidaya
2	Teknologi budidaya ikan gurami masih sederhana.	2. Pelatihan penanganan pasca panen
3	Keterampilan pasca panen dan pemasaran terbatas.	3. Pelatihan kewirausahaan
		4. Fasilitasi pemasaran

Sumber: Olahan penelitian

B. Aset Alam

Bagi orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan, aset alam seperti tanah, air dan lingkungan sangat penting bagi kelangsungan produksi dan pendapatan mereka. Masyarakat Desa Beji sangat tergantung pada aset sumber daya alam yang tersedia. Berdasarkan data potensi desa, Desa Beji memiliki luas wilayah sekitar 2.158,175 Ha, 60 persen. Diantaranya dimanfaatkan untuk usaha pertanian baik padi sawah maupun kolam pembenihan.

Desa Beji merupakan desa yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Sebagian besar tanahnya sangat subur dengan topografi datar-berombak sehingga sangat cocok untuk usaha pertanian terutama untuk budidaya ikan gurami. Selain itu, ketersediaan air yang begitu melimpah di Desa Beji sangat mendukung petani untuk usaha budidaya perikanan air tawar. Tingginya curah hujan yang mencapai 125 mm/tahun membuat Desa Beji jarang mengalami kekeringan di musim kemarau sehingga usaha pertanian di lahan sawah maupun kolam tetap bisa berjalan sepanjang tahun. Letak Desa Beji yang berada di bawah kaki Gunung Slamet membuat Desa Beji memiliki cuaca yang sejuk hingga dingin. Suhu maksimum mencapai 30°C dan suhu minimum mencapai 27°C. Dukungan kondisi iklim tersebut cocok untuk budidaya pembenihan ikan gurami.

Daya dukung alam terhadap pengembangan usaha pertanian dan perikanan di Desa Beji sudah sangat memadai. Hanya saja potensi alam yang tersedia belum dikelola secara baik untuk mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Sebagai contoh, makin tingginya perubahan fungsi lahan sebagai daerah permukiman yang baru, usaha-usaha di luar perikanan dan juga adanya pencemaran lingkungan yang mengancam keberlangsungan budidaya ikan gurami. Perubahan fungsi lahan untuk permukiman antara lain karena adanya dorongan harga jual tanah yang semakin meningkat. Hasil penjualan tanah umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersier mereka seperti membeli mobil dan membangun rumah dibanding memanfaatkan lahan untuk

usaha sendiri. Tanah dijual kepada orang luar desa (para pengusaha) yang ingin melakukan investasi di Desa Beji. Sebagai contoh ada yang membeli tanah untuk ditanam tanaman tahunan dan ada yang berencana untuk membangun rumah makan.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Beji terkait dengan pencemaran air dan tanah. Padahal air tersebut digunakan masyarakat untuk mengairi kolam ikan gurami dan tanah sebagai media tumbuh kembang ikan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan membuat air sungai menjadi keruh dan kotor. Makin tingginya perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga ke sungai membuat kualitas air untuk budidaya ikan menurun. Padahal air merupakan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup ikan gurami. Selain sampah rumah tangga, penurunan kualitas air di Desa Beji juga disebabkan oleh tingginya penggunaan pestisida kimiawi dalam bercocok tanam padi dan adanya pembangunan proyek-proyek yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan pestisida kimiawi biasanya digunakan petani untuk memberantas hama tikus dan wereng. Padahal aliran air sungai yang digunakan untuk mengairi sawah juga digunakan untuk mengairi kolam ikan sehingga air kolam menjadi tercemar. Selain mencemari air, pestisida kimiawi juga membuat kualitas kesuburan tanah semakin menurun. Tanah yang banyak mengandung pestisida kimiawi semakin miskin unsur hara sehingga kurang baik bagi pertumbuhan tanaman atau ikan. Sedangkan proyek pembangunan di bagian hulu membuat air sungai yang mengairi kolam menjadi keruh sehingga tidak memadai untuk pemeliharaan ikan gurami.

Sebenarnya Desa Beji telah dikaruniai potensi alam yang begitu baik, tanah yang subur, kondisi iklim yang sesuai dan air yang melimpah. Akan tetapi, pengelolaan aset alam yang kurang baik dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dapat mendatangkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penguasaan petani ikan akan aset tersebut, seperti ancaman banjir, gagal panen dan alih fungsi lahan non-

pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Desa bersama masyarakatnya perlu mengelola potensi alam yang dimiliki lebih baik lagi terutama dalam melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan agar permasalahan tersebut tidak mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat petani ikan di Desa Beji.

Untuk mendukung keberlanjutan usaha perikanan air tawar di Desa Beji, maka Pemerintah Desa Beji perlu membangun kesadaran masyarakatnya melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait kebersihan lingkungan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian. Kebersihan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang mulai mengganggu usaha perikanan. Salah satu pemanfaatan sampah rumah tangga organik dapat dijadikan bahan pembuatan pupuk organik. Sedangkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian perlu ditingkatkan karena kasus alih fungsi lahan yang sudah semakin banyak. Apabila hal ini tidak dilakukan maka keberlangsungan mata pencaharian utama masyarakat Desa Beji bisa terancam. (Tabel 2).

Tabel 2. Kondisi Aset Alam dan Kebutuhan Pemberdayaan di Desa Beji Tahun 2017

No	Kondisi Aset	Kebutuhan
1.	Pengetahuan dan keterampilan budidaya gurami sudah sangat baik.	1. Sosialisasi penggunaan lahan dan kebersihan lingkungan. 2. Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. 3. Pelatihan pembuatan bahan pertanian organik (pupuk dan pestisida).
	Luas lahan pertanian 60 persen dari luas wilayah.	
2.	Keberlimpahan air sepanjang tahun.	
3.	Kondisi iklim yang sejuk hingga dingin.	
4.	Tingginya pencemaran air dari sampah rumah tangga dan penggunaan pestisida	
5.	Terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan dan kegiatan non-pertanian	

Sumber: Olahan penelitian

C. Aset sosial

Kekerabatan yang erat antar masyarakat dan ikatan/penerapan norma yang kuat merupakan karakteristik dari masyarakat pedesaan. Keeratan hubungan yang terjalin antar masyarakat merupakan aset sosial bagi desa untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahra, 2003) bahwa di Indonesia aset sosial dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk pengentasan kemiskinan. Menurut Toonies (1887) dalam (Kenny, 2007), masyarakat di pedesaan memiliki tipologi *gemeinschaft* dengan ciri masyarakat bersatu oleh kekerabatan dan ikatan bersama. Bentuk solidaritas tersebut menurut Durkheim (1960) dalam (Kenny, 2007) merupakan bentuk solidaritas mekanis, dimana hubungan sosial yang terjadi sangat mendalam dan bersifat personal yang berdasar pada nilai dan kepercayaan bersama. Solidaritas yang terjalin di masyarakat bisa kuat maupun lemah tergantung pada partisipasi masyarakat dalam hal ini masyarakat yang tidak mau aktif dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat maka solidaritas sosialnya lemah, sedangkan masyarakat yang mampu berpartisipasi aktif maka solidaritas sosialnya kuat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Beji memiliki hubungan kekerabatan yang mendalam antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Keeratan hubungan tersebut didasarkan pada pengaruh penerapan norma agama yang kuat di masyarakat. Misalnya, mereka saling bertemu dan berkumpul pada saat pengajian, *rembug* Pokdakan, arisan, *kumpulan* PKK, Musyawarah Desa (Musdes).

Tipologi masyarakat Desa Beji seperti desa pada umumnya memiliki hubungan kekerabatan yang terjalin erat antar masyarakat. Ikatan persaudaraan dan norma agama paling mendominasi hubungan yang tumbuh di masyarakat. Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari terlihat pada kesibukan mereka mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Misalnya, pengajian bagi para wanita yang diselenggarakan setiap hari mulai dari

pengajian hari senin (*senenan*), pengajian hari selasa (*selasaan*), pengajian hari rabu (*reboan*), pengajian hari kamis (*kemisan*) dan pengajian hari jumat (*jumatan*). Tetapi pengajian hari rabu sekarang sedang kosong karena yang biasa mengisi pengajian telah meninggal dunia. Sedangkan hari sabtu, mereka biasanya disibukkan dengan kegiatan pengurus Fatayat NU. Untuk bapak-bapaknya pengajian yang dilakukan berupa pengajian *khataman*, yaitu membaca kitab suci Al-Qur'an mulai dari juz 1 sampai juz 30 yang dilakukan dari pagi hingga sore menjelang maghrib. Pengajian khataman ini dilakukan setiap sebulan sekali di rumah warga secara bergantian.

Dalam hal sisi ekonomi, aset sosial masyarakat dapat dilihat dari cara mereka mengorganisasi kelompok tani. Hingga tahun 2016, Desa Beji memiliki kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) sekitar 12 kelompok tani, yaitu Pokdakan Setya Maju, Pokdakan Giat Makaryo, Pokdakan Purwa Mina Sejati, Pokdakan UPR Pamuji Inggil, Pokdakan Lebak Makmur, Pokdakan Mina Sejati, Pokdakan Mina Lestari, Pokdakan Mina Mandiri, Pokdakan Blumbangu, Pokdakan Mina Sandingsari, Pokdakan Mina Maju Bersama, dan Pokdakan Mina Mandiri 2. Jumlah anggotanya bervariasi, ada yang banyak, ada yang sedikit.

Aset sosial yang dimiliki kelompok dapat dilihat dari hubungan diantara sesama anggota kelompok dan hubungan kelompok dengan pihak lain. Aset sosial dapat berbentuk *bonding* atau *bridging*. Pretty (2003), Woodhouse (2006), Woolcock dan Narayan (2000) dalam (McShane, 2016) menjelaskan bahwa secara umum, *bonding* mengacu pada hubungan yang terbentuk dalam suatu kelompok dan tingkat kepercayaan yang ada dalam hubungan ini. Misalnya, ikatan mengacu pada kualitas dan kuantitas hubungan seseorang individu dengan keluarga, teman, tetangga dan lainnya dengan minat yang sama. Sedangkan *bridging* mengacu hubungan sosial dibentuk dengan orang-orang di luar kelompok, seperti yang dibentuk kelompok masyarakat atau

organisasi dari berbagai daerah. Menurut definisi ini ada dua bentuk *bridging*, yaitu horizontal dan vertikal. *Horizontal bridging* menggambarkan kepercayaan, jaringan atau hubungan yang dibentuk dengan orang di luar kelompok, seperti dengan organisasi di daerah yang berbeda atau pasar Ahuja (2000) dalam (McShane, 2016). Sedangkan *vertical bridging* mengacu pada kepercayaan, jaringan atau hubungan yang dibentuk dengan kelompok luar pada berbagai tingkat status dan kekuasaan, seperti pemerintah atau industri (Pretty, 2003; Szreter dan Woolcock, 2004 dalam McShane, 2016).

Huber (2009) dalam (McShane, 2016) mendefinisikan kapital sosial sebagai sumber daya tertanam dalam jaringan sosial yang dapat berpotensi diakses atau benar-benar digunakan oleh individu untuk tindakan. Pokdakan UPR Pamuji Inggil sebagai salah satu pokdakan di Desa Beji yang meraih juara II lomba tingkat nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki ikatan sosial yang terjalin antara sesama anggota kelompoknya (*bonding*) yang cukup bagus. Anggota kelompok aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada dikelompoknya. Hal ini terlihat keaktifan anggota ketika akan ada kunjungan tamu yang melakukan studi banding dari luar. Apabila akan ada kunjungan studi banding, pengurus kelompok akan mengadakan pertemuan/*rembug* untuk mendiskusikan mengenai pembagian tugas masing-masing anggota mulai dari penyiapan materi kunjungan, persiapan tempat kunjungan hingga konsumsi. Setiap anggota akan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Penguatan ikatan sosial sesama anggota kelompok dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya. Dalam pertemuan tersebut, biasanya petani saling bertukar informasi dan pengalaman seputar usahanya.

Untuk ikatan sosial yang terjalin antar anggota dari kelompok lain (*vertical bridging*) atau dengan pihak terkait lainnya (*horizontal bridging*) belum terlalu kuat. Hal ini terlihat dari hubungan antara anggota Pokdakan UPR Pamuji Inggil dengan Pokdakan lainnya.

Antar pokdakan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama (pembenihan gurami) belum terlihat kerjasama yang baik. Hal ini terlihat dari proses interaksi dan komunikasi yang belum berjalan efektif, sebagai contoh keunggulan Pokdakan Pamuji Inggil dalam mengelola kelompoknya belum ditularkan (*transfer knowledge and sharing experience*) ke pokdakan lain sehingga pokdakan lain belum semaju Pokdakan Pamuji Inggil. Kemajuan prestasi yang diperoleh Pokdakan UPR Pamuji Inggil ternyata belum mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah pemasaran yang dihadapi para petani ikan gurami (*vertical bridging*). Hubungan baik Pokdakan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dan kedekatan pengurus kelompok dengan Pemerintah Desa belum dimanfaatkan dengan baik untuk bersama-sama mencari solusi permasalahan pemasaran yang tepat bagi petani ikan (*horizontal bridging*).

Aset sosial memiliki peran penting dalam memajukan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. (Putnam, 1993) mendefinisikan aset sosial sebagai ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Aset sosial tersebut merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi dan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Alasannya adalah (1) adanya jaringan sosial memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat, (2) kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat, orang-orang yang saling percaya akan memperkuat norma mengenai keharusan untuk saling membantu, (3) berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu yang lalu akan mendorong keberlangsungan kerjasama pada waktu yang akan datang. Bahkan aset sosial dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat

kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, saat ini penguasaan aset sosial yang dimiliki pokdakan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kelompok dan mensejahterakan anggotanya. Ikatan yang terjalin diantara sesama anggota kelompok masih perlu ditingkatkan dengan cara membangun komunikasi dan kebersamaan diantara anggota kelompok melalui kegiatan yang lebih produktif lagi. Misalnya, dengan mengadakan pembinaan dan konseling bagi anggotanya yang mengalami permasalahan dalam usahanya. Sedangkan ikatan sosial yang terjalin dengan pihak luar perlu dilakukan panataan kerjasama yang lebih baik lagi dan perluasan jejaring usaha menambah informasi, pengetahuan dan pengalaman para anggota agar keberadaan kelompok dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota petani ikan (Tabel 3).

Tabel 3. Kondisi Aset Sosial dan Kebutuhan Pemberdayaan di Desa Beji, Tahun 2017

No	Kondisi Aset	Kebutuhan
1	Hubungan sesama anggota dalam satu kelompok cukup baik.	1. Memfasilitasi pokdakan dalam menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk memperluas jejaring usaha, menambah informasi, pengetahuan dan pengalaman para anggota. 2. Memfasilitasi kerjasama antar pokdakan baik dalam memajukan usaha maupun memajukan anggota pokdakan
2	Ikatan sosial yang terjalin antar anggota dari kelompok lain atau dengan pihak terkait lainnya belum terlalu kuat.	
3	Jaringan usaha antar kelompok belum optimal.	
4	Hubungan Pokdakan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa cukup baik.	

Sumber: Olahan penelitian

D. Aset Fisik

Meskipun Desa Beji memiliki wilayah usaha pertanian yang luas, tetapi kepemilikan lahan masyarakat sangat sempit. Rata-rata petani memiliki luas tanah pertanian 0,1 Ha hingga 0,25 Ha (Tabel 4). Lahan tersebut mereka manfaatkan sebagian untuk bercocok tanam padi sawah dan sebagian untuk kolam perikanan. Ada juga petani yang melakukan pergiliran pola sawah dengan kolam ikan. Setelah beberapa musim tanam padi mereka akan mengganti penggunaan lahannya menjadi kolam ikan. Tujuan pergantian pola usaha ini sebagai upaya menjaga kualitas tanah terutama dalam hal memperbaiki kesuburan tanah.

Ketersediaan air yang mencukupi sepanjang tahun membuat petani di Desa Beji tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh air untuk usaha pertanian mereka. Kebutuhan air untuk bercocok tanam dan memelihara ikan dapat dipenuhi secara seimbang. Masyarakat petani di Desa Beji biasanya menggunakan air sungai untuk mengairi sawah dan kolam ikan mereka. Selain mencukupi, kejernihan air di Desa Beji juga sangat mendukung kebutuhan dalam pemeliharaan indukan gurami. Secara teknis, ikan gurami indukan membutuhkan kualitas air yang jernih untuk menghasilkan kualitas telur yang baik.

Aset fisik lainnya yang dimiliki petani di Desa Beji berkaitan dengan sarana dan prasarana pertanian. Sarana pertanian berupa peralatan yang digunakan untuk memudahkan petani ikan dalam menjalankan usaha masih tergolong sederhana. Misalnya, ketika petani akan membuat kolam ikan, mereka masih menggunakan cangkul dan parang, waring/jaring, dan bambu dan sabut kelapa yang digunakan sebagai sarang untuk bertelur. Dalam menentukan ikan gurami indukan yang akan ditempatkan di dalam kolam, petani masih menggunakan jaring, drum timbangan dan penggaris. Pada saat pemeliharaan ikan, petani biasanya menggunakan peralatan sabit atau pisau,

ember kecil, timbangan, termometer, DO meter, kertas lakmus, seser, baskom, senter, busa spon, gelas ukur, gayung dan sarung tangan plastik. Ketika panen tiba, petani cukup menggunakan ember besar, mangkok kecil dan saringan halus serta plastik ukuran 1-2 Kg, karet, oksigen, sterofoam, dan lakban untuk mengemas telur-telur ikan yang akan dijual.

Prasarana atau infrastruktur pertanian yang sudah ada antara lain jalan, bangunan irigasi dan fasilitas pasar. Saat ini, jalan desa sudah berupa jalan aspal sehingga memudahkan transportasi pengiriman telur ikan gurami ke berbagai daerah. Bangunan irigasi sekunder sudah berupa irigasi teknis sedangkan irigasi tersier masih berupa irigasi non teknis. Namun, irigasi tersier ini sedang dalam proses pembangunan menjadi irigasi teknis. Untuk akses pemasaran, Desa Beji saat ini belum memiliki bangunan pasar desa permanen. Akan tetapi, Pemerintah Desa Beji telah memfasilitasi petani ikan untuk menggunakan Gedung Perikanan Desa Beji sebagai tempat transaksi jual beli telur ikan gurami. Sedangkan tempat penjualan berbagai jenis ikan air tawar dan ikan hias, Pemerintah Desa Beji memfasilitasi petani ikan untuk menggunakan bangunan PNPM yang sudah tidak terpakai.

Peningkatan penguasaan aset fisik petani ikan sangat membutuhkan peran Pemerintah Desa, kaitannya dengan penyediaan prasarana pertanian, terutama bangunan pasar ikan milik desa yang permanen. Tujuannya untuk menghidupkan perekonomian Desa Beji sebagai daerah sentra industri gurami. Selain itu, Pemerintah Desa Beji juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas gedung perikanan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang dapat memajukan usaha perikanan di Desa Beji. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut, partisipasi aktif dari masyarakat petani ikan ditingkatkan.

Dari beberapa kebutuhan yang terkait dengan aset fisik petani ikan, paling utama untuk segera dipenuhi adalah kebutuhan

Tabel 4. Kondisi Aset Fisik dan Kebutuhan Pemberdayaan di Desa Beji Tahun 2017

No	Kondisi Aset	Kebutuhan
1	Kepemilikan lahan petani terbatas (0,1-0,25 Ha).	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan. 2. Penyediaan alat penghitung telur ikan gurami dan pembuat pakan ikan 3. Pelatihan cara pengemasan telur ikan dan pembuatan pakan ikan. 4. Bangunan pasar ikan permanen
2	Peralatan penghitung telur ikan gurami masih sederhana (menggunakan mangkuk kecil).	
3	Infrastruktur pertanian terutama jalan desa aspal, irigasi sekunder teknis, irigasi tersier non teknis (dalam proses pembangunan).	
4	Pasar ikan permanen belum tersedia.	

Sumber: Olahan penelitian

akan pasar ikan permanen di Desa Beji. Dengan adanya pasar ikan permanen diharapkan petani ikan memperoleh harga pasar ikan yang memadai dan memiliki posisi tawar yang sama sehingga dapat menikmati keuntungan dari usaha perikanan air tawar. Kebutuhan lainnya yang tidak kalah penting adalah penyediaan alat penghitung telur ikan dan pelatihan pemanfaatan alat pembuat pakan ikan. Alat penghitung sangat diperlukan petani ikan agar dalam penghitungan telur menjadi tepat jumlah sehingga kerugian akibat salah hitung dapat diminimalisir. Sedangkan untuk alat pembuat pakan, sebaiknya segera dilaksanakan pelatihan pemanfaatan alat pembuat pakan karena permintaan kebutuhan pakan ikan (pelet ikan) sangat tinggi di Desa Beji. Pemerintah Desa Beji dapat memanfaatkan dua unit mesin pembuat pakan ikan yang merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pengelolaan pembuatan pakan ikan dapat diserahkan ke Pemerintah Desa atau Pokdakan setempat. Apabila kebutuhan pakan ikan dalam Desa Beji dapat dipenuhi sendiri, maka banyak manfaat yang diperoleh,

petani ikan dapat memperoleh harga pakan ikan yang lebih murah dan Pemerintah Desa dapat memperoleh keuntungan. Hasil yang diperoleh dari penjualan pakan ikan dapat dimanfaatkan untuk membantu biaya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

E. Aset Finansial

Menurut (Messer & Townsley, 2003), aset finansial yang tersedia untuk rumah tangga pedesaan dapat berasal dari konversi produksi menjadi uang tunai untuk menutupi masa ketika produksi kurang atau untuk diinvestasikan dalam aktivitas lain. Mereka dapat memanfaatkan kredit informal untuk melengkapi sumber keuangan mereka sendiri. Perbedaan kepemilikan aset finansial antara petani dan buruh tani sangat jelas terlihat. Bagi buruh tani, aset finansial yang dimanfaatkan oleh rumah tangga petani ikan masih sangat rendah.

Rata-rata pendapatan petani habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, terutama pemenuhan pangan sehari-hari (Tabel 5). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan modal usaha biasanya mereka meminjam ke Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan dibantu oleh kelompok. Untuk penyesihan pendapatan berupa tabungan uang yang disimpan baik di rumah maupun di bank masih sangat jarang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azalia, 2015) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya penghidupan petani cenderung berada pada tingkatan sedang dan rendah.

Berbeda dengan petani yang memiliki penguasaan lahan diatas rata-rata. Mereka masih mampu untuk menyisihkan pendapatan dari hasil pertaniannya. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang mereka miliki lebih banyak dari buruh tani. Selain memiliki usaha di bidang pertanian dan perikanan, ada yang bekerja sebagai PNS dan karyawan swasta sehingga mereka memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Ada juga petani yang mampu mengelola

bisnis pertaniannya mulai dari sarana produksi, budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran.

Pada dasarnya yang membuat rendahnya aset finansial yang dimiliki petani adalah rendahnya harga jual yang diterima petani. Petani tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) ketika berhadapan dengan para broker telur ikan (Tabel 5). Biasanya petani menerima harga yang ditentukan broker sehingga keuntungan paling besar hanya dinikmati oleh broker bukan petani. Hingga saat ini, harga jual yang diterima petani ikan masih rendah sedangkan keuntungan paling besar diperoleh oleh bakul atau pedagang pengumpul. Ketika harga jual telur ikan naik sekalipun, petani tidak menikmati untung karena mereka pada saat itu produksi telur ikan gurami sedang menurun. Untuk itu, perlu upaya dari Pemerintah Desa Beji bersama dengan masyarakat dan pihak terkait mencari mencari solusi untuk meningkatkan posisi tawar petani, agar kesenjangan pendapatan yang diterima petani dengan pedagang dapat berkurang dan kerugian yang diterima petani dapat dihindari.

Tabel 5. Kondisi Aset Finansial dan Kebutuhan Pemberdayaan Desa Beji Tahun 2017

No	Kondisi Aset	Kebutuhan
1	Pendapatan petani ikan masih rendah.	1. Penguatan posisi tawar petani dengan cara kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian melalui peraturan desa tentang pasar desa. 2. Pengalokasian dana desa untuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menyediakan modal bagi masyarakat.
2	Petani ikan tidak memiliki posisi tawar.	
3	Modal usaha terbatas.	

Sumber: Olahan penelitian

Berdasarkan pada (Akhmad, 2007), salah satu upaya untuk menaikkan posisi tawar petani ikan di Desa Beji dapat dilakukan dengan cara kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi peran dari jejaring pedagang perantara yang terlalu mendominasi dalam penentuan harga secara individual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Desa Beji dapat membantu petani dengan membuat kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan desa tentang pasar desa.

IV. KESIMPULAN

Sumber daya penghidupan yang dimiliki oleh petani ikan di Desa Beji dijabarkan melalui penguasaan terhadap lima aset, yaitu manusia, alam, sosial, fisik dan finansial. Penguasaan petani terhadap aset manusia sudah sangat baik, terutama pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan budidaya ikan gurami. Namun, keterampilan dalam penanganan pasca panen dan pemasaran masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengenalan terhadap teknologi tepat guna juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan teknik budidaya gurami.

Penguasaan petani terhadap aset alam terkait dengan ketersediaan lahan pertanian dan keberlimpahan air cukup baik. Namun, dukungan sumber daya alam berupa lahan dan potensi air tersebut saat ini mulai terancam dengan meningkatnya pencemaran air dari limbah rumah tangga dan penggunaan obat-obat kimiawi dalam usahatani dan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan maupun kegiatan non-pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan melalui sosialisasi maupun pelatihan dan pengoptimalan pemanfaatan lahan.

Penguasaan petani terhadap aset sosial dilihat dari hubungan yang terjalin antar

sesama anggota Pokdakan cukup baik tetapi hubungan antar Pokdakan masih perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan hubungan Pokdakan dengan pihak terkait seperti Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Beji sudah terjalin dengan baik. Untuk meningkatkan kemajuan usaha perikanan petani, maka perlu diperkuat jejaring usaha antar pokdakan dan pokdakan dengan pihak terkait.

Penguasaan petani terhadap aset fisik masih perlu ditingkatkan terutama dalam pemanfaatan sarana pertanian seperti mesin penghitung telur ikan dan penyediaan bangunan pasar ikan permanen. Penguasaan petani terhadap aset finansial masih sangat rendah terutama dalam pendapatan dan modal usaha. Rendahnya pendapatan petani karena lemahnya posisi tawar petani sehingga perlu adanya kolektifikasi pemasaran produk. Untuk mempermudah petani dalam mengakses modal usaha perlu meningkatkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan LKM.

Dari kelima aset tersebut intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain: (1) introduksi teknologi pengelolaan kelestarian sumber daya alam terutama tanah dan air untuk menjaga keberlangsungan usaha, (2) penyediaan pasar ikan permanen, (3) fasilitasi akses permodalan usaha, (4) introduksi teknologi budidaya dan pengemasan hasil serta pelatihan pemasaran ikan, (5) fasilitasi kerjasama dengan pelaku pasar sebagai bentuk pengembangan jejaring masyarakat petani ikan. Kelima aspek tersebut perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa Beji dalam proses pembangunan desa sebagai upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, S. (2007). *Membangun Gerakan Ekonomi Kolektif Dalam Pertanian Berkelanjutan: Perlawanan Terhadap Liberalisasi dan Oligopoli Pasar Produk Pertanian*. Purwokerto: BABAD.
- Azalia, N. R. (2015). *Pengaruh Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Padi Sawah Terhadap Tingkat Kesejahteraan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Bahal, B. S. (2014). Livelihood Diversification Pattern among the Farmers of West Bengal. *Journal of Economic Affairs*, 321-334.
- BPS. (2016). Sosial dan Kependudukan Tahun 2016. Diunduh dari www.bps.go.id: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Haan, L. J. (2012). *The Livelihood Approach: A Critical Exploration*. *Erdkunde*, 345-357.
- Kamala Gurung, H. B. (2016). Transformation from Rice Farming to Commercial Aquaculture in Bangladesh: Implications for Gender, Food Security, and Livelihood. *Journal of Gender, Technology and Development*, 49-80.
- Kenny, S. (2007). *Developing Communities for The Future*. Melbourne: Thomson.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- McShane, C. J. (2016). Connections: The Contribution of Social Capital to Regional Development. *Journal of Rural Society*, 154-169.
- Messer, N., & Townsley, P. (2003). *Local Institutions and Livelihoods: Guidelines for Analysis*. Roma: FAO UN.
- Najiyati, S. (2017). *Kebijakan Desa Membangun*. Dalam M. Arsyad, Suherman, & Ramli, *Realitas Desa Membangun: Gagasan dan Pengalaman* (hal. 30-46). Makassar: Hasanuddin University.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Olsson, B. E. (2006). Livelihood Diversification: Continuity and Change in the Sahel. *Geo Journal*, 167-180.
- Pemerintah Desa Beji. (2017). *Profil Desa Beji 2016*. Purwokerto.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Putnam, R. (1993). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *The American Prospect*, 35-42.
- Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI*, 35-42.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijayanti, E., & dkk. (2015). *Memahami Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus: Penggunaan Dana Desa di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede)

COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT

(Case Study: the Use of Village Funds in Pabuaran Village, Bojong Gede District)

Arif Purbantara

Pusat Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
Jln. TMP. Kalibata No. 17, Jakarta, 12750. Telepon/Faks. (021) 7971010
Email: taralitbang@gmail.com

Abstrak

Pembangunan desa yang dilakukan selama ini masih didominasi kepala desa dan *elite capture*. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit bahwa pembangunan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas baik dalam perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah dusun dan desa, pelaksanaannya, dan pengawasannya. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan hal utama karena dasar pembangunan desa bertumpu pada manusia. Intervensi dari pemerintah melalui dana desa juga mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana desa di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif *field research*. Analisa data yang digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat menggunakan analisa interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pabuaran dalam pengambilan *decision making*, *implementation*, dan *evaluation*. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat berupa partisipasi langsung dan keterwakilan. Partisipasi langsung dan keterwakilan dalam *decision making* berupa ide/gagasan, dalam *implementation* berupa tenaga, dana, makanan, dan keahlian. Sedangkan untuk tahap *evaluation*, partisipasi diwakili oleh BPD.

Kata Kunci:

Partisipasi,
Pembangunan Desa,
dan Dana Desa

Abstract

Nowadays the village development is still dominated by the village head and *elite capture*. Law Number 6 of 2014 concerning Village explicitly states that village development must involve broad community participation both in village development planning through hamlet and village meetings, implementation, and evaluation. In this case community participation is the main key because the principle of village development relies on humans. Government intervention through village funds also requires community participation. This study aims to examine community participation in rural development through the use of village funds in Pabuaran Village, Bojong Gede District, Bogor Regency. This study uses a qualitative field research approach and interpretative analysis to analyze community participation. The results showed that community participation in Pabuaran Village arises in decision making, implementation, and evaluation. The participation carried out by the community is direct and representative participation. Direct and representative participation in decision making is shown through ideas, while in implementation is shown through labour, funds, food contribution, and expertise. Meanwhile in evaluation phase, participation is represented by the village councils (BPD).

Keywords:

Participation, Village
Development, and
Village Funds

I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2014, pembangunan desa di Indonesia memasuki babak baru, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Moseley (2003) "*Rural development is the process of improving the quality of*

life and economic well-being of people living in relatively isolated and sparsely populated areas.” Jadi, pembangunan desa menitikberatkan pada proses peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kualitas hidup menurut Barcaccia (2013) *...is the general well-being of individuals and societies, outlining negative and positive features of life. It observes life satisfaction, including everything from physical health, family, education, employment, wealth, religious beliefs, finance and the environment*. Jadi, untuk meningkatkan kualitas hidup individu atau komunitas dapat melalui kesehatan fisik, keluarga, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keyakinan agama, keuangan dan lingkungan. Lee *et al.* (2012) juga mendefinisikan pembangunan pedesaan sebagai “proses peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Sejalan dengan Moseley dan Lee, pembangunan pedesaan adalah strategi yang memungkinkan sekelompok orang, penduduk miskin pedesaan baik perempuan dan laki-laki, mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka dan anak-anak mereka lebih dari apa yang mereka butuhkan (Chambers, 1983). Dalam pandangan Chambers terutama membantu orang miskin di perdesaan mendapatkan pekerjaan untuk kehidupan mereka. Kelompok ini mencakup petani skala kecil, penyewa dan tidak memiliki lahan.

Pembangunan desa yang dilakukan selama ini menunggu arahan dari pemerintahan supradesa. Apa yang diperintahkan itu juga yang akan dilakukan oleh desa atau malah lebih parah pemerintah desa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal itu terjadi karena pemerintah desa dianggap mempunyai kemampuan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat menentukan strategi pembangunan desanya. Pembangunan desa juga masih di dominasi kepala desa dan elite capture yang arah pembangunan desa ditentukan oleh mereka (Setiadi, *et. al*, 2016; Sim, *et. al*, 2017). Pada saat ini

menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pembangunan desa mengedepankan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial juga memperkuat eksistensi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan desa dan untuk dapat mengikuti pembangunan desa secara partisipatif. Pembangunan desa pada saat ini didukung negara melalui dana desa. Filosofi dari dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa ditujukan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial desa. Harapannya, dengan bertambahnya anggaran desa, dari beragam sumber, berdampak pada peningkatan perekonomian desa, pengurangan kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur desa. Dana desa juga diharapkan mempersempit kesenjangan pembangunan antar-desa dan mampu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dalam penggunaan dana desa masyarakat dapat ikut serta melakukan partisipasi dalam bentuk pengaduan masalah penggunaan dana desa, pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai ketentuan perundang-undangan. Partisipasi juga dapat dilakukan dalam bentuk studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan. Masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa. Masyarakat desa merupakan tokoh utama dan memainkan peran penting dalam pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dari sisi pelaksanaan dapat berdampak pada

peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan penduduk miskin secara temporer pada 75 persen di desa, dana desa juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal kemudahan, kenyamanan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta meningkatkan semangat kerja. Namun, Dana Desa semata-mata, belum mampu menurunkan status kemiskinan (Puslitbang, 2017). Berdasarkan hal itu maka partisipasi masyarakat sangat penting dalam penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran akan kepedulian, serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Menurut Conyers (1991: 154-155), partisipasi itu penting karena pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mpolokeng, partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan. Penelitian di empat daerah pedesaan Mafikeng Central Distrik di Afrika Selatan menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam semua tahapan proyek pembangunan pedesaan (Mpolokeng, 2003). Upaya pembangunan pedesaan di negara-negara Dunia Ketiga sering gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun ada partisipasi. Jika ada partisipasi pembangunan di desa lebih karena masyarakat itu ikut dalam suatu partai politik sehingga diikutkan dalam proyek pembangunan. Partisipasi masyarakat

harus distrukturkan oleh pemerintah sebagai instrumen pemberdayaan dan struktur ini harus dihormati pemerintah dan tidak memaksakan fungsionaris politik atau pemimpin tradisional di dalam struktur partisipasi ini. Kegagalan proyek untuk memfasilitasi pembangunan partisipatif tampaknya terutama terkait dengan kurangnya komitmen politik pemerintah dan kebutuhan birokrasi donor lembaga (Monaheng, 1995).

Menurut Cadwel (2016) masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* yang harus di diajak berpartisipasi dalam proyek pembangunan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* selain pemerintah dalam proses pembangunan desa agar pembangunan dapat berkelanjutan. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan terdapat partisipasi pada masyarakat yang penting bagi terlaksananya suatu program pembangunan di desa. Pusic (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu: a) Partisipasi dalam perencanaan. Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program/program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan sisi negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antara kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sulit dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili masyarakat masyarakat; b) Partisipasi dalam pelaksanaan. Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan

adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan tetapi segi negatifnya adalah masyarakat oleh negara dijadikan sebagai obyek pembangunan. Masyarakat hanya menjadi pelaksana pembangunan tetapi tidak memahami permasalahan yang mereka hadapi serta tidak timbulnya keinginan untuk mengatasi masalah, sehingga masyarakat tidak terlibat secara emosional dalam program.

Menurut Yustika (2016) partisipasi masyarakat desa penting karena sebelumnya soal partisipasi masyarakat desa sama sekali tidak ada. Masyarakat pada masa lampau hanya menerima program pembangunan dari pemerintah daerah. Manfaat yang didapatkan masyarakat dari program dana desa yaitu pertama, masyarakat belajar bahwa sumber kekuatan pembangunan berasal dari dalam desa bukan dari luar. Kedua, masyarakat desa dapat memanfaatkan sumber-sumber vital pendanaan dana desa untuk kebutuhan pembangunan desa. Letak pentingnya program dana desa bukan dari jumlah besarnya dana yang diterima masyarakat, tetapi dalam penggunaannya terdapat proses partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan RMJMN 2014-2019 berfokus pada pengentasan 5000 desa tertinggal menjadi Desa Berkembang dan 2000 desa Berkembang menjadi Desa Mandiri. Fokus program tersebut didukung oleh Dana Desa di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membutuhkan partisipasi masyarakat desa. Program yang baru berjalan pada tahun 2014 ini memerlukan partisipasi masyarakat dalam proses, pelaksanaan, dan evaluasinya. Partisipasi masyarakat juga didukung oleh Permen No 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa pasal 18 bahwa masyarakat dapat memantau dan mengawasi prioritas penetapan penggunaan Dana Desa. Bagaimana partisipasi masyarakat desa

dengan adanya UU Desa dan peran kepala desa dan elite capture yang selama mendominasi arah pembangunan desa. Melalui peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana desa di Desa Pabuaran.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif *field research*. Melalui pendekatan *field research* ini peneliti diharuskan mengambil data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna tentang permasalahan penelitian. Disamping itu peneliti dapat mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa di Desa Pabuaran. Pendekatan penelitian ini didasari pemikiran Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011) yang mengatakan "Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati" (Moleong, 2011, h. 4). Data yang dihimpun dari lapangan berupa data primer dan sekunder seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tema, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

No	Tema	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Dana Desa	Perundang-undangan	Data Sekunder
2.	Desa Pabuaran	Monografi Desa	Data Sekunder
3.	Pelaksanaan Dana Desa di Desa Pabuaran	Laporan Pelaksanaan Dana Desa di Pabuaran	Data Sekunder
4.	Pembangunan Desa	Informan, Monografi Desa	Wawancara, Data Sekunder, diskusi grup
5.	Partisipasi	Informan	Wawancara, diskusi grup

Sumber: Olahan penelitian

Untuk menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* jenis *purposive/judgmental sampling*. Neuman (2006:298) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah sampel non-acak dimana peneliti menggunakan berbagai metode untuk mencari semua kemungkinan kasus yang spesifik dan populasinya sulit dijangkau. Teknik ini membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik dari peneliti terhadap populasi penelitian. Peneliti harus benar-benar mengetahui bahwa responden yang dipilihnya dapat memberikan jawaban sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik penarikan secara *purposive*, dilakukan ketika peneliti mendalami suatu kasus yang melibatkan (a) jenis responden tertentu; (b) isu-isu sensitif bagi sekelompok masyarakat; dan (c) memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, pemilihan informan kunci dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik informan yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisa interpretatif. Analisa interpretatif ini untuk menggambarkan dan menginterpretasikan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa melalui dana desa. Data kualitatif yang dihimpun dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian. Menurut Krieffing (1991) data kualitatif dapat dianalisis dengan triangulasi data. Triangulasi data merupakan strategi untuk memperoleh data yang valid dan kredibel dari penelitian dengan cara saling konfirmasi data dan memastikan bahwa semua aspek dari fenomena telah diteliti (Knafl & Breitmayer dalam Krieffing, 1991). Pendekatan analisis menggunakan teori Cohen dan Uphoff (1980) mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi empat bentuk partisipasi, yang terdiri dari a) partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision*

making); b) partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*); c) partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*); dan d) partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*). Analisis dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan teori dalam partisipasi dengan kenyataan partisipasi dalam pembangunan desa. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat di Desa Pabuaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Lokasi

Pabuaran adalah desa di Kecamatan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Desa Pabuaran adalah salah satu desa di Kecamatan Bojong Gede yang mempunyai luas wilayah 248 Ha. Jumlah penduduk Desa Pabuaran sebanyak 32.364 Jiwa yang terdiri dari 20.159 laki-laki dan 21.200 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 9.800 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 9.012 KK dengan persentase 42 persen dari jumlah keluarga yang ada di Desa Pabuaran. Adapun pembangunan desa yang telah dilakukan dengan pembangunan fasilitas dasar untuk ada di desa meliputi: a) fasilitas pendidikan mulai dari TK (9 unit), SD (4 unit), SMP (4 unit), SMA (1), Madrasah Ibtidaiyah (4 unit), dan Madrasah Tsanawiyah (2 unit); sedangkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit (1 unit), rumah bersalin (6 unit), dan klinik kesehatan (6 unit).

2. Penggunaan Dana Desa

Pembangunan di desa yang dilakukan selama ini lebih banyak dari alokasi anggaran dari APBN. Sumber pendapatan di desa Pabuaran melalui: (a) pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (c) bagian dari hasil pajak daerah dan redistribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota; (e) lain-lain pendapatan desa yang sah, seperti disajikan Tabel 2.

Tabel 2. Sumber Pendapatan Desa Pabuaran

No	Uraian	Jumlah (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Desa	0	0
2	Pendapatan Transfer		
	Dana Desa	731.115.049	47.64
	Bagi hasil pajak & redistribusi daerah	270.814.896	17.63
	Alokasi Dana Desa	525.300.837	34.23
3	Pendapatan lain-lain		
	-	SILPA	7.458.510
	Total	1.749.689.292	100

Sumber: Lampiran Peraturan Desa No. 1 tahun 2016

Dari Tabel 2 terlihat bahwa Dana Desa merupakan komponen terbesar dalam pendapatan desa Pabuaran sebesar 47,64 persen dari total seluruh sumber pendapatan. Jumlah ini merupakan *trigger* untuk menggerakkan potensi desa yang ada. Hal ini sesuai dengan tujuan dana desa agar pembangunan desa tercapai dengan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan. Melalui dana desa ini pemerintah desa diharapkan mengajak masyarakat dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui

peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Anggaran desa yang bertambah karena dana desa akan berdampak pada peningkatan perekonomian desa, pengurangan kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur desa dari kota. Jumlah anggaran yang dikurcikan pada tahun 2015 akan sangat mewarnai desa dalam proses pembangunan di Desa Pabuaran. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa dipergunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di Desa Pabuaran seperti pada Tabel 3.

Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa dilakukan oleh tim kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Pabuaran. Pokja ini terdiri atas perangkat desa, LPM, dan masyarakat desa yang mempunyai keahlian. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Pabuaran didominasi oleh betonisasi jalan. Jalan yang semula jarang dan tidak bisa dilewati pada musim penghujan setelah dibetonisasi menampilkan perkembangannya karena jalan tersebut dapat dilalui sepanjang waktu. Jalan di RW 5 yang dibetonisasi tersebut untuk menunjang konektivitas ekonomi terutama wilayah Desa Pabuaran yang selama ini kurang

Tabel 3. Penggunaan Dana Desa di Desa Pabuaran

No	Jenis	Jumlah (Rp)	Uraian				
			Pj (m)	L (m)	Tg (m)	Tbl (m)	Lokasi
1.	Betonisasi Jalan	59.802.548	146	3	-	0,10	RT 1/RW 4
2.	Betonisasi Jalan	49.899.500	25	3	-	0,10	RT 4/RW 4
3.	Betonisasi Jalan	63.551.000	400	0,07	-	-	RT 3/RW 5
4.	Turap		45	-	1	0,29	RT 3/RW 5
5.	Betonisasi Jalan	233.389.000	323	3	-	0,11	RT 3, RT 5/ RW 7; RT 4/RW 13
6.	Turap/Talud		86	-	2	0,34	
7.	Betonisasi Jalan	50.000.000	70	5	-	0,1	RT, 7, 8, 10/ RW 10
8.	Pembangunan Jembatan	90.708.500	8	2,5	-	-	RT 1/RW 9
9.	Rehabilitasi Jembatan	70.224.500	10	5	5	-	RW 16
10.	Betonisasi Jalan	113.540.000	-	-	-	-	RT 6/Rw 17; RT 12 RW 17*

Sumber: Lampiran Peraturan Desa Pabuaran No. 1 tahun 2016

*Ket: Kolom kosong tidak terdapat data

mendapat perhatian karena kurangnya dana untuk membangun infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Akses masyarakat ke pasar Pabuaran dan ke daerah lain menjadi lebih mudah. Sedangkan turap dibangun tujuannya agar tidak terjadi longsor terutama di jalan yang sudah dibeton. Pembangunan jembatan di RW 9 agar masyarakat lebih mudah mencapai jalan utama desa tersebut tidak perlu memutar jauh melewati RW lain. Sedangkan rehabilitasi jembatan di RW 16 karena dirasakan jembatan yang ada sudah mulai rusak besi penyangga tergerus arus sungai.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa

Keberhasilan pembangunan desa membutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait seperti pemerintah desa dengan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah desa serta seluruh anggota masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan desa melalui Dana Desa. Pemerintah Desa Pabuaran dalam menyelenggarakan pembangunan desa melibatkan partisipasi anggota masyarakatnya. Berdasarkan penelitian partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dalam penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan/perencanaan merupakan partisipasi masyarakat untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi yang dilakukan masyarakat yaitu dengan melakukan musyawarah mulai dari tingkat RT, RW, sampai desa untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa. Di tingkat RT seluruh lapisan masyarakat menyampaikan usulan program pembangunan desa. Usulan tersebut mulai yang bersifat fisik maupun yang non-fisik. Usulan dari masyarakat ini nantinya akan diteruskan ke tingkat yang

lebih tinggi ke tingkat desa. Di tingkat desa, masyarakat diwakili oleh perangkat RT dan RW serta struktur kelembagaan di tingkat desa seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan dicatat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdesa). Prioritas tersebut dengan sistem keterwakilan merupakan keinginan masyarakat yang disesuaikan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan, potensi, dan asset yang dimiliki desa. Setiap usulan dibuat matrik prioritas untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa. Hasil dari musrenbangdesa ini diagendakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Desa untuk dilaksanakan. Hasil musrenbangdesa juga merupakan salah satu syarat administrasi untuk pencairan dana desa. Masyarakat dilibatkan dalam penggunaan dana desa di tahap perencanaan yaitu dengan diundang pada rapat musrenbang agar mampu memberikan usulan terkait dengan penggunaan dana desa. Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan atau pengambilan keputusan yaitu dengan mengikuti rapat untuk menentukan prioritas mulai dari tingkat RT, RW, dan terutama di musrenbangdesa. Meskipun dengan sistem keterwakilan dengan adanya lembaga BPD, musrenbangdesa telah menangkap aspirasi masyarakat masyarakat. Di musrenbang juga untuk menentukan prioritas mana yang akan dipilih terlebih dahulu, hal ini untuk menghindari perdebatan kenapa program betonisasi jalan diutamakan dibandingkan program yang lain.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi ini menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat pada proses pembangunan yang *tangible*. Pada tahap pelaksanaan penggunaan dana desa yang berupa pembangunan jalan, jembatan, atau talud terdapat tiga bentuk partisipasi masyarakat Desa Pabuaran sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Tenaga.

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan dana desa, masyarakat diprioritaskan untuk ikut serta dalam proyek pembangunan itu. Hal ini mulai dari menjadi tim pengelola kegiatan (TPK) dan pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat. Program yang terbaru dari dana desa yang melibatkan masyarakat adalah Program Padat Karya Tunai yang melibatkan warga desa yang termasuk dalam kategori miskin dan pengangguran. Pada sisi lain dimana warga tidak dibayar oleh dana desa, warga menyumbangkan tenaga sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam pelaksanaan dana desa dengan bergotong royong di Desa Pabuaran. Gotong royong dilakukan terutama sebelum program dimulai. Misalnya dalam betonisasi jalan, masyarakat sebelumnya meratakan jalan tanah agar nantinya ketika akan di beton lebih mudah. Hal lain yang dilakukan masyarakat ketika proses pembangunan berjalan ada masyarakat yang membantu membantu mengaduk semen, meratakan semen dan batu. Hal ini dilakukan oleh masyarakat berjenis kelamin laki-laki adapun yang perempuan memberikan sumbangan dalam bentuk yang lain seperti membantu mempersiapkan makanan untuk pekerja jalan dan jembatan tersebut.

2) Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Finansial.

Masyarakat Desa Pabuaran berpartisipasi menyumbangkan uang karena keterbatasan waktu tidak bisa menyumbangkan partisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi ini dilakukan masyarakat Desa Pabuaran dengan sukarela terutama di kompleks perumahan-perumahan yang setiap harinya bekerja diluar Desa Pabuaran. Dana tersebut digunakan untuk membantu operasional dan terkadang membantu menambah bahan (semen, batu, dan besi).

3) Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Konsumsi

Bentuk partisipasi ini dilakukan terutama oleh ibu-ibu. Dalam hal ini masyarakat membantu memberikan makanan dan minuman secara sukarela kepada pekerja yang memperbaiki desa. Misal dalam gotong royong perbaikan jembatan.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi ini menekankan pada peran masyarakat dalam menggunakan, memelihara, dan menjaga hasil pembangunan dengan dana desa yang telah dilaksanakan agar dapat berlangsung lama hasilnya. Pada tahap ini, masyarakat Desa Pabuaran berupaya menjaga agar manfaat dari adanya jalan Desa Pabuaran ini dapat dirasakan untuk bersama. Pada tahap ini memang tidak terlihat partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun oleh lembaga-lembaga desa. Partisipasi hanya dilakukan pada waktu jalan dicor masih belum kering, masyarakat desa juga tidak memaksakan untuk melewati jalan tersebut karena mereka sadar bahwa jalan yang belum kering jika dilewati diatasnya akan rusak. Selain itu memang belum tampak upaya lain untuk menjaga agar jalan tersebut dapat bertahan lebih lama.

d. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Evaluasi

Pada tahap ini partisipasi berupa pemberian nilai akan hasil pembangunan dana desa. Tujuan dari evaluasi ini untuk mengoreksi mulai dari manfaat, akuntabilitas keuangan, serta sebagai bahan pembelajaran untuk merencanakan program selanjutnya. Di dalam proses ini yang lebih terlihat berperan adalah BPD serta badan evaluasi lainnya di tingkat kabupaten seperti inspektorat jenderal. BPD yang sudah ikut terlibat sejak awal dan memang mempunyai peran untuk mengevaluasi telah menjalankan tugasnya. BPD selalu memantau dan memastikan kesesuaian spesifikasi pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Adapun masyarakat tidak secara langsung berperan

dalam tahap ini. Hal ini memang karena tidak adanya kewenangan langsung masyarakat. Masyarakat hanya mengoreksi apabila memang pembangunannya sangat jauh melenceng dari spesifikasi yang diumumkan.

B. Pembahasan

Penggunaan dana desa di Desa Pabuaran diprioritaskan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik. Hal ini sudah sesuai dengan prioritas dana desa pada tahun 2016 dan juga prioritas pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2016 dengan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Berdasarkan temuan hasil di lapangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui dana desa melalui berbagai cara. Bentuk partisipasi masyarakat menurut (Cohen dan Uphoff, 1980) dapat berupa a) partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*); b) partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*); c) partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*); dan d) partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Bentuk partisipasi masyarakat di Desa Pabuaran terutama dipembuatan keputusan dan pelaksanaannya. Di dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan ini masyarakat masyarakat dapat langsung berperan serta dan mempengaruhi serta terlibat di dalam proses pembangunan desa. Meskipun di dalam pengambil keputusan ditingkat desa sudah ada BPD sebagai lembaga yang mewakili akan tetapi ditingkat RT dan RW masyarakat masih dapat memberikan usulan program dalam pengambilan keputusan. Usulan prioritas penggunaan dana desa di musrenbang yang diwakili oleh ketua RT, RW, atau BPD merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk prioritas penggunaan dana desa.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat terlihat jelas ketika di tingkat pelaksanaan. Bentuk partisipasi berupa tenaga, finansial (uang) dan makanan. Partisipasi langsung seperti ini tidak melalui lembaga desa seperti BPD atau LKMD. Partisipasi langsung menjadikan masyarakat memiliki pembangunan yang dilakukan di desanya.

Masyarakat desa merupakan salah satu *stakeholder* dalam pembangunan di desanya. Sedangkan dalam partisipasi pemanfaatan, masyarakat desa belum terlihat secara terstruktur dan terkoordinir. Partisipasi ini lebih pada dorongan masyarakat secara pribadi untuk memafaatkan dan menjaganya. Apabila partisipasi yang lebih terkoordinir dan terstruktur nantinya akan muncul rambu atau peringatan atas hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti jika melewati jembatan atau jalan diberikan tanda atau rambu-rambu seperti *tonase*. Misalnya truk tidak boleh lewat agar jalan atau jembatan tidak mudah rusak. Jika secara terstruktur dapat dilakukan dengan menginisiasi pembentukan lembaga yang merawat jalan atau jembatan tersebut. Lembaga ini secara periodik memantau kerusakan jalan atau jembatan untuk dilaporkan kepada yang berwenang seperti perangkat desa. Partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi juga melalui lembaga perwakilan seperti BPD. Masyarakat tidak dapat mengevaluasi secara langsung mulai dari kinerja ataupun hasil dari pelaksanaan program dana desa. Hal ini memang karena tidak adanya lembaga khusus yang mengevaluasi pelaksanaan dana desa. Evaluasi diserahkan kepada lembaga yang berkompeten seperti inspektorat jenderal yang tidak ada hubungannya langsung dengan masyarakat desa. BPD sebagai perwakilan masyarakat desa harus dioptimal dalam evaluasi pembangunan desa melalui dana desa ini. Hasil evaluasi harus dipublikasikan kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban BPD. Jadi, partisipasi di Desa Pabuaran seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Bentuk Partisipasi di Desa Pabuaran

	<i>Decision Making</i>	<i>Implementation</i>	<i>Benefits</i>	<i>Evaluation</i>
Langsung	Ide/gagasan	Tenaga, Dana, makanan, keahlian	-	
Keterwakilan	RT, RW, LPM, BPD	BPD, Pokja	-	BPD

Sumber: Olahan Peneliti (2017)

Dari hal ini maka partisipasi masyarakat di Desa Pabuaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Partisipasi Langsung

Parameter dari partisipasi ini adalah masyarakat desa berperan langsung dan aktif dalam pembangunan desa. Bentuk partisipasi ini berupa materi dan non-materi. Bentuk yang berupa materi berupa tenaga, makanan, finansial, dan gotong-royong. Sedangkan non-materi berupa gagasan, usulan, pemikiran yang disampaikan dalam rapat RT, RW, maupun musrenbangdesa. Partisipasi langsung tidak dilakukan pada tahap *participation in benefit* maupun *participation in evaluation*. Hal ini karena tidak adanya proses atau lembaga yang menangani secara langsung pada tahap ini.

b) Partisipasi Keterwakilan

Parameter dari partisipasi ini adalah adanya lembaga yang mewakili masyarakat desa (lembaga BPD, LPM, RT, RW) baik disemua bentuk partisipasi seperti dalam a) partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*); b) partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*); c) partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*); dan d) partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*). Lembaga yang mewakili masyarakat desa seperti BPD dan LPM. Hal ini karena anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari

Ketua Rukun Masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Bentuk partisipasi dalam teori Cohen dan Uphoff tidak sepenuhnya terjadi pada partisipasi penggunaan dana desa di Desa Pabuaran. Bentuk partisipasi yang tidak terjadi menurut teori tersebut adalah partisipasi dalam menerima manfaat hasil dana desa. Partisipasi tidak terlihat dalam memelihara dan menjaga hasil pembangunan dengan dana desa yang telah dilaksanakan. Contohnya tidak ada tanda peringatan yang menginformasikan bahwa beban maksimal yang boleh melewati jembatan tidak boleh melebihi *tonase* tertentu. Tidak adanya partisipasi pada bentuk *benefit* ini merupakan kelemahan dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik. Apabila tidak ada yang menjaga dan memelihara hasil pembangunan tersebut maka akan terancam keberlangsungan hasil pembangunan. Partisipasi di Desa Pabuaran juga memunculkan sebuah model bahwa partisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan secara langsung dan keterwakilan. Jenis partisipasi langsung dan keterwakilan muncul dalam pembangunan desa karena sistem demokrasi dan struktur pemerintahan desa. Meskipun tidak bertentangan dengan UU Desa akan tetapi UU Desa menginginkan setiap partisipasi dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa tanpa perlu adanya keterwakilan.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Partisipasi merupakan bagian penting dan merupakan salah satu faktor utama yang di dorong oleh pemerintah dalam pembangunan di desa. Adapun dari hasil lapang dan pembahasan itu dapat ditarik kesimpulan tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pabuaran melalui penggunaan dana desa. Partisipasi tidak selalu diartikan masyarakat ikut langsung dalam pembangunan akan

tetapi dapat diwakili dalam sebuah institusi. Partisipasi masyarakat secara langsung terlihat pada tahap pembuatan keputusan (*participation in decision making*) dan dan tahap pelaksanaan (*implementation*). Dalam partisipasi langsung ini warga menyampaikan ide atau gagasannya untuk penggunaan dana desa di forum rapat RT. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, partisipasi warga berwujud tenaga, dana, dan makanan ketika ada gotong royong disekitar lokasi proyek pembangunan desa. Adapun partisipasi tidak langsung atau keterwakilan terlihat dalam tahap a) partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*); b) partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*); dan c) partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*). Parameter dari partisipasi ini adalah adanya lembaga yang mewakili masyarakat desa (lembaga BPD, LPM, RT, RW). Ide atau gagasan warga desa untuk penggunaan dana desa dibawa atau disampaikan oleh salah satu lembaga tersebut. Di tingkat Desa lembaga BPD mewakili masyarakat dalam tahap evaluasi meskipun di Permen No. 19 Tahun 2017, masyarakat diperbolehkan untuk ikut mengevaluasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengawasi dana desa agar akuntabel dan transparan melalui pengaduan masalah (*crisis center*). Partisipasi tidak terlihat pada tahap menerima manfaat (*participation in benefits*) baik secara langsung maupun diwakili. Partisipasi ini menekankan pada peran masyarakat dalam menggunakan, memelihara, dan menjaga hasil pembangunan. Partisipasi dalam menjaga hasil pembangunan yang menjadi kelemahan di Desa Pabuaran. Partisipasi ini yang seharusnya juga dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hasil penggunaan Dana Desa.

B. Rekomendasi

Partisipasi untuk menunjang pembangunan desa sebaiknya dilakukan pada setiap tahapan bentuk partisipasi. Adapun yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi Permendesa tentang kebijakan prioritas penggunaan dana desa dan aturan partisipasi agar masyarakat mengetahui haknya agar dana desa akuntabel. Sosialisasi ini juga berfungsi agar masyarakat mengetahui perannya dalam Dana Desa
2. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan. Peningkatan kesadaran itu baik dari sosialisasi maupun peran atau posisi masyarakat umum dalam penggunaan dana desa.
3. Diperlukan optimalisasi peran BPD melalui peraturan desa untuk aktif dalam setiap bentuk partisipasi masyarakat. Pengoptimalan peran BPD akan memberikan dampak positif dalam penggunaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto, Isbandi. (2001). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Hak Cipta.
- Barcaccia, B. (2013). *Definitions and Domains of Health-related Quality of Life*. In P. Theofilou (Ed.), *Outcomes Assessment in End-stage Kidney Disease: Measurements and Applications in Clinical Practice*. Bussum: Bentham Science Publishers.
- Caldwel, Marc Sam & Erevbenagie Usadolo. (2016). *A Stakeholder Approach to Community Participation in a Rural Development Project*. Artikel SAGE Open January-March 2016: 1–9 DOI: 10.1177/215

- Chambers, R.. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Long
- Cohen, John M. & Uphoff, Norman T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. World Development. Vol. 8, pp.213-235. DOI: 10.1016/0305-750X (80)90011-X
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Krefting, L. (1991) Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworthiness. *American Journal of Occupational Therapy*. Vol. 45, 214-222. Doi: 10.5014
- Lee, W, et. all. (2002). *A Study on Differentiation of National Assistance for the Promotion of Regional Development*. Korea: Korean Research Institute For Human Settlements.
- Moleong J. Lexy. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset
- Monaheng, Tsitso. (1995). *Rural Development and Community Participation*. Dissertation. University of South Africa
- Moseley, Malcom J. (2003). *Rural Development: Principles and Practice*. London: Sage Publication.
- Mpolokeng, P.G. (2003). People's Participation in Rural Development: The Examples from Mafikeng. *African Journal of Political Science*. Vol 8, No 2.
- Neuman, W.L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, 6th ed. Boston: Allyn and Bacon.
- Puslitbang (2017). *Dampak Dana Desa pada Kemiskinan dan Perekonomian Desa*. Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jakarta: Puslitbang.
- Setiadi, et. al. (2016). *Mengikis Elite Capture Dalam Community Development: Pembelajaran Dari Bumi Seribu Nyiur Melambai*. Policy Brief No. 31/PB/2016. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta: UGM.
- Sim, Armand, et. al. (2017). *Ketimpangan. Elite Capture, dan Penargetan Program Perlindungan Sosial: Bukti dari Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Yustika, Erani. (2016). *Majalah Info Desa*. Edisi Agustus. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jakarta.

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DLINGO GIRITAMA, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA

VILLAGE HEAD LEADERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE (BUMDESA) DLINGO GIRITAMA, BANTUL REGENCY, YOGYAKARTA

Farida Yustina

Pusat Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jln. TMP. Kalibata No. 17, Jakarta. Telepon/Faks. (021) 7971010,
Email: yustinaresandi@gmail.com

Abstrak

Pendirian BUMDesa di berbagai desa terbukti telah membuat perekonomian bergerak secara signifikan. Tahun 2017 tercatat telah berdiri kurang lebih 32.249 BUMDesa dari 74.957 desa di seluruh Indonesia. Namun lemahnya kontrol kepemimpinan dan SDM yang kurang mumpuni membuat BUMDesa banyak yang gulung tikar sebelum merasakan hasil usahanya. Kajian ini akan mendeskripsikan pengalaman BUMDesa Dlingo Giritama di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang keberhasilannya ditengarai berkat faktor kepemimpinan kepala desa. Oleh sebab itu, kepemimpinan kepala desa di BUMDesa Dlingo Giritama dipilih sebagai media pembelajaran agar keberhasilannya dapat diterapkan pada BUMDesa lain. Penulisan dilakukan dengan pendekatan kualitatif guna memahami dan mendeskripsikan peran kepemimpinan Kepala Desa pada Badan Usaha Milik Desa Dlingo Giritama dalam mengelola potensi di Desa Dlingo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh empat sifat umum kepemimpinan organisasi yang dimiliki yaitu; kecerdasan, kedewasaan, motivasi dan sikap hubungan kemanusiaan. Sedangkan perilaku gaya dasar kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang mendominasi adalah konsultatif pada masa rintisan dan bergeser ke arah partisipatif ketika usaha mulai berjalan. Kepemimpinan tersebut lebih menitikberatkan pada gaya demokratis atau democratic leadership yang terfokus pada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Untuk memberikan pembatasan kewenangan Kepala Desa dalam berkontribusi pada kelembagaan BUMDesa, perlu penguatan BPD agar mampu berfungsi sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan Kepala Desa sehingga Kepala Desa tidak menjadi pusat kekuasaan.

Kata Kunci:

BUMDESA,
Kepemimpinan
Kepala Desa,
Dlingo

Abstract

The establishment of Village-Owned Enterprise (BUMDesa) in some villages has proven to make the economy increase significantly. In 2017 there were 32,249 BUMDesa registered from 74,957 villages throughout Indonesia. However, due to lack of control leadership and incapable human resources make many BUMDesa out of business before making a profit. This study will describe the experience of the BUMDesa Dlingo Giritama in Bantul Regency, Yogyakarta, that succeeded because of the leadership of the village head. Therefore, the leadership of the village head on BUMDesa Dlingo Giritama was chosen as a learning media so that its success can be applied to other BUMDesa. The research was conducted with a qualitative approach in order to understand and describe the leadership role of the Village Head in the BUMDesa of Dlingo Giritama Village in managing their potential assets. The results showed that the success was influenced by the four general characteristics of self organizational leadership, which are: intelligence, maturity, motivation and human relations attitude. Whereas the leadership style in making decisions is dominated by consultatives during the early period and shifts to participatory when the business starts. This leadership is more focused on democratic leadership that concentrated on the ability to create morals and the ability to build the trust. To confine the authority of the Village Head in contributing to BUMDesa institutions

Keywords:

Village-Owned
Enterprise, Village
Head Leadership,
Dlingo Village

I. PENDAHULUAN

Mendukung pelaksanaan Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah c.q Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan empat program untuk percepatan pembangunan desa yaitu: Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Membangun Embung Air Desa, Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Membangun Sarana Olah Raga Desa (Raga Desa).

BUMDesa sebagai program prioritas ketiga diproyeksikan sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan desa secara langsung. Hadirnya BUMDesa diharapkan dapat membuat desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi, sehingga dana desa yang saat ini sebagai sumber utama pembangunan desa dapat segera bergeser hanya sebagai stimulus saja.

Data tahun 2017, dari total 74.957 desa di Indonesia telah memiliki 32.249 BUMDesa (Nusakini, 2017). Meskipun semangat pendirian BUMDesa telah menjadi endemik di masyarakat desa, namun tidak semua BUMDesa mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dari beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas BUMDesa harus melalui pemetaan baik dari tingkat individu, kelembagaan maupun sistemnya agar BUMDesa mampu berdaya saing (Purbantara, 2017). Penelitian lain menyebutkan pengembangan kelembagaan yang baik ditunjukkan dengan keseimbangan pada aspek usaha, kepemimpinan, sumber daya, doktrin dan struktur internal. Kelemahan pada salah satu aspek dipengaruhi dan sekaligus mempengaruhi potensi lainnya. Sehingga ketidakmampuan dalam menyelaraskan keseimbangan berakibat pada ketidakmampuan BUMDesa untuk berkembang (Rofiq, 2017)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa pengelola BUMDesa terbagi menjadi tiga, yaitu; Penasihat yang dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan; Pelaksana Operasional yaitu orang-orang yang bertugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); serta Pengawas yang bertugas dalam fungsi pengawasan sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa didefinisikan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Persyaratan sebagai Kepala Desa antara lain berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, berusia paling rendah 25 tahun dan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Dalam kepengurusan BUMDesa, Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai penasihat yang bertugas melaksanakan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut bahwa penasihat juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pelaksana Operasional adalah pengurus organisasi pengelola BUMDesa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa; menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi dalam peningkatan PAD; juga bekerjasama dengan lembaga perekonomian desa lain. Persyaratan untuk dapat menjadi pelaksana operasional BUMDesa cukup

ketat antara lain meliputi masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha, berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa dan berpendidikan minimal setingkat SMU, Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Persyaratan Pelaksana Operasional tersebut di atas sepertinya sederhana, tetapi ternyata tidak mudah dalam penerapannya. Permasalahannya bukan hanya dalam mendapatkan SDM dengan kualifikasi seperti yang dipersyaratkan tetapi juga minimnya keberanian dalam mengambil risiko karena kurangnya pengalaman dalam pengelolaan organisasi (BUMDes *Academy*, 2017). Sehingga di beberapa BUMDesa, peran Kepala Desa cenderung mendominasi pengembangan usaha BUMDesa. Hal ini dikarenakan posisi Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan dalam struktur pemerintahan desa menyebabkan kepala desa memiliki aksesibilitas kekuasaan yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa termasuk pada pengembangan perekonomian desanya.

Penelitian terdahulu yang berjudul Kajian Pengembangan Kapasitas untuk Keberhasilan BUMDesa, mengambil sampel penelitian di tujuh BUMDesa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta (Desa Panggung Harjo, Desa Wonokromo, Desa Girirejo, Desa Dlingo, Desa Bantul, Desa Murti Gading, dan Desa Gading Harjo). Sebagai *benchmark* penelitian adalah Desa Panggung Harjo dan Desa Dlingo karena keduanya tidak hanya berhasil meraih keuntungan bernilai rupiah tetapi sekaligus memberdayakan potensi lokal yang dimiliki desa untuk terus berkembang.

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan kinerja BUMDesa adalah kepemimpinan. BUMDesa Dlingo Giritama merupakan

salah satu BUMDesa yang menunjukkan pemenuhan indikator mikro struktur pola kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui keberhasilan kepemimpinan kepala desa dalam pengembangan BUMDesa di Dlingo Giritama.

II. METODOLOGI

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala desa di dalam pengembangan BUMDesa Dlingo Giritama. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (J.Lexy, 2011) "Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Kajian difokuskan pada pola kepemimpinan seperti apakah yang akan menjadi pengungkit keberhasilan BUMDesa serta bagaimanakah pembatasan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDesa, dengan sampel Desa Dlingo Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Desa Dlingo dipilih karena telah memenuhi syarat pemenuhan indikator mikro struktur dalam konteks kepemimpinan. Selain itu, tulisan diangkat sebagai bentuk apresiasi terhadap kegigihan yang dilakukan oleh pelaksana operasional BUMDesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga desanya agar dapat menikmati fasilitas perekonomian secara lebih layak. Bahkan Dlingo kini menjadi salah satu desa tempat rujukan ratusan desa di seluruh Indonesia yang berkunjung untuk belajar bagaimana mengelola potensi desa. (Berdesa, 2017)

Informan yang dipilih untuk mendukung penulisan kajian ini adalah Kepala Desa Dlingo Kabupaten Bantul, Direktur BUMDesa Dlingo Giritama milik Desa Dlingo, pelaksana operasional BUMDesa,

Pendamping Desa Dlingo dan masyarakat Desa Dlingo. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara baik terstruktur maupun semi terstruktur yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk rekaman maupun catatan lapang untuk kemudian dianalisa secara naratif. Analisa yang dilakukan melalui tahapan (1) Pengorganisasian data (*sort and classify*), (2) Pengolahan data (*open coding, axial coding, selective coding*), (3) Interpretasi dan elaborasi data (*interpret and elaborate*), dan (4) Pengambilan kesimpulan. (Neuman W. L., 2013).

Kajian Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dlingo Giritama, Kabupaten Bantul, Yogyakarta akan dianalisis dari aspek sifat yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan organisasi dari Keith Davis. Teori perilaku gaya dasar kepemimpinan dalam mengambil keputusan dari Thoha ditambahkan untuk memperoleh gambaran tentang kontrol kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas. Teori dari Thoha ini kemudian akan diperbandingkan dengan Teori Goldberg dan Larson untuk permasalahan yang sama. Terakhir, sebagai upaya dalam pembatasan kewenangan Kepala Desa, akan dianalisis melalui teori *Trias Politica* dengan prinsip *check and balances*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Dlingo

Desa Dlingo berada di lereng perbukitan Gunung Kidul di wilayah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa berpenduduk 5.590 jiwa atau 1.772 kepala keluarga di areal seluas 856,75 Ha ini berjarak 25 Km dari Kabupaten Bantul atau 0,5 Km dari ibu kota kecamatan.

Ketersediaan sarana di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan/ pelayanan umum dan peribadatan cukup

memadai. Di bidang perekonomian, Desa Dlingo memiliki satu pasar tradisional, dua toko di Dusun Koripan I, dua toko di Dusun Dlingo I, serta 84 warung/kios yang tersebar di 10 dusun. Selain itu perekonomian masyarakat Desa Dlingo ditunjang oleh pengolahan hasil pertanian seperti olahan pangan dari ketela, garut, pisang, sukun dan jagung serta industri kerajinan yang menghasilkan berbagai mebel.

Warung/kios yang berada di Desa Bantul pada umumnya dalam kondisi yang tidak berkembang, sedangkan grosir besar yang tersedia dimiliki oleh pendatang. Bersamaan dengan hal tersebut terbit Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dengan niat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi. Perda ini mendorong masyarakat Desa Dlingo untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dlingo Giritama dengan usaha pertama berupa toko bertajuk Desamart. Toko berkonsep swalayan modern yang menjual kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat baik secara eceran maupun partai besar (grosir). Pilihan usaha Desamart ditujukan untuk meminimalisir dampak waralaba yang semakin menjamur hingga ke desa-desa.

Pertengahan tahun 2017, BUMDesa Dlingo Giritama mencatat omzet rata-rata per bulan sebanyak 30 juta rupiah, sehingga akumulasi nilai selama satu tahun diperkirakan mencapai Rp 360.000.000. Keberhasilan ini tak lepas dari usaha dan kerja keras semua pihak, terutama Kepala Desa dan pelaksana operasional BUMDesa yang tidak saja berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat tetapi juga sekaligus mampu melakukan pembinaan teknis pemasaran produk-produk lokal agar layak jual. Hasilnya, dalam waktu singkat Desa Dlingo telah memiliki sentra-sentra produk lokal seperti emping garut, dodol sawo, ceriping singkong dan sawo.

B. Kepemimpinan Organisasi

Purbantara (2017) mengatakan faktor yang paling menjadi penentu keberhasilan dalam usaha BUMDesa adalah kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan diartikan sebagai entitas yang mengarahkan para anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan atau *leadership* yang baik diyakini dapat mengharmonisasi sekaligus mendorong potensi masing-masing anggota dalam iklim kompetensi yang kondusif. Kepemimpinan dapat maksimal apabila didukung dengan sistem komunikasi yang harmonis dari pucuk pimpinan hingga pekerja di level terendah.

Kepemimpinan sering ditengarai sebagai isu sentral yang akan menentukan keberlanjutan BUMDesa. Sahrul Aksa (Mayu, 2016) menyebutkan bahwa manajerial dan tata kelola merupakan faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan BUMDesa. Jika kepemimpinan, manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka BUMDesa dengan cepat akan mati suri

Kepemimpinan mempunyai definisi yang berbeda menurut pandangan para ahli. Kotter dalam (Putra, 2016) mengartikan kepemimpinan sebagai perangkat proses yang ditujukan untuk menciptakan organisasi atau menyesuakannya terhadap keadaan-keadaan yang jauh berbeda. Sedangkan Siagian dalam (Putra, 2016), menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan suatu satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya dan memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan tertentu. Kedua ahli di atas menggarisbawahi bahwa kepemimpinan tidak hanya menunjuk sebagai seseorang, tetapi sekaligus pada sistem yang dibangun guna mencapai tujuan organisasi yang disepakati bersama dengan kontribusi yang nyata. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Stogdill dalam (Kartono K., 2002) bahwa kepemimpinan atau *leadership* merupakan proses mempengaruhi kegiatan-

kegiatan kelompok yang terorganisir dalam usaha-usaha menentukan tujuan dan mencapainya. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartono D. K., 2008)

Kemampuan dan kecakapan seorang pemimpin desa mutlak diperlukan dalam upaya peningkatan perekonomian desa yang salah satu usahanya berupa pembentukan BUMDesa. Kecakapan dimaksud diuraikan melalui hasil penelitian Keith Davis yang menyebutkan empat sifat umum yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu:

1. Kecerdasan, hasil penelitian pada umumnya membuktikan bahwa kepemimpinan mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan yang dipimpin. Namun pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya,
2. Kedewasaan dan keluwesan hubungan sosial, para pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial dan mempunyai keinginan menghargai dan dihargai,
3. Motivasi dan dorongan berprestasi, para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi dan berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan dari ekstrinsik,
4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan para pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mau berpihak kepadanya. (Kusumawati, 2015)

Kualitas dasar seperti yang telah diuraikan di atas tercermin dari sikap

kepemimpinan Kepala Desa Dlingo. Pendirian Desamart merupakan ide inovatif dari Kepala Desa yang dengan cepat direspon oleh direktur serta didukung oleh manajer unit. Unit usaha tersebut kemudian berkembang berbarengan dengan tumbuhnya jenis-jenis usaha baru dalam payung BUMDesa Dlingo Giritama seperti restoran bernama Bale Ketebu serta air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. Selain itu BUMDesa juga menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan seperti pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDesa, dan barang sewaan lainnya

Keluwasan dalam hubungan sosial juga tampaknya menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan BUMDesa Dlingo. BUMDesa Dlingo Giritama dapat dikategorikan sebagai BUMDesa yang telah mampu berkembang, namun tampaknya tujuan BUMDesa Dlingo bukan hanya sekedar dapat maju sendiri, tetapi lebih daripada itu ingin berkembang maju bersama desa sekitarnya. Kepala Desa Dlingo menyadari adanya faktor penghambat kemajuan BUMDesa adalah faktor kepemimpinan. Untuk itu, Desa Dlingo menginisiasi adanya Forum Penggiat Desa. Secara rutin, Kepala Desa Dlingo aktif dalam komunitas pemerhati desa yang membantu desa-desa sekitar dalam mengembangkan desanya melalui sharing pengalaman dengan desa-desa lain di sekitar wilayah Desa Dlingo. Langkah ini dinilai efektif membantu BUMDesa-BUMDesa secara masif untuk maju bersama dengan BUMDesa yang telah unggul terlebih dahulu

Sedangkan dorongan motivasi pada usaha BUMDesa ditunjukkan oleh Kepala Desa Dlingo melalui upayanya dalam merintis pendirian BUMDesa. Pada tahap awal, BUMDesa menyelenggarakan pelatihan bagi usaha kecil, khususnya warung-warung kelontong yang berada di lingkungan Desa Dlingo. Namun upaya ini tidak selalu mulus. Hambatan justru datang dari stigma negatif masyarakat, dimana

mereka beranggapan dengan tersedianya barang kebutuhan sehari-hari di Desamart, otomatis masyarakat lebih memilih membeli di Desamart daripada di warung. Lambat laun, Desamart dianggap akan segera mematikan usaha kecil masyarakat yang sudah ada terlebih dahulu.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Kepala Desa dan pelaksana operasional BUMDesa mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat dan menguatkan konsep usaha melalui perencanaan dan pengembangan usaha yang baik. Desamart sendiri dibuat dengan model inovasi yang mendekatkan potensi masyarakat seperti menampung produksi masyarakat untuk dipasarkan melalui BUMDesa tanpa dipungut biaya jasa penitipan. Selain itu dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, Desamart bekerja sama dengan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog dalam pendistribusian minyak, beras dan gula pasir. Dengan sistem kerja sama seperti ini bahan pokok, terutama ketiga komoditas di atas, mempunyai harga jual yang lebih rendah daripada toko-toko lain yang sejenis.

Pelaksana Operasional BUMDesa juga membuktikan keberpihakan terhadap karyawannya yang didominasi warga desa Dlingo melalui sistem insentif. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pemberian insentif tersebut dituangkan dalam AD/ART BUMDesa Giritama yang menyebutkan adanya pembagian sisa hasil usaha sebesar 55 persen kepada seluruh karyawan apabila BUMDesa memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen penghargaan dari manajemen terhadap pencapaian hasil usaha bersama.

Kepemimpinan merupakan hal yang tak kasat mata sehingga kepemimpinan merupakan fenomena yang sangat kompleks (Wiriadihardja, 1987). Kemampuan efektif kepemimpinan memerlukan proses pengembangan yang terus-menerus berkesinambungan, ditanam, dirintis, dan

dibina sepanjang masa. Pernyataan ini memperjelas posisi pemimpin, selain harus mempunyai dasar kepemimpinan juga harus disertai dengan pengalaman dan budaya kerja yang mendukung di lingkungan kerjanya.

Secara struktur pemimpin BUMDesa adalah pelaksana operasional yang sering disebut sebagai manajer atau direktur BUMDesa. Tetapi dari hasil lapang pada penelitian terdahulu (Purbantara, 2017) di beberapa BUMDesa, Kepala Desa yang secara *ex-officio* berkedudukan sebagai penasihat turut berkontribusi dalam kepemimpinan BUMDesa. Bahkan yang ditemukan pada beberapa kasus, untuk mengatasi permasalahan kurangnya kapasitas SDM di masyarakat maka kepala desa memilih orang-orang dekatnya untuk mengurus BUMDesa. Hal ini untuk memudahkan kepala desa untuk berkoordinasi dalam mengembangkan BUMDesa.

Kepala Desa Dlingo merupakan salah satu motor penggerak keberhasilan BUMDesa Dlingo Giritama. Kepala Desa berkelahiran tahun 1973 ini memenangkan Pilurdes (Pemilihan Lurah Desa) pada tahun 2012 dengan rencana konsep dan program kerja ingin memajukan sekaligus mewujudkan Desa Dlingo menjadi sebuah desa yang mandiri dan sejahtera. Cara yang dipilih oleh Kepala Desa adalah menggali potensi ekonomi lokal yang ada di setiap pedukuhan dengan bahu membahu dan gotong royong seluruh desa.

Saat dilantik sebagai Kepala Desa, Kepala Desa Dlingo tersebut berprofesi sebagai penjahit dan pernah bekerja di industri kertas Indah Kiat Pulp and Paper C, Serang. Keberhasilannya dalam memenangkan suara di pemilihan kepala desa berkat keseriusannya berorganisasi. Tercatat Kepala Desa Dlingo sebelumnya telah aktif di dunia organisasi sebagai ketua remaja masjid Taqoruub Pakis, Ketua Sub Karang Taruna Pakis I dan II, ketua badan koordinai TKA-TPA Kecamatan Dlingo, Anggota Sie Bina

Mental Karang Taruna Kecamatan Dlingo, Petugas sensus penduduk, Ketua II LPMD Desa Dlingo, KPMD PNPM-MP Desa Dlingo, TPK PNPM-MP Desa Dlingo, TPK JRF Desa Dlingo, KPMD Teknik PNPM-MP Desa Dlingo, Koordinator bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Dlingo, Pembina KWT Pakis, Manager LKM –APUAP Gapoktan Subur Desa Dlingo, Sekretaris PS Dlingo Putra, Anggota tim pelatih masyarakat (TPM) Ruang Belajar Masyarakat PNPM. Berbagai pengalaman berorganisasi tersebut selain mengasah jiwa kepemimpinannya juga meningkatkan komunikasi dan relasi dalam beragam perbedaan komunitas.

Untuk menjadikan Dlingo seperti visi yang diharapkan, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Dlingo melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial menuju Dlingo Girioloji Sejahtera dan Mandiri, tidak mudah. Terlebih pada awal pelantikan, Dlingo dikenal sebagai desa dengan persentase penduduk miskin paling banyak di Kabupaten Bantul (Kumparan, 2018). Mata pencaharian utama masyarakat Desa Dlingo adalah buruh ke kota selain sebagai buruh dari usaha mebel dan kayu. Sedangkan ibu-ibu mempunyai usaha sampingan skala rumah tangga dengan membuka toko kelontong serta merintis usaha pembuatan makanan ringan berbahan lokal. Tetapi usaha industri makanan ringan yang dikelola terkendala masalah pemasaran seperti belum mampu menembus pasar swalayan berjejaring maupun pasar di luar Desa Dlingo.

Hal pertama yang dilakukan Kepala Desa paska pelantikan adalah melakukan pendataan ulang tingkat perekonomian warga desanya. Kemudian Kepala Desa sebagai ketua penggiat desa menyarankan warga desa membentuk Komunitas Warung Kelontong dan Supplier dengan ragam kegiatan yang sangat variatif seperti diskusi dan pelatihan secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas produk, manajemen juga pemasaran. Pelatihan yang dilakukan biasanya tergantung dari spesifikasi usaha dan

sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha masing-masing. Seperti pelatihan untuk warung kelontong yang dibedakan dengan pelatihan untuk tingkat supplier. Warung kelontong mendapatkan pelatihan mengenai manajemen yang baik, sedangkan pelatihan di tingkat supplier meliputi pengemasan dan pemasaran produk. Kemudian, demi memiliki konsep modern warung-warung ini pun diberi pembekalan mengenai bagaimana menata barang, menyimpan barang, dan memilih barang yang laku dijual. Selain itu salah satu hal yang tidak dilupakan oleh pengurus komunitas adalah memberikan pelatihan yang berkenaan dengan izin PIRT dari dinas kesehatan terkait dengan higienitas produk dan tempat berproduksi.

Pengelola BUMDesa Dlingo Giritama periode 2017 dipimpin oleh Kusmiyanto, Siti Astuti sebagai sekretaris dan Sri Winarsi yang duduk sebagai bendahara. Latar belakang pendidikan para pengelola BUMDesa Dlingo Giritama rata-rata setingkat dengan SLTA. Alasan pemilihan standart pendidikan harus setingkat dengan SLTA ini dipersyaratkan oleh Kepala Desa selain usia yang masih muda dan aktif berorganisasi. Berdasarkan Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, alasan ini dibenarkan karena diharapkan kompetensi lulusan SLTA telah memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Hal ini relevan dengan kebutuhan dari pengelolaan BUMDesa yang harus memiliki inovasi usaha dan bekerja sama dengan pengelola lain sebagai tim.

Pra syarat menjadi pemimpin yang sukses adalah dukungan dari tim kerja yang kompak dan solid. Pilihan latar belakang pendidikan tersebut diharapkan mampu mengimbangi kinerja BUMDesa yang sedang merintis dari awal, membutuhkan kerja keras dan semangat kerja yang tinggi. Kepala Desa dalam kapasitasnya sebagai penasihat berperan dalam membangun

jejaring dengan pihak di luar BUMDesa serta memberikan alternatif pilihan ide-ide inovatif serta jenis usaha yang bisa dikembangkan juga *mensupport* kerja manajerial dalam rangka pengembangan BUMDesa.

C. Gaya Kepemimpinan

Setiap pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena pengaruh sifat dasar yang dimiliki maupun latar belakang kehidupan masing-masing. Karakteristik ini menimbulkan gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dia inginkan. Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki (Julyyana, 2015)

Latar belakang Kepala Desa Dlingo yang aktif di dunia organisasi membuat Kepala Desa mampu membuat pemetaan potensi dan kelemahan warganya dengan cepat. Salah satu yang dimanfaatkan oleh Kepala Desa adalah kekuatan jaringan kepemudaan. Pada saat Kepala Desa dilantik, Desa Dlingo belum mempunyai wadah organisasi untuk menampung kegiatan kepemudaan. Kepala Desa menginisiasi pembentukan SANDIGITA (Sasana Anak Muda Dlingo Giriloji Pecinta Teknologi). Awalnya pembentukan komunitas ini ditujukan sebagai sarana mengembangkan melalui radio komunitas. Kemudian seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan penyebaran informasi ke masyarakat dan pengenalan teknologi dalam pengelolaan desa, maka Desa Dlingo kemudian mengembangkan konsep *The Smart Culture Village* yang bertujuan mensosialisasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa melalui aplikasi Sandigita IT yang dapat diunduh melalui playstore android maupun IOS. Hingga

akhir Desember 2017 sudah ada sekitar 100 pengguna android yang mengunduh aplikasi Sandigita IT tersebut (Belawati, 2018). Rencana ke depan, Sandigita ini akan diakuisisi menjadi unit usaha BUMDesa.

Thoha (Thoha, 1991) menjelaskan perilaku gaya dasar kepemimpinan dalam mengambil keputusan terbagi atas empat gaya kepemimpinan, yaitu: Instruksi, Konsultatif, Partisipatif, dan Delegatif.

1. Instruksi

Perilaku pemimpin dicirikan oleh tingginya pengarahan dan rendahnya dukungan, komunikasi satu arah, pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan memberitahu mereka tentang mekanisme pelaksanaan berbagai tugas, inisiatif pemecahan masalah dan proses pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin.

2. Konsultatif

Pemimpin dengan gaya konsultatif dicirikan oleh tingginya pengarahan dan tingginya dukungan, masih banyak memberikan pengarahan dalam pengambilan keputusan, tetapi diikuti dengan meningkatkan banyaknya komunikasi dua arah dan perilaku mendukung, dengan mendengar perasaan pengikut, baik berupa ide maupun saran mereka tentang keputusan yang dibuat. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin.

3. Partisipatif

Dicirikan oleh pemimpin yang rendah pengarahan, dalam hal ini posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Selain itu, pemimpin dan pengikut saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Komunikasi dua arah ditingkatkan

dan peranan pemimpin adalah aktif mendengar. Tanggung jawab dan pembuatan keputusan sebagian besar berada pada pihak pengikut.

4. Delegatif

Ciri pemimpin dengan perilaku yang mendiskusikan masalah bersama-sama dengan bawahan, sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses pembuatan didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahan. Bawahan memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi bawahan untuk melaksanakan pertunjukkan mereka sendiri, karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab dalam pengarahan perilaku mereka sendiri.

Berdirinya komunitas Sandigita merupakan salah satu cerminan dari perilaku Kepala Desa Dlingo yang awalnya bersifat konsultatif bergeser menjadi partisipatif. Pada awal pendirian Sandigita, Kepala Desa cenderung banyak mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan berdasarkan pengalaman dan tujuan yang hendak dicapai oleh komunitas, meskipun pengendalian atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. Kepala Desa Dlingo, berdasarkan pengakuan dari komunitas Sandigita sering menelurkan ide-ide kreatif yang belum terpikirkan oleh orang lain. Beberapa kali ketika ide dilontarkan, tidak jarang beberapa orang akan sangsi atas keberhasilan program tersebut. Namun seiring waktu, banyak ide-ide rintisan berdasarkan ide Kepala Desa berhasil dijalankan dengan baik. Bahkan, beberapa usaha telah berhasil seperti Desamart dan Sandigita mempunyai nilai manfaat yang lebih untuk masyarakat.

Setelah usaha rintisan tersebut dinilai berjalan, peran Kepala Desa akan semakin dikurangi. Posisi kontrol atas pemecahan

masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian antara Kepala Desa yang memiliki ide dan pengurus komunitas Sandigita yang melaksanakan. Ketika komunikasi dua arah semakin ditingkatkan maka peranan Kepala Desa cenderung aktif mendengar dan memberikan alternatif pemecahan masalah jika dirasakan menemukan jalan buntu atau masalah yang menghambat kinerja. Meskipun demikian, tanggung jawab dan pembuatan keputusan sebagian besar sudah berada pada pihak pengurus komunitas Sandigita. Bahkan pada tahun kedua pembentukan komunitas, pengurus komunitas Sandigita telah mengambil alih hampir semua tanggung jawab pelaksanaan.

Berbeda dengan Thoha, Lewin dalam Goldberg dan Larson (Sholihah, 2015) memperkenalkan tiga gaya kepemimpinan sebagai berikut:

1. Otoriter atau *autocratic leadership* yaitu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya. Gaya kepemimpinan ini sering disebut sebagai gaya diktator karena sangat memaksakan dan mendesak kekuasaan pada bawahan.

Ciri yang termasuk gaya otoriter diantaranya: (1) pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak; (2) pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut; (3) pemimpin terpisah dari kelompok seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok tersebut.

2. Demokratis atau *democratic leadership* merupakan gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.

Cara-cara demokratis ini dilakukan dengan: (1) secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok, serta cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; (2) pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk; (3) ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikut; (4) pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan kelompok.

3. *Laissez-faire* merupakan gaya kepemimpinan yang seratus persen menyerahkan sepenuhnya, seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya. Kepemimpinan *Laissez faire* pada dasarnya menunjukkan suatu pola pengabaian yakni pemimpin yang dipilih atau tokoh yang berwenang dalam suatu kelompok berusaha menghindari suatu tanggung jawab terhadap pengikutnya.

Ciri-ciri kepemimpinan ini adalah: (1) pemimpin menjalankan perannya secara pasif; (2) penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok; (3) pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok; (4) pemimpin berada di tengah-tengah kelompok, namun hanya berperan sebagai penonton.

Pada gaya kepemimpinan seperti yang diungkapkan Lewin tersebut di atas, Kepala Desa Dlingo menempati posisi gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya kepemimpinan tersebut menitikberatkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Cara-cara demokratis ini dilakukan dengan: (1) pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara Kepala Desa dan masyarakat. Baik dalam merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh

BUMDesa, jenis usaha yang akan dilakukan, serta cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk validitas data, Kepala Desa melakukan pendataan ulang permasalahan desa untuk memberikan input yang baik bagi pengambilan kebijakan ke depan; (2) Kepala Desa Dlingo secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk dalam perkembangan BUMDesa. Ketika Kepala Desa aktif dalam Forum Penggiat Komunitas Desa, Kepala Desa tidak hanya memberikan saran untuk peningkatan kesejahteraan Desa Dlingo tetapi juga desa-desa sekitar agar maju secara bersama-sama; (3) ada kritik positif yang membangun juga merupakan parameter yang baik bagi gaya kepemimpinan yang demokratis. Kepala Desa Dlingo memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran serta masukan bagi kebijakan yang diambilnya. Meskipun tidak jarang terdapat perbedaan pandangan dalam bersikap, namun semua dapat diselesaikan dengan baik berkat komunikasi yang dibangun; (4) Kepala Desa secara aktif ikut berpartisipasi langsung di dalam kegiatan-kegiatan BUMDesa dan kegiatan lain yang berpotensi mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi desa.

Gaya kepemimpinan yang demokratis tersebut meningkatkan kompetensi pengelola BUMDesa secara keseluruhan. Kurangnya kompetensi SDM pengelola BUMDesa yang selama ini dirasakan di BUMDesa Dlingo dapat diatasi melalui manajemen pengembangan berbasis komunikasi efektif antara pimpinan dan pelaksana operasional. Dengan adanya kepercayaan dari pimpinan, akan mempertinggi kualitas kerja yang berujung pada keuntungan organisasi.

D. Kewenangan Kepala Desa dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dijelaskan dalam Undang-undang Desa bahwa Kepala Desa mempunyai peranan

yang sangat penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Kewenangan kepala desa dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang diemban Kepala Desa terbagi menjadi empat hal, yaitu: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas urusan pemerintahan antara lain mengenai pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian UU Desa, bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa desa sebagai *self governing community* bersifat otonom atau mandiri. Bahkan daya jangkauan organisasi negara dengan cara struktural hanya sampai tingkat kecamatan saja. Sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang diserahkan pengaturan dan pembinaannya terhadap dinamika nasib dalam masyarakat sendiri dengan cara otonom. (Assiddiqie, 2005)

Benyamin Hoessin mengartikan otonomi desa sebagai otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Namun demikian, hakikat

local autonomy berbeda dengan kedaulatan, karena *local autonomy* adalah otonomi masyarakat setempat yang menyangkut berbagai urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas (Kushandajani, 2015). Dengan demikian, kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul beserta kewenangan lokal berskala desa atau yang sering disebut dengan asas rekoqnisi dan subsidiaritas seperti yang tercantum dalam UU Desa dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan aset dan potensi yang dimiliki. Dalam kaitannya dengan BUMDesa, rekoqnisi adalah kewenangan desa dalam memanfaatkan, mendukung, dan memperkuat desa, termasuk usaha ekonomi desa dengan tanpa intervensi dari paradesa dan struktur di atas desa. Sedangkan subsidiaritas merupakan kewenangan pemerintah desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDesa.

Meskipun nampaknya kewenangan desa untuk mengurus dirinya sendiri secara mandiri sangat besar, tetapi tetap tidak tak terbatas. Peran kepala desa di dalam kelembagaan BUMDesa lebih dititikberatkan hanya sebagai fasilitator untuk menciptakan proses yang mampu membangun ruang partisipasi bagi warga desa. Namun karena pembatasannya yang bias antara Kepala Desa sebagai pemimpin desa atau sebagai penasihat dalam kepengurusan BUMDesa, maka diperlukan media untuk memberikan pembatasan-pembatasan melalui regulasi.

Pembatasan kewenangan Kepala Desa diatur dalam Undang-undang Desa mengenai sanksi untuk Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi untuk Kepala Desa yang melanggar larangan. Kepala Desa memiliki dua puluh kewajiban, antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan

gender, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa serta mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Selain kewajiban, Kepala Desa juga memiliki larangan melakukan hal-hal seperti: merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

Undang-undang Desa mengatur banyak kewajiban dan larangan yang pada dasarnya yuridis dan diancam pidana dalam perundang-undangan lain (kedesa, 2016) seperti larangan menerima uang, barang, atau jasa dari pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya berkaitan dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ukuran atau parameter kewajiban dan larangan seperti yang telah diuraikan tersebut di atas tidak disebutkan dengan jelas.

Pada dasarnya pembatasan kewenangan Kepala Desa diperlukan pengaturannya untuk meminimalisir adanya pemusatan kekuasaan yang berakibat pada kesewenang-wenangan. Jika diandaikan sebuah desa sebagai miniatur negara seperti yang tercantum dalam Naskah Akademis RUU Desa, dikarenakan Pemerintahan Desa mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana layaknya sebuah negara. Maka konsep-konsep pembagian kekuasaan seperti yang diungkapkan oleh para tokoh kenegaraan, seperti John Locke dan Montesquieu dapat diterapkan.

John Locke dan Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan federatif menurut John Locke atau yudikatif berdasarkan pendapat Montesquieu. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan

semua orang dan badan-badan di luar negeri. Sedangkan Montesquieu mengartikan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan federatif merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang tidak dapat dipisahkan (Sunarto, 2016). Ketiga jenis kekuasaan tersebut kemudian dikenal sebagai teori yang sangat populer yaitu *Trias Politica*

Dalam perkembangannya, ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak selamanya akan dapat bekerja secara eksklusif, bahkan saling mengisi dan bersinggungan. Agar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bekerja secara seimbang dan saling mengontrol maka berlakukan prinsip *check and balances*. Dengan prinsip ini kekuasaan dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya. Sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi (Assiddiqie, 2005).

Pada Pemerintah Desa, Kepala Desa mewakili cabang kekuasaan eksekutif. Selain itu di desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang pembentukannya bertujuan sebagai sarana demokratisasi di desa dan difungsikan sebagai pengontrol dari kinerja Kepala Desa dan perangkatnya dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah desa. Peran BPD yang semula hanya sebagai lembaga legislatif ini berkembang sekaligus menjadi lembaga yudikatif yang merupakan representasi dari perwakilan masyarakat desa. Pergeseran paradigma desa membangun yang diusung oleh UU Desa No. 6 Tahun 2014 membawa pergeseran makna masyarakat desa tidak lagi diperlakukan sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Sehingga BPD mempunyai kepentingan menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus melakukan

pengawasan dalam upaya melindungi diri dari kebijakan yang dianggap merugikan.

Berkaitan dengan perkembangan BUMDesa sebagai sebuah lembaga profesional, peran kepala desa adalah mendorong terciptanya BUMDesa sebagai lembaga yang mampu secara profesional mengelola seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik. Maka Kepala Desa hanya mempunyai kewenangan sebatas sebagai penasihat dalam mengawal berjalannya usaha BUMDesa. Kedudukan BPD sebagai perwakilan dari seluruh pemilik modal BUMDesa, yaitu masyarakat desa, harus mampu menyeimbangkan kekuasaan elit desa yang biasanya cenderung mendominasi arah tujuan BUMDesa.

Keterlibatan peran Kepala Desa Dlingo diawal pembentukan BUMDesa memang mendominasi. Hal ini lebih dikarenakan kurangnya kapasitas SDM di Desa Dlingo. Namun peran ini juga tidak memakan waktu yang terlalu lama, hanya sampai pada proses pendirian dan penentuan jenis usaha yang menjadi masa-masa rawan dalam proses pendirian BUMDesa. Kepala Desa Dlingo mengakui kapasitasnya hanya sebagai pengungkit semangat kewirausahaan di kalangan pemuda Desa Dlingo, yang saat itu memang belum terbentuk kelembagaannya. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa selalu melibatkan fungsi kontrol BPD dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan BUMDesa. Agar nantinya BPD benar-benar mampu berfungsi sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan Kepala Desa sehingga Kepala Desa tidak lagi menjadi pusat kekuasaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa hal yang dapat digarisbawahi dari kepemimpinan Kepala Desa Dlingo dalam pengembangan BUMDesa Dlingo Giritama, Kabupaten Bantul, Yogyakarta karena dipengaruhi oleh sifat umum

kepemimpinan, yaitu *Pertama* Kepala Desa mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan yang dipimpin. *Kedua*, pemimpin memiliki kedewasaan dan keluwasan dalam hubungan sosial, tidak hanya dalam kepemimpinan di desa tetapi juga dengan desa-desa sekitar. *Ketiga*, pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi sehingga memacu diri dan warganya untuk melakukan yang terbaik bagi desa. Keempat, pemimpin menunjukkan sikap-sikap hubungan kemanusiaan yang ditandai melalui keberpihakan terhadap karyawannya, diantaranya diupayakan melalui komitmen penghargaan dari manajemen terhadap pencapaian hasil usaha bersama secara nyata.

Selain itu perilaku gaya dasar kepemimpinan yang mendominasi termasuk dalam kategorisasi partisipatif. Hal ini ditandai dengan pemimpin dan pengikut saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Kepemimpinan tersebut lebih menitikberatkan pada gaya demokratis atau *democratic leadership* yang terfokus pada kemampuan untuk menciptakan moral dan kepercayaan. Kombinasi dari sifat umum kepemimpinan yang dimiliki oleh Kepala Desa disertai dengan perilaku gaya dasar kepemimpinan yang partisipatif dan menitikberatkan pada gaya demokratis tersebut membantu BUMDesa Dlingo lebih cepat berkembang dari pada BUMDesa di desa-desa lain.

Fungsi kontroling di desa Dlingo yang seharusnya berada dalam kewenangan BPD, belum sepenuhnya dilaksanakan. BPD diharapkan mampu berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa sekaligus sebagai penyeimbang kekuasaan Kepala Desa sehingga Kepala Desa tidak lagi menjadi pusat kekuasaan. Ke depan, Kepala Desa diharapkan hanya mempunyai kewenangan sebatas sebagai penasihat dalam mengawal berjalannya usaha BUMDesa.

Salah satu cara agar peran Kepala Desa dalam pengembangan BUMDesa menjadi jelas adalah dengan melahirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai aturan main yang harus ditaati bersama oleh seluruh bagian yang bekerja dan berkaitan dengan lembaga BUMDesa. SOP ini yang akan menjadi pedoman penjas bagi peran masing-masing pihak dalam mengelola BUMDesa.

Selain itu penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kedudukan dan perannya sebagai lembaga legislatif sekaligus lembaga yudikatif yang mempunyai kepentingan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan dalam upaya melindungi diri dari kebijakan yang dianggap merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Belawati, T. (September 10). *Aplikasi Sandigita IT Mendukung Konsep The Smart Culture Village*. Diambil kembali dari Newslab Situs Warta Atma Jaya: <http://newslab.uajy.ac.id/2017/12/07/3239/>
- Berdesa. (2017, Oktober). *Desa Dlingo, Dari Tertinggal Menjadi Terdepan*. Diambil kembali dari www.berdesa.com › Berita Desa
- BUMDes Academy. (2017, Desember 28). *BUMDes Academy. dari BUM Desa*: <http://www.berdesa.com/kenapa-pengurus-bumdes-banyak-rangkap-jabatan/>
- J.Lexy, M. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset.

- Julyyana, N. (2015). *Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dengan Kapasitas Petani Jambu Kristal Mitra Agribussines Development Center*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Kartono, D. K. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Jakarta Pers.
- Kartono, K. (2002). *Psikologi Sosial Untuk Manajemen, Perusahaan dan Industri*. Jakarta: PPN Press.
- Kedesa. (2016, Juni 14). *kedesa.id. dari Sanksi Kepala Desa*: http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desadan-
- Kumparan. *Desa Mart, BUM Des Andalan Desa-Desa di Bantul*. dari <https://m.kumparan.com>
- Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Vol 4 No.2 Mei-Agustus* , 372.
- Kusumawati, A. R. (2015). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mayu, W. I. (2016). Faktor-Faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Vol 3 No 2* , 1-11.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7)* (Edina T. Sofia, Penerjemah). Jakarta: PT. Indeks.
- Nusa Kini. (2017). *Indonesia Telah Miliki 32.249 Badan Usaha Milik Desa*. dari nusakini news: <https://nusakini.com/news/indonesia-telah-miliki-32249-badan-usaha-milik-desa>
- Purbantara, A. (2017). *Kajian Pengembangan Kapasitas Untuk Keberhasilan BUMDes*. Jakarta: Watinsa.
- Putra, F. P. (2016). *Budaya Kerja dan Kepemimpinan dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rofiq, A. (2017). *Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Bumi Dewandaro Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen*. Depok: Paskasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Sholihah, Y. (2015). *Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Status Desa*. Bogor: Intitut Pertanian Bogor.
- Sunarto. (2016). Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum Jilid 43 No 2* , 157-163.
- Thoha, M. (1991). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiriadihardja, M. (1987). *Dimensi Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Balai Pustaka.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KAWASAN TRANSMIGRASI RAMBUTAN PARIT

COMMUNITY DEVELOPMENT IN RAMBUTAN PARIT TRANSMIGRATION AREA

Widarjanto dan Dwi Istiqomah

Pusat Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
Jln. TMP. Kalibata No. 17, Jakarta, 12750 Telepon/Faks. (021) 7971010
Email: anto3369@yahoo.com ; dwi19fatah@gmail.com

Abstrak

Pengembangan masyarakat memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan kawasan transmigrasi, tetapi dalam implementasi pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) masih dominan pembangunan fisik prasarana sarana. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat di KTM Rambutan Parit. Penelitian dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan melihat hubungan gejala yang bersifat interaktif. Lokasi penelitian di KTM Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Analisis penelitian menggunakan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat sesuai konsep Ife dan Tesoriero. Pengembangan masyarakat di KTM Rambutan Parit sudah menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat seperti perencanaan, pemenuhan HAM, intervensi pemerintah, pendamping, partisipasi, membangun komunitas, dan keberlanjutan, tetapi belum optimal dan belum menyertakan proses pemberdayaan, sehingga belum menciptakan kemandirian dan keberlanjutan. Pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Kelembagaan ekonomi dan sosial yang dikembangkan mempermudah kontrol pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan pelaksanaan. Kelembagaan dapat mendorong terjadinya dinamika sistem atau proses seperti interaksi yang intensif, harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi masyarakat transmigrasi.

Abstract

Community development has a strategic position in the development of transmigration areas. However, in the implementation of Self-sufficient Integrated City (SIC) development was still dominant physical development of infrastructure facilities. Therefore, the purpose of this research was to analyze the implementation of community development principles in SIC Rambutan Parit. The study was conducted through a qualitative approach considered the social reality as something holistic, complex, dynamic, full of meaning and observe the relationship of interactive symptoms. The research was conducted in Rambutan Parit SIC, Ogan Ilir Regency, and South Sumatera Province, using the community development principles analysis according to the concept of Ife and Tesoriero. Community development in SIC Rambutan Parit has implemented community development principles such as planning, human rights compliance, government intervention, facilitator, participation, community building and sustainability, but not yet optimal and include the empowerment process, so it has not created self-sufficient and sustainability. Community development was carried out through community-based and regional-based institutions. The economic and social institutions that were developed facilitate control of decision-making, policies, programs, and implementation. Institutions could encourage the dynamics system or process such as intensive interaction, harmonization, tolerance, collective activities, and transmigration communities participation. management; and 3) business network development

Kata Kunci:

pengembangan masyarakat, transmigrasi, Kota Terpadu Mandiri.

Keywords:

Community Development, Transmigration, Self-sufficient Integrated City

I. PENDAHULUAN

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menyebutkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sasaran meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan transmigrasi tidak hanya mencakup pembangunan kawasan atau permukiman transmigrasi, akan tetapi juga melingkupi bagaimana pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut. Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam memenuhi seluruh hajat hidup transmigran, baik bagi diri dan keluarganya maupun bagi pengembangan generasi penerusnya. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditujukan kepada transmigran dan keluarganya, tetapi juga kepada masyarakat yang berada di sekitar permukiman transmigrasi. Untuk itu perlu kepastian adanya lapangan kerja dan usaha serta permukiman yang layak untuk bekerja. Pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi sengaja ditata oleh pemerintah agar sejalan dengan kepentingan penduduk dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan cara melakukan perpindahan

penduduk dan menetap di lokasi yang baru. Penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya merupakan pengembangan masyarakat yang merupakan usaha untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam serta sumberdaya lain, seperti modal, manajemen dan teknologi yang belum didayagunakan secara optimal. Pemanfaatan potensi sumberdaya itu perlu disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan agar pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Paradigma baru dalam peningkatan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar diaktualisasikan melalui pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Pengembangan KTM bertujuan untuk mempercepat pusat-pusat pertumbuhan baru sekaligus mewujudkan integrasi sosial menuju kesejahteraan sosial. Pembangunan KTM bersifat lintas sektor, mengintegrasikan pembangunan sosial dan ekonomi serta melibatkan peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Permasalahan mendasar dari model percepatan pengembangan masyarakat di KTM ini adalah pembangunan prasarana dan sarana fisik yang tidak serta merta dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan integrasi sosial sebagaimana yang diharapkan. Perwujudan pengembangan masyarakat di KTM seperti tercapainya perilaku masyarakat yang produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan dan berpikiran modern menuju masyarakat madani belum terbentuk. Upaya untuk mendukung pewujudan wilayah pusat pertumbuhan selain diperlukan berbagai agenda untuk melakukan perubahan yang bersifat fisik spasial, seperti penetapan tata ruang, pembangunan permukiman, serta penyediaan sarana industri dan jasa yang berkaitan dengan pertanian, juga diperlukan perubahan sikap dan cara pikir masyarakat transmigrasi dari tradisional menuju modern (Najiyati dkk, 2008).

Permasalahan penelitian yang akan dibahas adalah pembangunan KTM selama ini terlihat bias fisik prasarana sarana dan belum menyentuh pengembangan masyarakat, dominasi pembangunan *top down* dan peran pemerintah

masih dominan, partisipasi masyarakat dan non pemerintah dalam pembangunan transmigrasi belum terlihat. Akibatnya, terjadi permasalahan sosial seperti gesekan antara transmigran dan penduduk setempat, pendapatan transmigran masih rendah dibandingkan penduduk sekitar, serta kemandirian individu dan kelompok transmigran belum terbentuk. Dari fenomena permasalahan yang muncul terjadi kemampuan membangun yang berbeda antara transmigran dan penduduk sekitar di kawasan transmigrasi. Apabila hal ini berlanjut mengakibatkan kesenjangan pembangunan dan membahayakan keberlanjutan pengembangan masyarakat transmigrasi karena akan memicu konflik sosial. Dalam rangka percepatan kondisi yang memungkinkan terjadinya keseimbangan antara pengembangan masyarakat transmigrasi dan pengembangan ekonomi guna menghindari ketidakstabilan kondisi sosial, diperlukan satu intervensi tentang bagaimana prinsip-prinsip pengembangan masyarakat digunakan dalam pengembangan KTM. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi.

II. METODE

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan melihat hubungan gejala yang bersifat interaktif (Sugiyono, 2011). Lokasi yang menjadi fokus penelitian pada studi ini adalah di kawasan KTM Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih pertimbangan terdapat *permukiman* transmigrasi pola tanaman pangan yang mendapat program akselerasi pengembangan masyarakat transmigrasi dengan asumsi transmigran telah beradaptasi dengan lingkungan sekitar termasuk penduduk sekitarnya. Tipologi kawasan untuk analisis terbagi menjadi dua yaitu di pusat KTM, dan kawasan perdesaan.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Penentuan informan dengan metode ini adalah sebuah strategi yang baik untuk mendapatkan kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan sampel yang dibutuhkan, dengan kriteria paling tahu tentang apa yang diharapkan, dan memudahkan dalam menjelajahi situasi sosial (Sugiyono, 2012). Informan yang terpilih terdiri atas transmigran dan penduduk sekitar yang tinggal di kawasan KTM Rambutan Parit, tokoh formal dan informal masyarakat transmigrasi, *Stakeholder* seperti pedagang, pemilik usaha perdagangan, jasa atau industri, dan penampung hasil pertanian. serta aparat instansi terkait dan aparat pemerintah daerah.

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara (Rubin dan Babbie, 2008). Dilihat *settingnya*, data yang dikumpulkan berada pada *setting* alamiah, yaitu kawasan transmigrasi. Pengumpulan data berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang bersifat langsung diperoleh dari lapang. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya dari teknik pengumpulan data dapat dilakukan observasi partisipatif, wawancara/*interview* mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan dokumentasi.

Analisis pelaksanaan pengembangan masyarakat menggunakan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat sesuai konsep Ite dan Tesoriero (2008), Zubaedi (2013), dan Nasdian (2014), yang antara satu dan lainnya saling berkaitan dan melengkapi. Prinsip-prinsip ini menjadi pertimbangan bagi keberhasilan program pengembangan masyarakat, yaitu perencanaan pengembangan masyarakat, pemenuhan HAM, ketidaktergantungan pada pemerintah, manajemen pengembangan masyarakat, pembangunan menyeluruh, keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat, partisipasi, membangun komunitas dan berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengembangan masyarakat di KTM Rambutan Parit terbagi di pusat KTM dan kawasan perdesaan (di desa-desa *hinterland* yang berfungsi sebagai kawasan penyangga). Analisis ini berisikan penggambaran pelaksanaan dan solusi yang muncul dalam pengembangan masyarakat oleh transmigran dan penduduk sekitar sebagai proses pembangunan berkelanjutan. Menurut Ife dan Tesoriero (2008), Zubaedi (2013), dan Nasdian (2014), terdapat prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang antara satu dan lainnya saling berkaitan dan melengkapi.

1. Program Pengembangan Masyarakat

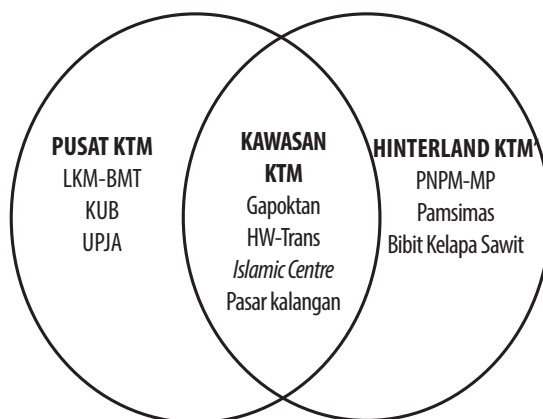
Program-program pengembangan masyarakat di pusat KTM dan permukiman transmigrasi (Kimtrans) yang merupakan kawasan penyangga (*hinterland* KTM) dan terletak di kawasan dapat dikategorikan pada bidang ekonomi dan sosial.

Tabel 1. Pengembangan Masyarakat di Pusat KTM dan Permukiman Transmigrasi

No	Pengembangan Masyarakat	Pusat KTM	Hinterland KTM	
		Kimtrans Rambutan SP I	Kimtrans Rambutan SP II	Kimtrans Rambutan SP III
1.	Ekonomi	a. Gapoktan b. Himpunan Wirausaha Trans c. Koperasi d. LKM BMT-Trans	a. Gapoktan b. LKM Rambutan Sejahtera c. KUBE d. UPJA	Belum berkembang
2.	Sosial	a. <i>Islamic Center</i> Hidayatul Mubtadi'ien b. Karang Taruna c. PKK d. Pengajian/yasinan	PKK dan Karang Taruna	PKK dan Karang Taruna

Sumber: Olahan Penelitian.

Pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di pusat KTM dilakukan melalui pendekatan kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dapat berupa kelembagaan yang akan berproses menjadi media atau sarana pembelajaran, sehingga dapat berinteraksi untuk saling berbagi pengalaman, dan meningkatkan kepercayaan diri serta jejaring mitra usaha. Sedangkan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di *hinterland* KTM umumnya berasal dari PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), pemberian bibit kepala sawit dan program mendukung pembangunan fisik. Berikut digambarkan program-program pengembangan masyarakat yang berlangsung di kawasan KTM Rambutan Parit, baik di pusat dan *hinterland*.



Gambar 1. Pengembangan Masyarakat Mewujudkan Integrasi Sosial

Program pengembangan masyarakat yang ada di KTM Rambutan Parit yang ada di pusat KTM meliputi LKM-BMT, KUB dan UPJA sedangkan program-program pengembangan masyarakat yang ada di *hinterland* KTM meliputi PNPM-MP, Pamsimas serta Bibit Kelapa Sawit. Selain program-program tersebut, terdapat juga program pengembangan masyarakat yang melingkupi seluruh kawasan baik pusat maupun *hinterland* KTM yakni Gapoktan, HW-Trans, *Islamic Centre* serta Pasar kalangan.

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

a. Perencanaan Pengembangan Masyarakat

Kebutuhan-kebutuhan pokok komunitas belum dihasilkan dari perencanaan partisipatif. Mekanisme perencanaan pengembangan masyarakat belum dapat menstimulir kebutuhan transmigran. Program yang direncanakan oleh pemerintah umumnya sesuai dengan pagu yang ada. Walaupun ada mekanisme keterlibatan transmigran, pemerintah seringkali kurang mempercayai pendapat masyarakat sepenuhnya. Akibatnya usulan dan partisipasi masyarakat yang telah disepakati bersama tidak masuk dalam program pengembangan masyarakat sehingga pelaksanaannya jauh dari harapan masyarakat. Keinginan atau partisipasi masyarakat belum dijadikan dasar dalam analisis kebutuhan pengembangan masyarakat, namun *representatif* dari kepentingan kementerian di level nasional.

Program pengembangan masyarakat yang diberikan sudah ditentukan dan direncanakan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan transmigran. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 32 pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, bahwa program-program pengembangan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumberdaya alam. Posisi transmigran menerima program ini dan melaksanakan dengan bimbingan dan fasilitasi dari pendamping yang telah ditentukan. Namun bukan berarti program dan bantuan pemerintah tidak boleh diterima, karena terkadang bantuan ini penting dalam memulai proses pengembangan masyarakat (Nasdian, 2014). Peran pemerintah sebagai sponsor pengembangan masyarakat dan respon dari pemerintah merupakan kebutuhan untuk mewujudkan dukungan pemerintah terhadap program

pengembangan masyarakat. Sifat sementara terhadap dukungan pemerintah seharusnya ditekankan, dan secara umum semakin besar masyarakat dapat berbuat tanpa dana pemerintah hal ini menjadi semakin baik. Program dari pemerintah dipandang sebagai faktor yang memperlancar strategi pengembangan partisipasi menuju pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai faktor yang meningkatkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Berkaitan dengan itu, isi program yang mencakup aturan main, pihak pemerintah, pihak pendamping, dan dana bantuan dianggap sebagai hal-hal yang baik dan menunjang kelancaran partisipasi masyarakat (Agusta, 2002).

Sedangkan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di desa-desa sekitar seperti PNPM-MP prosesnya telah melalui perencanaan yang partisipatoris. Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan orientasi dan pengamatan lapang terhadap identifikasi kebutuhan yang difasilitasi dan dijalankan oleh *community workers*. Dalam tahapan ini, terjadi proses aktif dan inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (oleh lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif (Nasdian, 2014). Hasil dari identifikasi kebutuhan dilakukan sosialisasi pada musyawarah desa untuk dipilih menjadi program prioritas dan direncanakan untuk dilakukan penetapan usulan dan anggarannya.

b. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengembangan masyarakat di KTM Rambutan Parit telah mengacu pada pemenuhan HAM. Pemenuhan HAM merupakan pemenuhan hak-hak dasar yang diperlukan oleh masyarakat seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam Batang Tubuh UUD 1945 pemenuhan HAM diaktualisasikan pada persamaan kedudukan warga negara dalam hukum

dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2), kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28), hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (Pasal 28), kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat 2), dan hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 31 ayat 1). Pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan disajikan pada Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Mendukung HAM

No	Aspek	Program Pengembangan Masyarakat
1	Ekonomi	Gapoktan, Himpunan Wirausaha Transmigrasi, Koperasi, LKM BMT-Trans, Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi, dan Pasar.
2	Sosial budaya	Karang Taruna, PKK, Puskesmas rawat inap, PAUD, rumah pintar, TK, SD, dan SMP.
3	Mental spiritual	Islamic Center Hidayatul Mubtadi'ien dan Pengajian/yasinan
4	Kelembagaan pemerintah	RT, RW, dan perangkat desa.
5	Pengelolaan SDA/ lingkungan	-
6	Politik	Pembentukan embrio desa

Sumber: Olahan Penelitian

c. Ketidaktergantungan pada Pemerintah

Program-program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di kawasan transmigrasi sangat terlihat jelas baik perencanaan dan proses pelaksanaannya. Tujuan utama intervensi pemerintah adalah distribusi kesejahteraan agar dapat lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan masyarakat cenderung menunggu program dari pemerintah dan intensitas aktivitasnya juga disesuaikan dengan siklus program tersebut. Ketika pemerintah mencoba terlibat dalam pengembangan masyarakat, mereka cenderung melakukannya dalam kerangka birokrasi tradisional yang melibatkan

komunikasi vertikal, pertanggungjawaban ke atas, pemaksaan kebijakan, dan mendorong keseragaman (Ife dan Tesoeriero, 2008). Pendekatan pengembangan masyarakat masih bernuansa direktif. Pada pendekatan ini, peran pemerintah lebih dominan untuk memberikan program pengembangan masyarakat dan pendanaannya. Dalam prakteknya, pemerintah belum bersedia sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan merumuskan kebutuhannya. Pemerintah sering terjebak pada keinginan untuk sesegera mungkin melihat hasil pengembangan secara fisik. Sementara itu, masyarakat dibebani target kemajuan yang sangat cepat tanpa memperhitungkan kemampuannya.

Program-program KTM Rambutan-Parit pada awalnya dari pemerintah, namun karena pemerintah memiliki keterbatasan tenaga, dana dan waktu maka masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi. Pemerintah masih memiliki kewenangan terkait kelayakan dan keberadaan program tersebut. Walaupun belum dapat dinamakan pengembangan masyarakat, tetapi pendekatan intervensi mengarah ke instruktif.

d. Manajemen Pengembangan Masyarakat

Program pengembangan masyarakat di kawasan KTM menyertakan kegiatan pendampingan. Pendamping di kawasan KTM dapat dikelompokkan menjadi pendamping teknis seperti pengelola KTM dan jajaran teknis lainnya, dan pendamping khusus yang sengaja disediakan bagi masyarakat transmigrasi sesuai dengan jenis pengembangan masyarakat yang dilakukan. Model pendampingan dalam program pengembangan masyarakat di KTM memiliki keterkaitan erat dengan proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Zubaedi (2013), bahwa pendamping itu sendiri yang terdiri atas para pekerja sosial, dan yang kedua adalah kelompok yang didampingi atau yang diberdayakan. Antara pendamping dan yang diberdayakan bersifat setara, timbal

balik dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan yang dihadapinya secara mandiri dan berkesinambungan.

Keberhasilan program pengembangan masyarakat salah satunya ditentukan oleh peran dan kinerja pendamping¹ di lapangan dan dilakukan dengan pendekatan pengorganisasian masyarakat. Masing-masing organisasi masyarakat mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jenis kelembagaan yang terdapat di KTM Rambutan Parit adalah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian seperti permodalan, produksi, dan pemasaran. Jenis lembaga ini antara lain: kelompok tani, Gapoktan, Koperasi, LKM BMT-Trans, dan HW-Trans. Selain itu ada lembaga kemasyarakatan lainnya seperti lembaga pendidikan (sekolah), rumah pintar, PAUD, SD, dan SMP, lembaga pelayanan kesehatan (Puskesmas), lembaga keamanan desa (siskamling), lembaga keagamaan (mental spiritual) seperti *Islamic Centre*, lembaga kepemudaan seperti karang taruna. Kelembagaan masyarakat ini merupakan kolaborasi dari interaksi sosial pada suatu komunitas untuk tujuan dan kepentingan bersama. Kelembagaan masyarakat merupakan wahana untuk pengembangan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan sebagai perekat yang dapat menyatukan antar warga melalui pengaturan struktur dan fungsi kelembagaan. Kelembagaan dapat menjadi media atau sarana pembelajaran, berinteraksi untuk saling berkomunikasi dan berbagi pengalaman, meningkatkan kepercayaan diri dan mitra usaha, serta sarana memupuk dan mengakses sumber modal. Dalam konteks ini, pengembangan masyarakat merupakan kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan (Zubaedi, 2013).

e. Pembangunan Menyeluruh

Pengembangan masyarakat transmigrasi sudah dilaksanakan secara terpadu, tidak berjalan secara parsial tetapi merupakan satu kesatuan proses pengembangan yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumberdaya alam. Aspek *ekonomi* meliputi terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan melalui peningkatan kemampuan produksi dan efisiensi secara terus-menerus. Aspek *sosial-budaya* menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar. Pengembangan masyarakat mencakup pemberian pelayanan berbagai fasilitas sosial di kawasan transmigrasi, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, kesenian, olah raga, pembinaan generasi muda, dan pemberdayaan perempuan. Aspek *mental spiritual* untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek *kelembagaan pemerintahan* untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan. Aspek *pengelolaan sumberdaya alam* untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengorganisasian masyarakat harus melihat permasalahan yang ada dalam masyarakat secara utuh dan tidak sepotong-sepotong, misalnya; hanya melihat aspek ekonomi saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek sehingga pengorganisasian yang dilaksanakan untuk mengatasi berbagai aspek dalam masyarakat. Kelembagaan ekonomi seperti Gapoktan, HW-Trans, Koperasi, dan LKM-BMT Trans serta kelembagaan sosial seperti *Islamic Centre*, karang taruna,

¹ Peran pendamping/pekerja pengembangan masyarakat adalah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi isu, masalah, dan kebutuhan sebagaimana apa yang dilihat sendiri menurut referensi ilmiah serta memfasilitasi munculnya upaya pemecahan secara bersama-sama terhadap isu, masalah, dan kebutuhan tersebut (Zubaedi, 2013).

PKK, majelis ta'lim, dan pengajian yasinan merupakan pendekatan menyeluruh dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan akan terhimpun menjadi kelembagaan ekonomi, sosial, dan lainnya (Nasdian, 2014). Interaksi antar warga berproses mewujudkan terjadinya integrasi sosial. Terjadinya integrasi sosial diakibatkan oleh sering bertemunya beberapa individu dalam komunitas pada suatu aktivitas yang sama. Aktivitas itu terjadi karena adanya program pengembangan masyarakat. Semakin sering terjadi interaksi sosial maka sering pula terjadi kesepahaman antar etnis yang berbeda. Kesepahaman terjadi karena dukungan rasa keadilan yang sama di kedua belah pihak, seperti mereka telah mempunyai kebutuhan dan tujuan yang sama, pekerjaan yang hampir sama, kondisi pendapatan yang hampir sama dan menikmati prasarana dan sarana desa yang hampir sama.

f. Keanekaragaman

Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara mendalam, diketahui bahwa kebutuhan masyarakat sangat beragam sesuai dengan potensi dan kondisi, dan permasalahan masyarakat. Prioritas pertama, mencakup pengembangan masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan ketrampilan teknis budidaya dan manajemen, pembentukan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan usaha.

Prioritas kedua mencakup pengembangan masyarakat untuk perbaikan prasarana dan sarana permukiman seperti perbaikan jalan desa dan jalan menuju lahan usahatani, sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih. Prioritas ketiga, berupa penyelesaian permasalahan lahan yang diokupasi, baik oleh perusahaan ataupun masyarakat. Untuk mewujudkan

keanekaragaman kebutuhan masyarakat, maka program pengembangan masyarakat juga berbeda. Program yang diberikan mencakup bidang ekonomi, sosial budaya, serta mental spiritual. Sedang bidang fisik (prasarana dan sarana) difasilitasi dengan program PNPM Mandiri dan Pamsimas.

g. Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa program pengembangan masyarakat di kawasan KTM belum bertujuan dan mengarah ke proses pemberdayaan masyarakat. Umumnya program berasal dari pemerintah, baik dari perencanaan, pelaksanaan yang terdiri dari pelatihan, pendampingan, dan pemberian stimulan modal usaha berupa peralatan usaha. Program dari pemerintah dilakukan dengan mengembangkan mobilisasi semu dimana transmigran diajak, dipersuasi, bahkan diperintah untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemberdayaan yang ada, ternyata tidak terjadi keberlanjutan. Metode pemberdayaan dilakukan dengan mengubah norma dan aturan kelembagaan secara cepat, yang biasanya dilaksanakan dengan sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan sarana yang dibutuhkan. Apabila norma dalam kelembagaan yang telah dibentuk dipaksakan untuk berubah secara cepat, maka proses pemberdayaan akan mengalami hambatan yang berakibat pada kegagalan. Selain itu, transmigran dan penduduk setempat belum terlibat dalam perencanaan dan penyusunan program pengembangan.

Program yang dilaksanakan masih menciptakan ketergantungan bagi transmigran dan penduduk sekitar. Walau sudah dikelola dengan manajemen modern, transmigran masih menganggap intervensi yang diberikan merupakan bantuan dan transmigran berhak atas bantuan itu, tanpa harus mengembalikan untuk digulirkan kepada yang lain (*charity*). Partisipasi masyarakat masih terbatas pada implementasi atau penerapan program, masyarakat belum dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus

menerima keputusan yang sudah diambil oleh Pemerintah. Program pengembangan yang dilaksanakan umumnya belum menyertakan pemberdayaan sebagai proses. Sebagian program berhenti setelah program dinyatakan selesai. Program tidak berlanjut dengan berbagai alasan dan belum menciptakan kemandirian serta keberlanjutannya. Indikasi tidak berlanjutnya program pengembangan adalah terjadinya ketegangan antara pendamping program dengan transmigran karena pendamping terlalu berorientasi pada target, sementara pemberdayaan masyarakat berjalan gradual sesuai proses yang dinamis.

Ada beberapa program pengembangan masyarakat yang sudah mengarah prosesnya ke pemberdayaan masyarakat, seperti Gapoktan di Rambutan I, pembentukan Koperasi mandiri di Rambutan II, dan aktivitas *Islamic Centre* di pusat KTM. Gapoktan benar-benar dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam berusaha, penyediaan sarana pertanian, sarana pembelajaran, dan akses terhadap teknologi tepat guna (TTG). Demikian pula Koperasi yang “dibentuk kembali” atas inisiatif masyarakat sangat dibutuhkan masyarakat untuk penyediaan modal usaha dan jaringan pemasaran hasil petani. *Islamic Centre* sangat dibutuhkan warga dalam mewadai aktivitas keagamaan, seperti pengajian anak-anak, pengajian bapak dan ibu-ibu, majelis taklim, dan peringatan hari-hari besar Agama Islam.

Program pengembangan masyarakat harus menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan diri di kawasan transmigrasi. Untuk itu partisipasi masyarakat yang diwujudkan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perlu dikedepankan.

h. Partisipasi

Masyarakat di kawasan KTM Rambutan Parit tergolong partisipatif dalam aktivitas, dinamika, dan pelaksanaan program terutama dalam pelaksanaan kelembagaan dan usaha pertanian. Walau partisipasi menjadi

bentuk yang pasif dan belum memiliki kesadaran kritis. Warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dievaluasi oleh pemerintah. Terkait pembangunan fisik, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berharap untuk lebih banyak terlibat, jangan dari orang luar semua, sebab masyarakat tidak hanya jadi penonton. Lebih lanjut disebutkan masyarakat harus menjadi pelaku utama pembangunan, sehingga dilibatkan sejak perencanaan. Hasil diskusi terfokus juga menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sebaiknya dilaksanakan sejak perencanaan program, selama implementasi, dan evaluasi. Masyarakat belum dilibatkan secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KTM yang lebih baik, seyogyanya dilakukan sosialisasi. Program-program apa yang akan dilaksanakan, sebaiknya didiskusikan dan disosialisasikan sehingga program-program prioritas dapat ditetapkan bersama. Partisipasi masyarakat mutlak membutuhkan identifikasi tentang kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat benar-benar memberikan kemanfaatan bagi mereka (Alfitri, 2010).

Menurut informan kunci, pada dasarnya pembangunan KTM tidak mempunyai permasalahan namun pelaksanaannya perlu lebih melibatkan partisipasi masyarakat agar warga merasa memiliki KTM. Sosialisasi KTM kepada masyarakat dirasakan masih terbatas. Senada dengan hal itu, tokoh masyarakat mengatakan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang karena masyarakat belum memahami betul apa itu program-program dalam KTM dan kondisi ke depan seperti apa yang akan diwujudkan. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KTM, maka kepala desa, aparat desa beserta tokoh masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan penumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KTM.

i. Membangun Komunitas

Program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di pusat dan *hinterland* KTM telah mengondisikan transmigran, transmigran penduduk setempat, dan penduduk setempat untuk melakukan interaksi, membawa orang-orang menjadi bersama, melibatkan proses mendorong orang-orang untuk bekerjasama, dan bergantung satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan. Sebagai contoh, dalam kelembagaan Gapoktan telah bersinergi beberapa kelompok tani untuk mencapai kebutuhan dan tujuan yang telah dirumuskan bersama. Gapoktan sebagai wahana berfungsi mempermudah transmigran dan penduduk sekitar dalam berusahatani seperti memperoleh sarana prasarana pertanian dan akses terhadap teknologi tepat guna. Kelembagaan kelompok tani berfungsi sebagai unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana, dan prasarana produksi. Dengan adanya kios sarana produksi pertanian yang dibangun Gapoktan, menjadi sarana membangun komunitas baru untuk saling mengenal, berinteraksi, dan membangun kebutuhan bersama dalam satu wilayah. Senada yang dikemukakan Lawang (2004), komunitas merupakan kumpulan orang yang menghuni suatu tempat dalam jangka waktu yang relatif lama yang warganya dapat melakukan interaksi secara reguler.

Program pengembangan masyarakat di *hinterland* KTM adalah Pamsimas dan PNPM-MP. Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan masyarakat urban, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun prasarana dan sarana air minum. Kegiatan yang dapat menciptakan interaksi, kerjasama, dan mengajak kebersamaan warga adalah PNPM-MP dengan melakukan identifikasi kebutuhan, musyawarah desa, pelaksanaan program, dan evaluasi bersama. Kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan

dengan membangun jalan desa/rabat beton, titian beton, membuat sumur bor untuk mendapatkan air bersih, dan bangunan MCK. Intervensi pengembangan masyarakat di desa-desa *hinterland* ini berfungsi untuk memperkuat komunitas-komunitas yang sudah terbentuk.

j. Berkelanjutan

Pengembangan masyarakat di KTM Rambutan Parit masih berproses kepada pembangunan yang berkelanjutan. Segitiga pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan terjadinya integrasi antara aspek lingkungan/ekologi, ekonomi, dan sosial. Ketiga aspek itu sudah berjalan walaupun belum optimal dalam mendukung pembangunan transmigrasi yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat transmigrasi dan swasta dalam pembangunan KTM belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi. Beberapa program pembangunan yang sudah berjalan menuju berkelanjutan adalah kelembagaan ekonomi seperti Gapoktan dan Koperasi, serta kelembagaan *Islamic Centre*. Kelembagaan tersebut dibutuhkan masyarakat dalam memfasilitasi aktivitas sehari-hari karena dapat membangun struktur, organisasi, bisnis dan industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan. Dengan cara mengoptimalkan peran masyarakat, rakyat akan merasa memiliki terhadap kegiatan pembangunan dan konsekuensinya mereka akan berupaya optimal dalam mendorong program-program pengembangan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi Rambutan Parit sudah menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat seperti perencanaan, pemenuhan HAM, intervensi pemerintah, pendamping, partisipasi, membangun komunitas, dan keberlanjutan, tetapi belum optimal dan belum menyertakan proses pemberdayaan, sehingga belum menciptakan kemandirian dan keberlanjutan.

Pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Dengan kelembagaan ekonomi dan sosial dapat mempermudah mengontrol pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan pelaksanaan. Dengan kelembagaan dapat mendorong terjadinya dinamika sistem atau proses seperti interaksi yang intensif, harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi masyarakat transmigrasi.

Agar pengembangan masyarakat dapat lebih berhasil, maka diperlukan proses pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran masyarakat dari berbagai sisi sehingga mereka merasa memiliki kegiatan dan berpartisipasi mendorong berhasilnya program pengembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. (2002). *Metode Evaluasi Program Pemberdayaan*. Artikel ini merupakan perbaikan makalah yang disampaikan pada Kongres dan Seminar Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia Tahun 2002 di Bogor, Jawa Barat, 28-29 Agustus 2002
- Alfitri (2010). *Program Community Development Perusahaan Migas dalam Penguatan Modal Sosial*. Disertasi. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2008). *Community Development: Community Based Alternatives in on Age Globalisation*. Pearson Education Australia, Unit 4, Level 3, 14 Aquatic Drive Frenchs Forest NSW 2086.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 214/Men/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
- Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.
- Lawang, R. M. Z. (2004). *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai, Flores Barat Tahun 1950-an dan 1980-an*. Depok: FISIP UI Press.
- Najiyati, Sri dkk. (2008). *Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat Desa Sekitar*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana
- Nasdian, Fredian Tonny. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rubin, A dan Earl R. Babbie. (2008). *Research Methods for Social Work, 6th Edition*. Thomson Brooks/Cole.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Halaman ini sengaja dikosongkan

UJI PAKET TEKNOLOGI BUDIDAYA UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KEDELAI PADA LAHAN ULTISOL DI KAWASAN TRANSMIGRASI

CULTIVATION TECHNOLOGY PACKAGES ASSESSMENT FOR INCREASING THE GROWTH OF SOYBEAN PRODUCTIVITY FOR ULTISOL IN TRANSMIGRATION AREAS

Emar Pisa Br Ginting Suka dan Syarah Siti Supriyanti

Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu
Komplek ADC/LDC, Marga Sakti, Padang Jaya,
Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, 38657 Telp: (0736) 574132
e-mail: emar.maharani@gmail.com, stazblue@yahoo.com

Abstrak

Kedelai merupakan komoditas pangan penting dalam perekonomian Indonesia dan menempati urutan ke dua setelah padi. Komoditas kedelai telah masuk dalam program Pangan Nasional saat ini karena kebutuhan kedelai terus meningkat tiap tahunnya. Penggunaan varietas yang adaptif dan spesifik lokasi sangat diperlukan dalam peningkatan pertumbuhan produktifitas kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan paket teknologi budidaya yang tepat untuk peningkatan pertumbuhan produktivitas kedelai yang sesuai dengan karakteristik lokasi lahan uji coba agar bisa diterapkan di lokasi transmigrasi yang memiliki karakteristik lahan yang sama. Uji ini dilaksanakan di lokasi BP2TPK Bengkulu mulai bulan Maret sampai September 2014. Rancangan Percobaan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 8 paket teknologi sebagai perlakuan. Pengamatan dilakukan terhadap penampilan pertumbuhan dan hasil biji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum paket teknologi yang diuji menghasilkan pertumbuhan yang baik sekalipun lahan yang digunakan memiliki pH tanah rendah. Paket teknologi yang menggunakan varietas Anjasmoro sebagai bahan tanam menunjukkan pertumbuhan dan hasil biji kering petakan yang lebih tinggi dibanding paket teknologi yang menggunakan varietas Ijen. Hasil biji kering ubinan tertinggi (4.7 kg) diperoleh dari penerapan paket yang menggunakan varietas Anjasmoro, pupuk kandang dan sekam padi yang ditutup dengan jarak tanam 30 cm x 15 cm yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi budidaya kedelai di kawasan transmigrasi.

Kata Kunci:

kedelai, varietas, paket teknologi, lahan transmigrasi.

Abstract

Soybean is an important commodity for the economy in Indonesian as the second biggest commodity after rice. Nowadays, soybean commodity has been included in the National Food Program because the demand keeps increasing each year. Utilization of adaptive and site-specific varieties is essential to increase the growth of soybean productivity. This research aimed to compare soybeans growth and productivity through technology application implemented at BP2TPK Bengkulu from March to September 2014. The experimental design that used was Randomized Block Design (RBD) with 8 packets as a technology treatment. Observations were made on the appearance of seed growth and yield. The results showed that in general, the tested technology package produced good growth even though in low soil pH. Technology package using Anjasmoro varieties as a planting material shows higher growth and yield of dry beans than technology package using Ijen varieties. The highest yield of dry seeds (4.7 kg) was obtained from the application of Anjasmoro varieties, manure, and rice husk that covered with the spacing of 30 cm x 15 cm which can be used as the basic recommendation of soybean cultivation in transmigration areas.

Keywords:

soybean, varieties, technology package, transmigration areas

I. PENDAHULUAN

Kedelai merupakan komoditas pangan penting dalam perekonomian Indonesia dan menempati urutan kedua setelah padi. Sejak tahun 1984, komoditas kedelai telah masuk dalam program Pangan Nasional untuk meningkatkan gizi. Kebutuhan kedelai terus meningkat tiap tahunnya, saat ini kebutuhan perkapita mencapai 13,41 Kg. Kebutuhan kedelai dalam negeri telah mencapai 2,4 juta Ton, namun total produksi nasional hanya mencapai 908,11 Ton (FAO, 2013). Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan kedelai Indonesia harus mengimpor sebanyak 1,5 Ton kedelai (Depatemen Pertanian, 2008). Gambaran ini mencerminkan bahwa Indonesia masih mengalami defisit yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri (Yoga, 2013).

Rendahnya produktivitas kedelai pada saat ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya pengetahuan petani mengenai budidaya kedelai, utamanya dalam pengelolaan benih dan bibit serta penerapan varietas kedelai yang tidak sesuai dengan kondisi karakteristik lahan tanam (Adisarwanto, 2005). Selain lahan tanam yang digunakan, rendahnya produktivitas juga disebabkan oleh penggunaan varietas yang secara genetik tidak murni lagi karena benih yang digunakan bersumber dari hasil panen pada musim sebelumnya. Pemilihan varietas kedelai yang tepat dan spesifik lokasi merupakan usaha untuk meningkatkan produktivitas lahan. Varietas berdaya hasil tinggi, berumur genjah sampai sedang, tahan serangan hama dan penyakit serta stabil terhadap beragam lingkungan merupakan sasaran yang ingin dicapai. Saat ini beberapa varietas unggul kedelai telah dilepas ke masyarakat seperti: Sinabung, Ijen, Tanggamus, Anjasmoro, Kaba, dan Sibayak. Berbagai varietas yang telah dilepas mempunyai potensi hasil rata-rata 2,5 Ton/Ha (Indarto, 2004). Namun kenyataan yang dihasilkan oleh petani, rata-rata produktivitas secara nasional baru mencapai hasil 1,28 Ton/Ha.

Solusi dalam pelaksanaan budidaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kedelai secara nasional adalah dengan menggunakan benih varietas unggul disertai dengan penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi (Purwono & Heni, 2007). Beberapa langkah untuk menunjang keberhasilan peningkatan produktivitas kedelai diantaranya dengan ketersediaan benih bermutu, waktu tanam yang tepat, pemberian bahan organik, dan pemupukan yang berimbang merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan usaha tani kedelai (Lingga & Marsono, 2005).

Oleh karena itu upaya untuk perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas kedelai memperoleh prioritas yang tinggi. Sehingga diharapkan petani dapat menggunakan teknologi budidaya kedelai yang sesuai seperti penggunaan varietas unggul yang tepat dengan karakteristik lokasi tanam. Penggunaan varietas unggul yang sesuai dengan karakteristik lokasi lahan diharapkan dapat meningkatkan produksi kedelai. Uji coba ini bertujuan untuk mendapatkan paket teknologi budidaya yang tepat dalam peningkatan pertumbuhan produktivitas kedelai sesuai dengan karakteristik lokasi.

II. METODE

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-September 2014 di Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi (BP2TP) Bengkulu. Kondisi lahan BP2TP Bengkulu umumnya didominasi oleh tanah berjenis podsolik merah kuning (tanah lempung berpasir) yang memiliki tingkat kesuburan rendah dan sedang, pH tanah rendah berkisar antara 4,65-5,2 dengan suhu udara berkisar antara 23-31°C. Curah hujan tahunan tinggi yaitu 3000 – 4000 mm atau sebanding dengan 250-330 mm/bulan, ketinggian tempat 200-300 mdpl. Bulan basah Oktober sampai dengan April dan bulan kering Mei sampai dengan September dengan kelembaban 78-86 persen. Berdasarkan karakteristik tersebut maka

BP2TP Bengkulu dianggap dapat mewakili keadaan lokasi transmigrasi/ daerah yang memiliki karakteristik lokasi yang sama.

B. Rancangan Percobaan

Percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan dan melibatkan 8 paket teknologi budidaya kedelai sebagai perlakuan (Tabel 1).

Tabel 1. Paket Teknologi Budidaya Kedelai yang akan Diuji.

No	Paket Tekno-logi	Varietas	Bahan Organik	Pupuk NPK (kg/ha)	Jarak Tanam
1	A	Ijen	Sekam padi sebar	100	30 x 30
2	B	Anjas-moro	Sekam padi sebar	100	30 x 30
3	C	Ijen	Sekam padi penutup tanah	100	30 x 25
4	D	Anjas-moro	Sekam padi penutup tanah	100	30 x 25
5	E	Ijen	Sekam padi + pupuk kandang di sebar	100	30 x 20
6	F	Anjas-moro	Sekam padi + pupuk kandang di sebar	100	30 x 20
7	G	Ijen	Sekam padi + pupuk kandang penutup	100	30 x 15
8	H	Anjas-moro	Sekam padi + pupuk kandang penutup	100	30 x 15

Sumber: Data Primer

C. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan uji coba ini dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah observasi lahan/penentuan lokasi yang bertujuan untuk melihat lokasi/penentuan tempat penelitian. Tahap kedua adalah persiapan lahan yang meliputi analisa tanah yang berguna untuk mengetahui kesuburan

dan keasaman tanah yang akan ditanami. Lalu pada lahan dilakukan penebasan yang bertujuan untuk membersihkan lahan dengan memotong rumput dan membuang kayu-kayu yang ada sekaligus membakar sampah yang masih ada di lokasi. Setelah penebasan langsung dilanjutkan dengan pemandukan yang bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa kayu atau tunggul yang ada kemudian dibakar kembali. Setelah lahan telah bersih, kemudian dilakukan pengolahan lahan dengan menggunakan traktor yang berfungsi untuk menghaluskan tanah sambil membuat bedengan yang sudah direncanakan berapa luasannya.

Tahap persiapan lahan telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan penaburan media tanam yang sesuai dengan penelitian ini yaitu pupuk kandang dan pupuk organik. Tahap selanjutnya adalah penanaman yang dilakukan dengan cara tugal sedalam 3-5 cm dengan jarak tanam yang berbeda menurut perlakuan penelitian yaitu: 30 cm x 30 cm, 30 cm x 25 cm, 30 cm x 20 cm, 30 cm x 15 cm dan setiap lubang tanam diberi 2-3 biji kedelai. Setelah dilakukan penanaman, maka tanaman kedelai pun harus dipelihara. Pemeliharaan tanaman kedelai dalam penelitian ini meliputi: (a) Kegiatan penyulaman yang dilakukan setelah tanaman berumur 1-2 minggu setelah tanam gunanya untuk menggantikan tanaman yang mati; (b) Kegiatan penyiangan yang dilakukan penyiangan 2 kali sampai dengan panen. Pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di lapangan, gunanya untuk membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman kedelai. Karena terkadang dari rumput atau gulma yang ada dapat menjadi tempat tumbuh untuk hama pada kedelai; (c) Kegiatan pemupukan yang menggunakan pupuk kimia Phonska sebanyak 100 kg/ha, pemberian pupuk ini diberikan secara tugal; dan tahap pemeliharaan yang terakhir (d) Kegiatan pengendalian hama dan penyakit, gunanya untuk menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit dengan menggunakan insektisida dengan dosis yang ditentukan.

Selanjutnya, tahapan terakhir yang dilakukan adalah pemanenan dan pasca panen tanaman kedelai. Pemanenan ini

sudah dapat dilakukan jika tanaman kedelai memiliki ciri-ciri daun menguning, polong mengering dan warna coklat, kedelai sudah berumur antara 85-95 hari. Untuk pasca panen, kedelai dijemur terlebih dahulu baru dirontok dengan mesin perontok. Setelah itu dibersihkan kembali dengan pengipas mesin agar kedelai bersih dari kulit ari maupun dari kotoran biji yang busuk, setelah itu dijemur kembali. Apabila sudah kering dengan ketentuan kadar air yang tepat sudah dapat dikemas dan siap untuk digudangkan.

D. Pengumpulan dan Analisis Data

Variabel utama yang diamati dalam penelitian ini adalah (1) Tinggi tanaman, dengan mengukur 15 tanaman sampel mulai dari pangkal batang hingga titik tumbuh tertinggi pada umur 30, 45, dan 60 hari setelah tanam (hst); (2) Jumlah cabang produktif yang dihitung dari 15 tanaman sampel berdasarkan jumlah cabang dari batang utama yang menghasilkan polong pada 60 dan 75 hst; kemudian (3) Jumlah polong isi per tanaman yang dihitung dari 15 tanaman sampel pada saat panen berdasarkan jumlah polong tiap tanaman yang menghasilkan biji normal; selanjutnya (4) Hasil biji kering per tanaman dengan mengukur 15 tanaman sampel dengan cara menimbang seluruh biji yang dihasilkan pada setiap tanaman, yang terlebih dahulu telah dikeringkan; yang terakhir (5) Hasil biji kering per petak yang diukur dengan cara menimbang bobot biji kedelai per petak setelah biji dikeringkan.

Data hasil pengamatan tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara statistik dengan analisis keragaman (anova) dengan uji F pada taraf 5 persen. Pengujian rata-rata variabel antar paket teknologi dilakukan dengan uji beda nyata terkecil dengan taraf nyata 5 persen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Keragaman

Hasil analisis keragaman terhadap data pertumbuhan dan hasil kedelai yang diperoleh

dari 8 paket teknologi yang diuji disajikan pada Tabel 2. Paket teknologi menghasilkan perbedaan yang sangat nyata pada sebagian besar variabel yang diamati, kecuali bobot biji kering per tanaman yang menunjukkan perbedaan yang tidak nyata antar paket teknologi yang diuji. Diduga terjadi karena peningkatan bobot biji pertanaman dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sehingga tidak berpengaruh terhadap paket teknologi yang diberikan. Biji sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang didapatkan dari proses fotosintesis, sehingga tanaman harus membutuhkan cahaya dan air yang cukup. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhartono *et al.*, (2008) yang menyatakan bahwa timbunan hasil fotosintesa tanaman berupa karbohidrat, protein, dan lemak umumnya disimpan pada batang, buah, biji, ataupun polong.

Tabel 2. Nilai F Hitung Hasil Analisis Keragaman Pertumbuhan dan Hasil Kedelai dari 8 Paket Teknologi.

No	Variabel yang diamati	Sumber Keragaman	
		Blok	Paket Teknologi
1	Tinggi Tanaman 30 hst	0,37 tn	31,89 **
2	Tinggi Tanaman 45 hst	0,06 tn	23,40 **
3	Tinggi Tanaman 60 hst	0,24 tn	23,49 **
4	Jumlah cabang Produktif 60 hst	1.18 tn	10,39 **
5	Jumlah cabang Produktif 75 hst	2,47 tn	21,51 **
6	Jumlah polong isi per tanaman	3,62 tn	6,67 **
7	Hasil biji kering per tanaman	5,84 *	1,43 tn
8	Hasil biji kering per petak	0,62 tn	5,30 **

Keterangan : * nyata pada taraf 5%, ** nyata pada taraf 1%,
: tn -tidak beda nyata.

Sumber: Data Primer (Data Diolah).

B. Pertumbuhan Tanaman Kedelai

1. Tinggi Tanaman

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman terlihat bahwa pada awal

pertumbuhan tanaman pada paket A tidak berbeda nyata dan pada paket B pada umur 45 dan 60 hst, tetapi pada paket H umur tanaman 60 hst berbeda nyata dibandingkan dengan umur 30 dan 45 hst. Pada paket D dan E pada umur 45 dan 60 hst tidak berbeda nyata menggunakan varietas yang sama Ijen. Tetapi pada paket G tidak berbeda nyata pada umur 30, 45, dan 60 hst dengan menggunakan jarak tanam dan penggunaan sistem pemupukan yang sama. Untuk tinggi tanaman pada paket A lebih tinggi dibandingkan paket C walaupun penggunaan pupuk dan jarak tanam yang sama. Perlakuan pada Paket H mampu membuat tanaman kedelai lebih tinggi dari pada seluruh Paket yang tersedia, sehingga varietas Anjasromo lebih unggul dari varietas Ijen. Paket H bisa dikembangkan di daerah yang sesuai dengan karakteristik lokasi tempat tanam karena paket yang ditawarkan tidak sulit dalam hal penerapannya.

Dengan kombinasi paket H (varietas Anjasromo, bahan organik sekam padi dan pupuk kandang sebar, pupuk NPK Phonska dan jarak tanam 30 x 15) dapat dinyatakan bahwa varietas kedelai Anjasromo lebih unggul jika dibudidayakan di lokasi yang memiliki karakteristik sesuai dengan lokasi penelitian. Hal tersebut sesuai dengan deskripsi varietas kedelai Anjasromo yang didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Mayers dan Lawn (1991) yang mengatakan bahwa temperatur, lokasi, musim, dan radiasi dapat mempengaruhi adaptasi berbagai kultivar kedelai di suatu daerah.

Berdasarkan bahan-bahan yang digunakan seperti sekam padi, pupuk kandang, dan pupuk NPK Phonska dapat dikatakan mampu membuat kedelai dengan varietas Anjasromo semakin baik produktivitasnya, ditandai dengan tanamannya yang berpostur tinggi. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh tersedianya kecukupan dan keseimbangan hara di dalam tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumardi (2014) yang menyatakan bahwa keseimbangan unsur hara N, P, K akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman

khususnya tinggi tanaman. Keuntungan tanaman berpostur tinggi bagi kedelai adalah pada jumlah cabangnya, pada umumnya semakin tinggi tanaman maka jumlah cabang semakin banyak sehingga diharapkan produksi akan naik. Sedangkan pemberian jarak tanam yang luas (30 cm x 15 cm), mampu meningkatkan produktivitas tanaman kedelai varietas Anjasromo, karena bila jarak antar tanaman rapat, cabang semakin berkurang, atau malah tidak bercabang sama sekali.

Tabel 3. Rata – Rata Tinggi Tanaman pada Umur 30, 45, dan 60 hst.

No	Paket teknologi	Tinggi tanaman (TT)		
		TT 30 hst (cm)	TT 45 hst (cm)	TT 60 hst (cm)
1	H	36,98 a	74,77 a	75,87 a
2	F	34,90 ab	68,61 b	69,58 b
3	B	34,01 ab	64,25 bc	64,75 bc
4	D	32,77 b	63,33 bc	64,13 bc
5	G	26,10 c	65,03 bc	66,64 bc
6	C	24,68 cd	59,95 c	62,07 c
7	A	24,12 cd	51,95 d	53,73 d
8	E	22,56 d	47,33 d	48,08 e

Sumber: Data Primer (Data diolah).

Angka selanjut diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata.

Keterangan:

- A.. Varietas Ijen, bahan organik sekam padi sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 30.
- B. Varietas Anjasromo, bahan organik sekam padi sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30x 30.
- C. Varietas Ijen, bahan organik sekam padi tutup, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 25.
- D. Varietas Anjasromo, bahan organik sekam padi tutup, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30x 25.
- E. Varietas Ijen, bahan organik sekam padi+ppk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 20.
- F. Varietas Anjasromo, bahan organik sekam padi+pupuk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 20.
- G. Varietas Ijen, bahan organik sekam padi+ppk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 15.
- H. Varietas Anjasromo, bahan organik sekam padi+pupuk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 15.

2. Jumlah Cabang Produktif dan Jumlah Polong.

Jumlah cabang produktif dan jumlah polong dalam hubungannya dengan paket-paket teknologi pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-Rata Jumlah Cabang Produktif pada Umur 30, 45, dan 60 hst dan Jumlah Polong Isi

No	Paket teknologi	Jumlah Cabang Produktif		Jumlah Polong Isi
		60 hst	75 hst	
1	E	3,06 a	2,62 b	39,64 c
2	C	2,73 ab	3,66 a	61,40 a
3	A	2,37 ab	2,77 b	52,04 ab
4	B	2,06 b	2,46 b	52,04 ab
5	F	2,06 b	1,82 c	43,35 bc
6	D	2,02 b	2,33 bc	47,53 bc
7	G	0,91 c	1,15 d	28,02 d
8	H	0,84 c	1,15 d	39,66 c

Sumber: Data Primer (Data diolah).

Angka selanjut diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata.

Keterangan:

- Varietas Ijen, bahan organik sekam padi sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 30.
- Varietas Anjasmoro, bahan organik sekam padi sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30x 30.
- Varietas Ijen, bahan organik sekam padi tutup, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 25.
- Varietas Anjasmoro, bahan organik sekam padi tutup, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30x 25.
- Varietas Ijen, bahan organik sekam padi+ppk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 20.
- Varietas Anjasmoro, bahan organik sekam padi+pupuk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 20.
- Varietas Ijen, bahan organik sekam padi+ppk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 15.
- Varietas Anjasmoro, bahan organik sekam padi+pupuk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 15.

Berdasarkan hasil pengamatan yang disajikan pada Tabel 4. terlihat bahwa jumlah cabang produktif antara kedua varietas yang lebih banyak varietas Anjasmoro tinggi 3,06 cabang, Ijen 2,37 cabang tapi tidak beda nyata terhadap varietas Ijen. Dapat dilihat

pada paket G dan H dengan varietas yang berbeda pada umur 60 hst. Pada umur 75 hst paket A dan B berbeda walaupun varietas sama dan jarak tanam tetapi berbeda pada cara pemupukan. Untuk paket B dan D tidak berbeda nyata dengan pupuk dan jarak tanam tetapi berbeda nyata pada paket F dan G dengan perlakuan pupuk yang berbeda. Tetapi pada umur 75 hst dengan perlakuan pemupukan yang sama dan jarak tanam yang sama ternyata varietas yang menghasilkan cabang yang banyak adalah varietas Ijen dibanding dengan varietas Anjasmoro.

Pada Tabel 4. juga digambarkan bahwa jumlah polong paket A jika dibandingkan dengan paket D adalah berbeda nyata tergantung dengan perlakuan pemberian pupuk, namun dengan varietas yang sama, pengaruh variabel jarak tanam ternyata memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah polong. Pada paket A dan paket C untuk variabel jumlah cabang dan jumlah polong yang paling tinggi dihasilkan varietas Ijen pada umur 60 dan 75 hst. Pada masing-masing paket, jumlah polong paket A dengan paket C tidak berbeda nyata dengan jumlah polong yang dihasilkan lebih banyak, berbeda nyata dengan paket E walaupun jumlah cabang produktifnya lebih banyak dibanding paket A dan C. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan polong dipengaruhi oleh pemupukan kimia (Phonska) dan pupuk organik (abu sekam padi+ pupuk kandang) dan jarak tanam. Secara umum seharusnya jumlah polong berkorelasi dengan jumlah biji sehingga semakin tinggi jumlah polong maka jumlah biji juga akan tinggi, namun pada penelitian kali ini tidak berbanding lurus dikarenakan pada paket E saat berumur 75 hst jumlah cabang produktif nya berkurang, ini bisa disebabkan oleh hama.

Jumlah polong isi pertanaman juga dipengaruhi oleh genotipe dari masing-masing varietas serta faktor pembungaan. Semakin banyak bunga maka diharapkan polong yang terbentuk juga akan semakin banyak. Pada penelitian ini nilai heritabilitas jumlah polong isi pertanaman tinggi,

sehingga karakter tersebut lebih dipengaruhi oleh genetiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Crowder (1997) yang menyatakan bahwa heritabilitas tinggi menunjukkan bahwa varians genetik besar dan varian lingkungan kecil.

C. Produksi Kedelai

Jumlah biji per tanaman yang dihasilkan dengan perlakuan paket A dengan paket B sangat signifikan dengan jarak tanam yang sama (30 cm x 30 cm) tetapi varietas dan perlakuan pupuk berbeda. Untuk perolehan hasil biji per tanaman pada paket E menghasilkan yang paling berat dan berbeda pada paket G yang paling sedikit menghasilkan biji per tanamannya. Ternyata biji varietas Ijen lebih berat dari pada varietas Anjasmoro walaupun fisik biji Anjasmoro lebih besar dari pada Ijen. Jumlah biji per tanaman dengan perlakuan varietas beda, pupuk kandang dan sekam padi beda perlakuan, jarak tanam sama 30 cm x 30 cm memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan paket B rata-rata 17,87 gram/biji/tanaman dengan paket G rata-rata 2,63 gram/biji/tanaman.

Untuk pengamatan berat per petak tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap penggunaan varietas dan jarak tanam tetapi dengan pemberian pupuk nyata lebih berat Ijen pada paket A dibanding paket D, sedangkan hasil yang terendah adalah paket G. Data rata-rata bobot biji per tanaman dan per petak disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Rata-Rata Bobot Biji Per Tanaman dan Per Petak.

No	Paket teknologi	Bobot Biji kedelai	
		Per Tanaman (g)	Per Petak (kg)
1	E	10,36	3,67 abc
2	C	10,71	2,63 bcd
3	A	9,87	2,30 cd
4	B	17,87	3,97 ab
5	F	12,01	4,00 ab
6	D	14,00	3,73 abc
7	G	2,36	1,17 d
8	H	10,51	4,67 a

Sumber: Data Primer (Data diolah).

Angka selajur diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata.

Keterangan:

- Varietas Ijen, bahan organik sekam padi sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 30.
- Varietas Anjasmoro, bahan organik sekam padi sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30x 30.
- Varietas Ijen, bahan organik sekam padi tutup, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 25.
- Varietas Anjasmoro, bahan organik sekam padi tutup, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30x 25.
- Varietas Ijen, bahan organik sekam padi+ppk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 20.
- Varietas Anjasmoro, bahan organik sekam padi+pupuk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 20.
- Varietas Ijen, bahan organik sekam padi+ppk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 15.
- Varietas Anjasmoro, bahan organik sekam padi+pupuk kandang sebar, pupuk NPK Phonska, jarak tanam 30 x 15.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Podsolik merah kuning merupakan bagian dari tanah Ultisol, mempunyai horizon B argilik (Rachim, 2009). Ultisol adalah tanah yang mengalami pencucian pada iklim tropis dan sub tropis (USDA, 1998). Karakter utama tanah ultisol adalah memiliki horizon A yang tipis yang memiliki akumulasi lempung pada horizon B dan bersifat agak asam. Dilihat dari sifat tanah, pada umumnya tanah ultisol bersifat agak lembab dengan kadar lengas tertinggi. Pada ultisol yang berbentuk bongkah, maka podsolik merupakan tanah yang mempunyai perkembangan profil dengan batas horizon yang jelas, berwarna merah hingga kuning, keasaman tanahnya termasuk asam hingga sangat asam, kejenuhan basa rendah, kepekaan erosi besar dan tersebar pada daerah dengan curah hujan 2500-3500 mm per tahun tanpa bulan kering (Soepraptohardjo, 1961).

Menurut (Leiwakabessy, 1988), tanah podsolik merah kuning mengandung kadar K, Na, Ca, dan Mg yang cukup rendah, kapasitas tukar kation sedang dan daya fiksasi P yang tinggi sehingga menyebabkan ketersediaan P rendah. Sehingga, podsolik merah kuning mempunyai beberapa

kelemahan untuk digunakan sebagai media pertumbuhan karena pada umumnya kandungan bahan organik di tanah ini sangat sedikit, yang mengakibatkan tanah kurang baik sehingga perkecambahan akar tanaman kurang sempurna. Pada media tanam yang sangat asam, kandungan N dan P biasanya kurang tersedia bagi tanaman dan yang paling penting unsur seperti Aluminium (Al), Besi (Fe), dan Mangan (Mn) dapat bersifat racun bagi tanaman (Soepardi, 1983). Sehingga, diperlukan teknologi budidaya tanaman yang cocok agar tanaman dapat berproduksi dengan maksimal, tak terkecuali pada tanaman kedelai.

Berdasarkan hasil uji coba, budidaya kedelai yang cocok pada tanah/lahan podsolik merah kuning adalah dengan menggunakan benih kedelai Varietas Anjasmoro, menggunakan bahan organik sekam padi dan pupuk kandang sebar, pupuk NPK Phonska dan dengan jarak tanam 30 x 15, umumnya dapat diimplementasikan pada lokasi/ daerah transmigrasi yang memiliki suhu tanah rata-rata lebih dari 80C (Hardjowigeno, 1993). Biasanya tanah dengan kondisi seperti itu berada di daerah Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Daerah-daerah tersebut pada umumnya memiliki kondisi tanah yang sama dengan lokasi uji coba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisarwanto, T. (2005). *Kedelai, Budidaya dengan Pemupukan yang Efektif dan Pengoptimalan Peran Bintil Akar*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Crowder, L.V. (1997). *Plant Genetics* (Genetika Tumbuhan, alih bahasa L. Kusdiarti dan Soetarso). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 499p.
- Departemen Pertanian. (2008). *Mutu Kedelai Nasional Lebih Baik dari Kedelai Impor* [Siaran Pers]. Jakarta: Badan Litbang Pertanian. Diunduh dari <http://pustaka.litbang.deptan.go.id/bppi/lengkap/sp1202081.pdf>.
- FAO. (2013). *FAOSTAT Database*. Diunduh dari <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>.
- Hardjowigeno, S. (1993). *Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Indarto N, A. T. (2004). *Budidaya dan Analisa Usaha Tani Kedelai, Kacang Hijau, dan Kacang Panjang*. Yogyakarta: Absolut.
- Leiwakabessy, F. M. (1988). *Kesuburan Tanah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Lingga, P., & Marsono. (2005). *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Mayers, D.J, dan R.J. Lawn. (1991). *Adaptation of Soybean* (Glycinemax L. Merr) to Dry Season of the Tropics: Effect of Genotype and Environment of Biomass and Seed Yield. *Aust. J. Agric* 42:517-530.
- Purwono, P., & Heni. (2007). *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rachim, D. A. (2009). *Klasifikasi Tanah di Indonesia*. Faperta IPB, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Bogor: IPB.
- Soepardi, G. (1983). *Sifat dan Ciri Tanah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Soepraptohardjo, M. (1961). *Klasifikasi Tanah di Indonesia*. Kongres Ilmu Tanah I. Bogor.
- Suhartono., R.A. Zidqi., dan A. Khoiruddin. (2008). *Pengaruh Interval Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai* (Glycinemax L. Merr) pada Berbagai Jenis Tanah. *Embryo*. 5 (1).

- Sumardi. (2014). *Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Varietas (Glycine Max) Terhadap Jenis Pupuk Pelengkap Cair*. Padang: Universitas Taman Siswa.
- USDA. (1998). *Soil Quality Information Sheet, USDA Natural Resources Conservation Service*. Diunduh dari <http://soils.usda.gov>.
- Yoga, AB. (2013). Pengaruh Jumlah Produksi Kedelai Dalam Negeri, Harga Kedelai Dalam Negeri, dan Kurs Dollar Amerika Terhadap Volume Impor Kedelai Indonesia. *E-Jurnal EP Unud*, 2 [3]: 129-134.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal Desa Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan review terhadap naskah yang dimuat pada Jurnal Desa edisi I Vol. 1 No. 1 Desember 2018, kepada:

1. Dr. Ety Rahayu (Kesejahteraan Sosial)
2. Dr. Triyanti Anugrahini, M.Si (Kesejahteraan Sosial)
3. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T. (Pengembangan Wilayah)
4. Ir. Mohammad Chozin, M.Sc., Ph.D. (Agronomi, Pemuliaan Tanaman)
5. Drs. H. Indro Warsito, M.A (Manajemen Sumber Daya Manusia)

KETENTUAN PENULISAN NASKAH JURNAL DESA (J-Desa)

Umum

Naskah berupa karya tulis ilmiah yang belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dalam proses evaluasi publikasi lain, serta telah mendapat persetujuan dari pihak lain (bila ada) sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab terhadap naskah. Penerbit tidak bertanggungjawab terhadap klaim atau kompensasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan naskah. Isi naskah menjadi tanggungjawab penuh dari penulis.

Khusus

1. Ruang Lingkup

- a. Materi naskah dapat berupa hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis dengan menggunakan data primer dan atau sekunder.
- b. Topik makalah terkait bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan perdesaan dalam skala pra-desa, desa, kawasan, dan daerah.

2. Bahasa

- a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- b. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- c. Pemakaian istilah Bahasa Indonesia mengacu pada Pedoman Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

3. Sistematika Penulisan

- a. **Naskah** disusun dengan urutan sebagai berikut: judul, nama penulis, dan nama lembaga, alamat, email, abstrak, kata kunci, isi naskah, dan daftar pustaka.
- b. **Judul Naskah** harus singkat, informatif, dan mencerminkan isi suatu tulisan. Judul tidak boleh lebih dari 15 kata dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- c. **Nama Penulis** ditulis tanpa gelar, disertai nama lembaga (bila ada) dan alamat serta email.
- d. **Abstrak** merupakan ringkasan yang utuh dan lengkap, menggambarkan esensi isi tulisan. Jumlah kata maksimal 250 kata (Bahasa Indonesia) dan 150 kata (Bahasa Inggris). Abstrak Bahasa Indonesia ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan abstrak Bahasa Inggris. Abstrak ditulis dengan huruf Times New Roman, font 10, spasi 1. Abstrak Bahasa Indonesia ditulis tegak, sedangkan abstrak Bahasa Inggris dituliskan miring (*italic*)
- e. **Kata Kunci** dapat berupa kata tunggal dan kata majemuk (terdiri lebih dari satu kata) sehingga mencerminkan pengertian suatu konsep penting yang terkandung dalam tulisan. Penulisan kata kunci antara tiga sampai lima kata. Kata kunci ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- f. **Isi naskah** disajikan dalam empat bab, yaitu: **pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.**
- g. **Pendahuluan** memuat latar belakang dan tujuan penelitian. Apabila ada tinjauan pustaka yang terkait dengan substansi naskah, dapat dimasukkan dalam pendahuluan tanpa mencantumkan sub bab.
- h. **Metode** harus dijabarkan secara jelas dan rinci, mencantumkan metode penelitian, lokasi pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan metode

analisis. Metode penelitian dengan data sekunder harus mencantumkan sumber data dan metode analisis.

- i. **Hasil dan Pembahasan** disajikan dalam beberapa sub bab, sesuai dengan tujuan dan lingkup penulisan naskah.
- j. **Kesimpulan** merupakan intisari temuan hasil analisis sesuai dengan tujuan penulisan naskah. Dalam kesimpulan dapat disampaikan saran atau rekomendasi, tanpa mencantumkan sub bab.
- k. **Pustaka** yang dimuat dalam naskah harus tercantum dalam daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dan disusun sesuai dengan format APA.

Contoh:

- Buku: Munir, Rozy. (2011). *Migrasi*. Dalam Adioetomo, Sri Moertiningsih. *Dasar-Dasar Demografi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Jurnal atau Buletin: Grigg, D. B. (1977). E. G. Ravenstein and The Laws of Migration. *Journal of Historical Geography*. 3. 1 (1977). pp. 41-54.
- Internet: Direktorat Jenderal P2KTrans. (2014). *Peta Sebaran Kawasan Transmigrasi Seluruh Indonesia*. Diakses pada 28 Agustus 2014 dari <http://p2ktrans.depnertrans.go.id/peta.html>.

4. Teknik Penulisan

- a. **Judul naskah** diketik dengan huruf kapital, Times New Roman.
- b. **Abstrak** ditulis dalam satu paragraf, diketik dengan huruf Times New Roman, font 10 pt, italic satu spasi.
- c. **Isi naskah** diketik dengan huruf Times New Roman, font 12 pt, spasi 1,5 dan tidak melebihi 20 halaman termasuk tabel, gambar atau grafik.
- d. **Judul bab** menggunakan huruf kapital.
- e. **Tabel** diberi nomor urut dengan judul singkat dan jelas. Judul tabel diletakkan di atas tabel, diketik dengan huruf Times New Roman, font 12 pt, spasi tunggal. **Isi tabel** diketik dengan huruf Times New Roman, font 10 pt, spasi tunggal. Jumlah digit data dalam tabel maksimum dua digit di belakang koma. Sumber data diletakkan di bawah tabel. Judul tabel, center, font 12. Sumber data ditulis dengan huruf Times New Roman, font 9 pt, spasi tunggal
- f. **Gambar dan grafik** diberi nomor urut dengan judul singkat dan jelas. Judul diletakkan di bawah gambar dan grafik.
- g. **Pustaka** diketik dengan huruf Times New Roman, font 10 pt, spasi tunggal.

5. Seleksi Naskah

- a. Naskah disampaikan dalam bentuk *print out* disertai *softcopy* kepada Redaksi Jurnal Desa dengan alamat Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Gedung Utama Lantai 6, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta 12750, Telp./Faks.: +62-21-7971010, Email: desajurnal@gmail.com.
- b. Redaksi berhak menyeleksi naskah dan memperbaiki redaksional tanpa mengubah substansi.
- c. Naskah yang telah dikoreksi dan disetujui untuk diterbitkan, dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki dan disampaikan kembali beserta *softcopy*-nya kepada Redaksi paling lambat 1 (satu) minggu setelah disetujui.
- d. Naskah yang tidak dimuat menjadi hak redaksi dan tidak dikembalikan kepada penulis.

JURNAL DESA

Redaksi Jurnal Desa

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Gedung Utama Lt.6. Jln TMP Kalibata No. 17 Jakarta 12750
Telp/Fax : +62-21-7971010
Email : desajurnal@gmail.com



9 772655 244009